

Kerangka Kerja Kelompok Bank Dunia dan Strategi IFC untuk Keterlibatan dalam Sektor Minyak Kelapa Sawit



THE WORLD BANK



IFC

**International
Finance Corporation**
World Bank Group

Misi Kelompok Bank Dunia

Misi Kelompok Bank Dunia adalah untuk:

- Mengurangi kemiskinan secara profesional agar mencapai hasil yang berkelanjutan
- Membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri dan lingkungannya

Hal ini dapat tercapai dengan cara:

Menyediakan sumber daya, berbagi pengetahuan, meningkatkan kapasitas dan membangun kerjasama pada sektor-sektor umum dan swasta.

Bagaimana Kelompok Bank Dunia Bekerja

Kelompok Bank Dunia atau *World Bank Group* (WBG) terdiri dari *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), yang bekerja pada negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah yang layak memperoleh kredit; *International Development Association* (IDA), yang memfokuskan diri pada negara-negara termiskin dunia (secara bersama-sama merupakan Bank Dunia); *International Finance Corporation* (IFC), yang melakukan investasi dan memberikan pendamping teknis guna mendukung pembangunan sektor swasta; *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA), yang memberikan asuransi risiko politik dan jaminan kepada sektor swasta; dan *International Centre for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID: Pusat untuk Penyelesaian dari Perselisihan/Sengketa Investasi Internasional).

Secara umum, program kerja WBG ditentukan oleh pemangku kepentingan dari 187 negara anggota, kebutuhan dan prioritas negara-negara klien di mana Bank Dunia beroperasi, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, serta komunitas pemangku kepentingan yang luas, termasuk masyarakat madani dan sektor swasta.

Seluruh pinjaman, bantuan, dan saran-saran WBG diatur oleh kebijakan-kebijakan operasional dan Standar-standar Kinerja.

Masing-masing lembaga WBG memiliki misi yang sama dalam memerangi kemiskinan dan mendukung pembangunan lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.

Cara Bank Dunia Bekerja

Pemerintah, yang merupakan para klien dari Bank Dunia, merupakan faktor pendorong di balik pengaturan prioritas strategis di dalam sebuah *Country Assistance Strategies* (CAS: Strategi Bantuan untuk sebuah Negara) bagi negara-negara berpenghasilan rendah, atau *Country Partnership Strategies* (CPS: Strategi Kemitraan dengan Negara) bagi negara-negara berpenghasilan menengah.

Rancangan dari strategi-strategi ini dipimpin oleh pemerintah negara tuan rumah yang relevan dan mencerminkan masukan dari pemangku kepentingan dengan jangkauan beragam yang diperoleh melalui pendekatan formal dan proses konsultasi. *Poverty Reduction Strategies* (Strategi untuk Mengurangi Kemiskinan) merupakan naskah yang menjelaskan makroekonomi, struktur dan tujuan kebijakan sosial dan kebutuhan pendanaan eksternal dari suatu negara. CAS dan CPS menjabarkan program selektif dari dukungan WBG untuk suatu negara secara khusus dan mengambil titik awal dari visi pembangunan jangka panjang negara tersebut. Mereka juga mempertimbangkan keunggulan komparatif dari Bank Dunia dalam konteks program-program dan proyek-proyek yang didukung oleh pihak lain. Dalam praktiknya, Bank Dunia hanya dapat bergerak dalam suatu sektor bila pemerintah dari negara tersebut meminta keterlibatan mereka. Informasi lebih lanjut mengenai Strategi-strategi Negara dan Siklus Proyek Bank Dunia dapat ditemukan pada Lampiran I.



Bagaimana IFC Bekerja

IFC mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara berkembang dengan membiayai investasi sektor swasta, memobilisasi modal di pasar keuangan internasional, dan menyediakan jasa konsultasi kepada perusahaan dan pemerintah.

IFC menawarkan berbagai produk keuangan dan jasa kepada klien dan terus mengembangkan alat keuangan baru yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko dan memperluas akses mereka ke pasar modal asing dan domestik. Sebuah perusahaan atau pengusaha yang ingin mendirikan bisnis baru atau memperluas usaha yang sudah ada bisa mendekati IFC langsung dengan mengirimkan sebuah proposal investasi. Setelah kontak awal dan peninjauan awal itu, IFC dapat melanjutkan dengan meminta studi kelayakan rinci atau rencana bisnis untuk menentukan apakah rencana proyek tersebut diterima atau tidak. Seperti investor sektor swasta dan pemberi pinjaman komersial, IFC mencari keuntungan, mengenakan biaya atas pendanaan dan jasanya kesesuaian dengan keadaan pasar, serta secara bersamaan menanggung resiko-resiko yang ada dengan mitra-mitranya.

IFC juga menawarkan berbagai jasa konsultasi untuk mendukung pengembangan sektor swasta di negara-negara berkembang. Kegiatan konsultasi dari IFC ini disusun menjadi empat area bisnis: Akses terhadap Pembiayaan, Iklim Investasi, Usaha yang berkesinambungan, dan Kemitraan Pemerintah-Swasta.



THE WORLD BANK



IFC

**International
Finance Corporation**
World Bank Group

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	6
I. PENDAHULUAN	11
II. KONTEKS GLOBAL DARI MINYAK KELAPA SAWIT	13
2.1. Nilai dari Investasi Pertanian	13
2.2. Signifikansi Global dari Minyak Kelapa Sawit.....	13
2.3. Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Nabati Lainnya	14
2.4. Pengamatan Permintaan	15
2.5. Pengamatan Pasokan	14
2.6. Pendapatan Ekspor.....	17
2.7. Menciptakan Pekerjaan dan Penghasilan.....	17
2.8. Mengurangi Kemiskinan	18
2.9. Keamanan Pangan.....	19
2.10. Pengalaman Bank Dunia dan IFC	19
III. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL: KEPRIHATINAN DAN KEMUNGKINAN PENYELESAIANNYA	20
A. LINGKUNGAN HIDUP	20
3.1. Keprihatinan Lingkungan Hidup.....	20
3.1.1. <i>Keanekaragaman Hayati</i>	21
3.1.2. <i>Produksi Kelapa Sawit dan Emisi Gas Rumah Kaca</i>	21
3.1.3. <i>REDD dan penggunaan Lahan Degradasi</i>	22
3.2. Kemungkinan Solusi untuk Memperbaiki Hasil Lingkungan Hidup dari Perluasan Kelapa Sawit	22
B. SOSIAL.....	23
3.3. Keprihatinan Sosial.....	23
3.3.1. <i>Hak atas Tanah</i>	25
3.3.2. <i>Dampak terhadap Kebudayaan dan Penghidupan</i>	25
3.3.3. <i>Tenaga Kerja</i>	26
3.4. Pemilik Perkebunan	25
<i>Struktur Hubungan-hubungan Pemilik Perkebunan</i>	28
3.5. Kemungkinan Penyelesaian untuk Memperbaiki Dampak-dampak Sosial dari Perkembangan Kelapa Sawit	29
IV. KERANGKA KERJA KELOMPOK BANK DUNIA DAN STRATEGI IFC.....	31
A. KERANGKA KERJA KELOMPOK BANK DUNIA (WBG)	
4.1. Pilar-pilar Kerangka Kerja WBG	31
4.1.1. Lingkungan Kebijakan dan Peraturan.....	34
4.1.2. Mobilisasi dari Investasi Sektor Swasta	36
4.1.3. Pembagian Keuntungan dengan Pemilik Perkebunan dan Komunitas Masyarakat	37
4.1.4. Aturan-aturan untuk Praktik Berkelanjutan.....	38
4.2. Penerapan Kerangka kerja WBG.....	40
4.2.1. Penilaian Awal	41
4.2.2. Pendekatan Terpadu.....	41
4.2.3. Catatan Praktik yang Baik untuk Bimbingan Staf.....	42



4.2.4. Revisi Penyaringan Risiko dan Alat Penilaian (untuk IFC).....	43
4.2.5. Kolaborasi yang Diperkuat dengan Pemangku Kepentingan	43
4.2.6. Pengawasan dan Evaluasi	43
B. STRATEGI IFC.....	47
4.3. Elemen-elemen Utama dari Strategi IFC.....	47
4.4. Pendekatan-pendekatan Regional.....	48
4.5. Dampak Pembangunan	50
4.6. Revisi Pendekatan Investasi dan Pendamping Teknis IFC	51
4.7. Menangani Masalah Lingkungan dan Sosial	54
4.8. Keterlibatan IFC dengan Perusahaan-perusahaan Swasta dalam Nilai Mata Rantai Minyak Kelapa Sawit	57
LEMBAR LAMPIRAN.....	59
Lampiran I: Strategi Bank Dunia Untuk Suatu Negara dan Siklus Proyek	61
Lampiran II: Gambaran Proses Konsultasi.....	63
Lampiran III: Produksi dan Perdagangan Minyak Nabati Utama	64
Lampiran IV: Pengalaman Kelompok Bank Dunia di Sektor Minyak Kelapa Sawit.....	65
Lampiran V: Para Pelaku dalam Sektor Minyak Kelapa Sawit	71
Lampiran VI: Kebijakan Pengamanan Bank Dunia.....	75
Lampiran VII: Menerapkan Pengamanan Bank Dunia dan Standar Kinerja IFC: Sebuah Catatan Praktik Terbaik untuk staf WBG	78
Lampiran VIII: Pendekatan WBG untuk Pengawasan dan Evaluasi.....	80
Lampiran IX: Contoh Kemitraan WBG yang Sedang Berlangsung Guna Membantu Proses Berkelanjutan	81
Lampiran X: Rekomendasi Penasihat Kepatuhan IFC/Ombudsman dan Tanggapan IFC	83
Lampiran XI: Meningkatkan Kehidupan Para Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit: Peran Sektor Swasta	87
Lampiran XII: Alat Pemeriksaan dan Penilaian Risiko IFC	91
Lampiran XIII: Kerangka Kerja Berkelanjutan IFC: Aplikasi Masalah Lingkungan dan Sosial Pada Proyek Kelapa Sawit	95



DAFTAR SINGKATAN

BACP	<i>Biodiversity and Agricultural Commodities Program</i> (Program Komoditas Keanekaragaman Hayati dan Pertanian)
CAO	<i>Compliance Advisor/Ombudsman</i> (Penasihat Kepatuhan)
CAS	<i>Country Assistance Strategy</i> (Strategi Bantuan untuk Sebuah Negara)
CSA	<i>Country Situation Analysis</i> (Analisis Situasi Negara)
CIRAD	<i>International Cooperation Centre for Agricultural Research and Development (Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement</i> Pusat Kerjasama Internasional bagi Penelitian Pertanian dan Pembangunan)
CPS	<i>Country Partnership Strategy</i> (Strategi Kerjasama Negara)
CSPO	<i>Certified Sustainable Palm Oil</i> (Sertifikat Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan)
DOTS	<i>Development Outcome Tracking System</i> (Sistem Pelacakan Hasil Pembangunan)
E&S	<i>Environmental and Social</i> (Lingkungan Hidup dan Sosial)
ESAP	<i>Environmental and Social Action Plan</i> (Rencana Tindakan Lingkungan Hidup dan Sosial)
ESMS	<i>Environmental and Social Management System</i> (Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial)
ESRP	<i>Environmental and Social Review Procedure</i> (Prosedur Peninjauan Lingkungan Hidup dan Sosial)
ESRS	<i>Environmental and Social Review Summary</i> (Ringkasan Peninjauan Lingkungan Hidup dan Sosial)
FEATI	<i>Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information</i> (Pemberdayagunaan Pemilik Perkebunan melalui Teknologi Pertanian dan Informasi)
FFB	<i>Fresh Fruit Bunch</i> (Tandan Buah Segar)
FI	<i>Financial Intermediary</i> (Penengah Keuangan)
FIP	<i>Forest Investment Program</i> (Program Investasi Hutan)
FPIC	<i>Free, Prior and Informed Consultation</i> (Konsultasi Gratis, Awal, dan Terinformasi)
GFP	<i>Growing Forest Partnership</i> (Mitra Pertumbuhan Hutan)
GHG	<i>Greenhouse Gases</i> (Gas Rumah Kaca)
HCV	<i>High Conservation Value</i> (Nilai Tinggi Konservasi)
IBRD	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i> (Bank Internasional bagi Rekonstruksi dan Pembangunan)
IDA	<i>International Development Association</i> (Asosiasi Pembangunan Internasional)
IEG	<i>Independent Evaluation Group</i> (Kelompok Evaluasi Independen)
IFC	<i>International Finance Corporation</i> (Korporasi Keuangan Internasional)
IIED	<i>International Institute for Environment and Development</i> (Lembaga Internasional bagi Lingkungan Hidup dan Pembangunan)
IP	<i>Indigenous People</i> (Penduduk Asli)
NES	<i>Nucleus Estates and Smallholders</i> (Perkebunan Inti dan Pemilik Perkebunan)
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i> (Organisasi Non-Pemerintahan)
OECD	<i>Organisation for Economic Cooperation and Development</i> (Organisasi bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)
PROFOR	<i>Programme on Forests</i> (Program Mengenai Kehutanan)



PS	<i>Performance Standard (Standar Kinerja)</i>
P&C	<i>Principles and Criteria (Prinsip-prinsip dan Kriteria)</i>
RSPO	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil (Meja Bundar Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan)</i>
REDD	<i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Mengurangi Emisi dari Penebangan Hutan dan Degradasi Hutan)</i>
SAN	<i>Sustainable Agriculture Network (Jaringan Pertanian yang Berkelanjutan)</i>
WB	<i>World Bank (Bank Dunia)</i>
WBG	<i>World Bank Group (Kelompok Bank Dunia)</i>
WWF	<i>World Wildlife Fund (Pendanaan Margasatwa Dunia)</i>



RINGKASAN EKSEKUTIF

Signifikansi Global dari Minyak Kelapa Sawit

Industri Kelapa sawit merupakan penggerak utama untuk pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, Papua Nugini, Afrika Tengah dan Barat, serta di sejumlah daerah tropis Amerika Latin. Saat ini minyak kelapa sawit merupakan jenis minyak nabati tropis yang paling penting di industri minyak dan lemak dunia dari segi nilai produksi dan perdagangannya. Industri tersebut telah sangat berperan dalam menghasilkan lapangan pekerjaan dan pendapatan ekspor bagi negara-negara produsennya.

Alasan utama atas dominasi minyak kelapa sawit pada pasaran minyak nabati adalah produktivitas inheren dari tanaman tersebut dan juga posisi kompetitifnya dibanding jenis minyak nabati lain. Minyak kelapa sawit paling tidak 5 kali lebih produktif per hektar dibanding biji minyak nabati lain dan per ton produksimemiliki kebutuhan paling rendah atas penggunaan bahan bakar, pupuk, dan pestisida. Sekitar 80% dari produksi minyak sawit dunia saat ini dikonsumsi dalam bentuk makanan atau produk yang dapat dimakan. Dengan meningkatnya permintaan atas produk makanan yang disertai juga dengan peningkatan penggunaan produk non-makanan, maka sangat memungkinkan permintaan atas minyak kelapa sawit akan terus tumbuh pesat di masa mendatang.

Dengan peningkatan populasi sebesar 11,6 % dan peningkatan konsumsi per kapita sebesar 5%, tambahan 28 juta ton minyak nabati harus diproduksi setiap tahunnya hingga tahun 2020. Dengan kebutuhan atas lahan baru yang terendah, maka produk minyak kelapa sawit sangat tepat untuk memenuhi permintaan ini. Diperlukan tambahan lahan 6,3 juta hektar untuk ditanami guna memenuhi produksi minyak kelapa sawit tersebut; sebagai perbandingan bilamana peningkatan tersebut dipenuhi oleh produksi minyak kedelai, maka dibutuhkan tambahan lahan sebanyak 42 juta hektar untuk diolah.

Sektor minyak kelapa sawit mempekerjakan sekitar 6 juta orang di seluruh dunia dan menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan per hektar dibandingkan operasi peternakan

skala besar lainnya. Sektor tersebut lebih banyak di dorong oleh investasi sektor swasta dan melibatkan petani-petani kecil pemilik perkebunan dalam jumlah yang besar. Petani kecil perkebunan terlibat dalam 40 persen dari perkebunan minyak kelapa sawit di Asia Tenggara dan lebih dari 80 persen perkebunan minyak kelapa sawit di Afrika. Sementara pendapatan yang didapat oleh para petani perkebunan dapat sangat bervariasi sesuai dengan keterlibatan dan akses terhadap pasar, namun mereka melaporkan bahwa penghasilan yang mereka terima dari kelapa sawit berada dalam kisaran yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman alternatif lainnya. Hal ini menyebabkan jumlah petani perkebunan yang memasuki sektor ini semakin bertambah seiring dengan permintaan global akan minyak kelapa sawit yang terus bertambah. Oleh karena sistem perakarannya yang dalam dan luas, kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik meski pada tanah yang berkontur tidak rata dan mudah bererosi, yang umumnya kurang cocok untuk ditanami tanaman tahunan seperti sereal; oleh karena itu, persaingan langsung dengan tanaman-tanaman ini tidaklah banyak. Minyak kelapa sawit juga merupakan jenis minyak nabati yang termurah, hal ini membuat minyak kelapa sawit sebagai minyak yang paling umum digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu.

Walaupun kelapa sawit telah memberi dampak positif bagi masyarakat kurang mampu atas lapangan pekerjaan dan penghasilan, namun di beberapa negara, industri ini sudah lama dikritik sebagai kontributor utama deforestasi dan penyebab emisi gas rumah kaca. Selain itu, industri kelapa sawit juga telah dikritik karena pembagian keuntungan yang tidak adil dengan masyarakat setempat dan dampak yang sangat merugikan bagi Penduduk Asli. Hal ini sepertinya menandakan adanya penukaran yang tidak terpisahkan dari perkembangan kelapa sawit dengan lingkungan hidup namun hal tersebut belum tentu demikian. Dampak menyeluruh dari industri kelapa sawit terhadap lingkungan hidup dan sosial tergantung dari di mana dan bagaimana industri tersebut dikembangkan. Persoalan timbul di saat insentif perkembangan ekonomi yang sangat kuat dipaksakan pada kerangka kerja pemerintahan yang memiliki kapasitas lemah dalam membimbing



pembangunan perkebunan kelapa sawit baru pada daerah-daerah di mana dampak-dampak lingkungan hidup dan sosial seharusnya juga diperkecil.

Melakukan Hal yang Benar

Keuntungan yang berkelanjutan dapat dimaksimalkan melalui kebijakan kerangka kerja yang memberi insentif-insentif bagi perkembangan perkebunan pada tanah non-hutan dengan tuntutan tanah yang telah diselesaikan dan lingkungan usaha yang mendukung. Perbaiki terhadap perencanaan tata ruang agar dapat menentukan kesesuaian tanah yang tepat bagi pengolahan kelapa sawit yang berkelanjutan di mana masyarakat setempat juga memiliki kepentingan dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit. bersama-sama dengan menggunakan ketentuan-ketentuan perjanjian yang jelas dan sistem penyelesaian perselisihan yang menguntungkan baik bagi pihak investor yang bertanggung jawab maupun populasi setempatnya. Memperbaiki iklim usaha yang kondusif untuk mengembangkan emisi karbon rendah dan daerah-daerah non hutan melalui insentif-insentif termasuk kemungkinan pembayaran jasa-jasa lingkungan hidup dibawah REDD+ juga akan meningkatkan hasil positif.

Fokus terhadap meningkatkan produktivitas dari perkebunan kelapa sawit yang ada, saat digabungkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dapat mengurangi tekanan untuk melakukan perluasan kedalam tanah hutan, dan yang terpenting adalah penanganan perbedaan produktivitas antara perkebunan besar dan perkebunan pemilik perkebunan mungkin dapat menguntungkan pihak yang miskin. Memperbaiki akses ke pasar dan lembaga keuangan bagi pemilik perkebunan independen, dan menguatkan jasa pengembangan petani juga akan memberikan keuntungan tambahan kepada populasi setempat. Dan akhirnya, penerapan standar-standar lingkungan hidup dan sosial yang berbasis komoditas suka rela yang melindungi konservasi kehutanan yang bernilai tinggi dan mendukung pembagian keuntungan yang adil merupakan hal yang genting bagi perkembangan berkelanjutan bagi sektor tersebut.

Berhenti Sementara untuk mendapatkan Analisis Baru

Keuntungan yang ada dan potensial inilah yang memotivasi WBG untuk berinvestasi dalam minyak kelapa sawit di masa lampau. Namun sebuah laporan IFC pada tahun 2009 yang dibuat oleh Penasehat Kepatuhan/Ombudsman IFC mengenai penanganan investasi hilir IFC dan keprihatinan yang diajukan oleh *civil society organization* akan kelanjutan lingkungan hidup dan sosial pada sektor kelapa sawit mendorong WBG menghentikan investasi baru dan mengevaluasi kembali keterlibatannya.

Peninjauan Pemangku Kepentingan

Selama tahun 2010, WBG melakukan peninjauan terhadap signifikansi global dari sektor minyak kelapa sawit, termasuk: dampak-dampaknya terhadap lapangan kerja, sumber penghasilan, pendapatan ekspor dan pengurangan kemiskinan; dampak-dampaknya terhadap lingkungan hidup termasuk peran sektor sebagai pendorong deforestasi dan penyumbang emisi gas rumah kaca, serta potensi sektor dalam membawa keuntungan pembangunan kepada masyarakat miskin di daerah dan pemilik perkebunan. Sembilan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan mencapai lebih dari 2.500 pemangku kepentingan dari 30 negara, dan suatu konsultasi email interaktif (*E-consultation*) dengan peserta dari 51 negara, memberi masukan praktis yang mendalam dari para ahlinya serta analisa tambahan terhadap usaha WBG dalam menilai keuntungan dan risiko dari sektor tersebut, dan menjawab pertanyaan: Dapatkah WBG berperan dalam menempatkan sektor tersebut pada keadaan yang lebih berkelanjutan? Hasilnya adalah *Kerangka Kerja Kelompok Bank Dunia dan Strategi IFC untuk Keterlibatannya dalam Sektor Minyak Kelapa Sawit*.

Kerangka Kerja Keterlibatan

Kerangka kerja tersebut mencerminkan kesimpulan WBG bahwa sehubungan dengan terus bertambahnya permintaan atas minyak kelapa sawit dan perbandingan keuntungan ketika dibandingkan dengan minyak nabati lainnya; adanya potensi untuk mengurangi risiko, dan kesempatan-kesempatan untuk menghasilkan keuntungan pembangunan, terdapat kebutuhan yang mendesak terhadap



para pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan bersama pemangku kepentingan guna menguatkan dampak pembangunan, mengurangi konsekuensi negatif dan membangun keadaan yang berkelanjutan pada seluruh sektor tersebut.

Kelompok pelaku yang luas dibutuhkan untuk membangun keadaan yang berkelanjutan

Sektor minyak kelapa sawit dapat dipandang sebagai jaringan usaha-usaha yang terlibat dalam berbagai segmen dari rantai pasokan (*supply chain*), yang semuanya bekerja di dalam suatu kerangka kerja kebijakan pemerintah, undang-undang, dan sistem peraturan. Pemerintah—melalui kapasitas yang dikembangkan dan bentuk baru tata pemerintahan—dapat menangani kegagalan pasar, mengatur persaingan, dan secara strategis ikut dalam *public-private partnerships* (PPP) untuk mempromosikan persaingan di dalam sektor agribisnis dan melibatkan secara lebih lanjut para petani-pemilik perkebunan dan pekerja pedesaan. Usaha-usaha yang berada dalam rantai pasokan utama termasuk produsen kecil (termasuk petani kecil pemilik perkebunan), perusahaan perkebunan multinasional besar, pengolah minyak kelapa sawit mentah, perusahaan manufaktur produk-produk konsumen dan industrial yang menggunakan minyak kelapa sawit, dan pembeli-pembeli, yang seluruhnya terhubung oleh perusahaan perdagangan dan transportasi. Sektor tersebut juga mendukung usaha-usaha yang menyediakan berbagai macam barang-barang dan jasa—yang dibutuhkan oleh industri tersebut, juga dengan industri dan asosiasi-asosiasi lainnya yang mewakili kepentingan kelompok-kelompok pemangku kepentingan. Berbagai pemangku kepentingan, termasuk *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), memberi kesempatan bagi anggotanya untuk menerapkan standar dan kriteria-kriteria guna mempromosikan keadaan yang berkelanjutan melalui sertifikasi.

Menguatkan sektor secara keseluruhan, dan memastikan bahwa semua bagian ini bekerja bersama secara efektif dapat memberi dampak pembangunan yang bermakna. Melalui tindakan bersama dan kemitraan di antara pelaku-pelaku pembangunan pada sektor ini dapat ditingkatkan dan diperluas keuntungannya untuk mencapai masyarakat miskin yang lebih banyak dan memberikan dampak yang lebih luas pada perekonomian.

Keterlibatan dan keunggulan perbandingan Kelompok Bank Dunia

Laporan Pembangunan Dunia tahun 2008: Pertanian bagi Pembangunan menunjukkan bahwa pertumbuhan yang berasal dari pertanian tiga kali lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dibandingkan dengan pertumbuhan yang berasal dari sektor-sektor lainnya. Sementara investasi WBG dalam pertanian secara drastis telah meningkat dalam lima tahun terakhir, diperkirakan sekitar \$14 miliar dibutuhkan setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan investasi pertanian dalam negara berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi sektor publik sendiri tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Baik investasi publik dan swasta diperlukan untuk mendorong perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Lebih lanjut, analisa dan pengalaman WBG yang mendalam di dalam bidang pembangunan, investasi pertanian, dan pengelolaan hutan bersama-sama dengan keterlibatan di dalam sektor swasta, menunjukkan bahwa walaupun dengan adanya tata pemerintahan yang baik, peraturan yang jelas, dan jangka waktu kepemilikan tanah yang diakui, pertanian skala besar dapat memberikan keuntungan-keuntungan, tindakan yang dipusatkan untuk memperkuat petani kecil perkebunan sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan memusatkan perhatian terhadap perlindungan hutan yang masih berdiri sangat mendesak bagi kelanjutan lingkungan hidup. WBG dapat memberikan pengalaman pembangunan yang luas ini kepada sektor minyak kelapa sawit dan memberikan saran dan berbagi pengalaman global yang dimilikinya akan praktik-praktik terbaik (*global best practice*) untuk hal tersebut.

Empat Pilar yang Menetapkan Keterlibatan Kembali

Tujuan keterlibatan Kelompok Bank Dunia dalam sektor minyak kelapa sawit adalah untuk berinvestasi pada potensi dari sektor tersebut guna mengurangi kemiskinan dengan cara menghasilkan perkembangan dan pendapatan, dan untuk berkontribusi dalam keamanan pangan sekaligus memastikan pengelolaan yang berkelanjutan atas sumber daya dan lingkungan hidup. Sementara strategi dan program kerja WBG di setiap negara secara khusus ditentukan oleh prioritas pembangunan pemerintah negara tuan rumah



dan minat dari sektor swasta. WBG telah mengidentifikasi empat pilar yang dapat digunakan untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya guna menguatkan perekonomian dan penyokong lingkungan hidup serta unsur sosial pada sektor tersebut.

- Lingkungan kebijakan dan peraturan:** Permasalahan mengenai akuisisi tanah, jangka waktu kepemilikan tanah, tata kelola hutan, dan hak-hak dari pekerja, masyarakat dan penduduk asli merupakan akar dari sebagian besar permasalahan lingkungan hidup dan sosial pada sektor tersebut. Ketika kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan sudah ditetapkan, maka implementasi yang lebih baik pada sistem administrasi, perencanaan penggunaan lahan, penilaian dampak lingkungan dan peraturan-peraturan, peraturan-peraturan tenaga kerja dan penyelesaian perselisihan akan dapat membantu dalam melindungi keanekaragaman hayati, mengurangi perubahan iklim, melindungi hak-hak dari pekerja dan masyarakat setempat. WBG dapat menawarkan saran dan pembangunan kapasitas dan berbagi praktik-praktik terbaik global pada kebanyakan dari daerah-daerah ini.
- Investasi sektor swasta yang berkelanjutan:** Kebanyakan dari investasi yang dilakukan pada sektor minyak kelapa sawit dilakukan oleh sektor swasta. Saat kebijakan-kebijakan pemerintah dan peraturan-peraturan memungkinkan, investor sektor swasta dapat memastikan bahwa investasi pada sektor tersebut akan menghasilkan keuntungan ekonomi dengan cara yang tetap berbasis lingkungan hidup dan sosial yang berkelanjutan. WBG dapat mendukung investasi yang berkelanjutan oleh pelaku sektor swasta dengan menggunakan pendanaan langsung maupun tidak langsung dan jasa pendamping teknis.
- Pembagian keuntungan** dengan pemilik perkebunan dan masyarakat: Kelapa sawit

dapat menjadi kontributor yang berarti terhadap perbaikan nafkah dan mengurangi kemiskinan pada kebanyakan masyarakat pedesaan; dan secara lebih lanjut dapat mempromosikan model-model lingkungan hidup dan sosial yang berkelanjutan bagi perkembangan kelapa sawit di mana memperbaiki distribusi keuntungan kepada masyarakat-masyarakat setempat dan petani-pemilik perkebunan merupakan suatu prioritas untuk banyak pemerintah. Sejak tahun 1970, industri agro skala-besar telah melihat transformasi dari pengelolaan perencanaan yang bersifat langsung menjadi metode yang lebih fleksibel di mana para petani dapat memilih cara yang paling tepat untuk turut terlibat. Pendekatan ini menawarkan kesempatan yang nyata bagi pembagian keuntungan, namun pertanyaan utama mengenai peraturan dan skala perekonomian tetap memerlukan penelitian lebih lanjut. Mengintegrasikan petani-pemilik kecil perkebunan kedalam pasar-pasar global yang berkembang dan rantai pasokan sangat penting dalam menanggulangi kemiskinan. WBG dapat membantu dengan mengidentifikasi dan meningkatkan model-model usaha inklusif, berinvestasi pada infrastruktur yang memungkinkan para pemilik perkebunan mengakses pasar-pasar, memperkuat produktivitas dari para pemilik perkebunan dan mengembangkan inovasi mekanisme keuangan untuk menyediakan akses terhadap pendanaan.

- Aturan-aturan dalam praktik berkelanjutan:** Penyusunan, penerapan, dan implementasi dari standar-standar komoditas khusus yang berkelanjutan dan kode-kode praktik, termasuk sistem sertifikasi, bilamana diiringi oleh persyaratan peraturan yang menunjang, merupakan cara yang efektif untuk mencapai perubahan sektoral secara menyeluruh pada industri tersebut. WBG dapat mendukung pengembangan dan mempercepat adopsi dari standar-standar dan praktek-praktek tersebut.



Perbaikan Pendekatan Kolaboratif terhadap Implementasi

Setiap strategi masing-masing negara pada akhirnya ditentukan oleh pemerintah negara tuan rumah. Jika suatu negara ingin memasukkan kelapa sawit dalam strategi nasional, Bank Dunia dan IFC akan berkolaborasi untuk menerapkan pendekatan direvisi untuk keterlibatan konsisten dengan empat pilar yang saling berhubungan.

Bentuk keterlibatan dalam setiap negara akan tergantung pada negara, sektor dan proyek-proyek tingkat negara serta prioritas pemerintah tuan rumah.

Seperti dalam semua operasi, kebijakan Bank perlindungan lingkungan, sosial dan hukum (lihat Lampiran VI di WB Kebijakan Perlindungan), dan proses konsultasi berlaku, atau di mana proyek IFC dalam pembangunan, Standar Kinerja IFC akan berlaku (lihat Lampiran XIII pada Standar Kinerja IFC).

Investasi akan konsisten dengan kebijakan nasional yang tepat, hukum dan mekanisme peraturan. Dan, sebagaimana mestinya, pembangunan kapasitas untuk memperkuat mekanisme peraturan dan akuntabilitas akan menjadi prioritas.

Pendekatan revisi akan sebagai berikut:

- A. **Penilaian Awal.** Ketika suatu negara ingin mengintegrasikan strategi nasional untuk kelapa sawit, intervensi akan dievaluasi bersama oleh tim dari negara-negara Bank Dunia dan IFC dengan input eksternal yang sesuai untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang disajikan oleh sektor dalam negara yang bersangkutan.
- B. **Pendekatan yang terpadu.** WBG berkomitmen untuk memperkuat koordinasi internal dan kolaborasi pada tingkat global, regional, dan negara. Berdasarkan penilaian awal, WBG akan mengidentifikasi kesempatan-kesempatan bagi keterlibatan bersama pada sektor tersebut seperti analisis sektor bersama, analisis situasi negara pada negara-negara produsen utama atau negara-negara dengan potensi untuk memperluas, dan menitikberatkan inisiatif analitis khusus pada negara-negara terpilih untuk merintis

suatu upaya yang lebih intensif. Desain ini bekerja di seluruh sektor tersebut, WBG akan mempertimbangkan tuntutan Pemerintah, potensi untuk menyediakan barang publik global dan produk dari yang sudah ada pengetahuan tentang WBG dan mitra-mitranya. Selain itu, langkah-langkah bersama selama siklus proyek untuk standar kerja WBG akan ditetapkan dan dikukuhkan kemitraantim kerjasama.

- C. **Catatan Praktik Terbaik (Best Practice Note) bagi Staf Tata Kelola.** Dalam setiap keterlibatan dengan minyak sawit, staf WBG akan dipandu oleh catatan praktik yang baik dalam pemilihan proyek dan desain yang berfokus pada manfaat bagi masyarakat pedesaan, keterlibatan dengan petani kecil, pembatasan akan pengembangan habitat alam dan sistem penelusuran untuk produsen minyak sawit dan sertifikasi (untuk investasi dalam rantai pasokan minyak sawit).
- D. **Revisi Penilaian Risiko dan Alat Penyaringan (Screening Tool) (untuk IFC).** Dalam evaluasi investasi baru di kelapa sawit, IFC akan menggunakan sebuah kerangka penilaian proyek resiko dan sektor baru yang terpola khusus berdasarkan keadaan negara tersebut dengan mempertimbangkan isu-isu yang disorot selama proses konsultasi.
- E. **Memperkuat Kolaborasi** dengan para pemangku kepentingan untuk memobilisasi investasi dalam penelitian kelapa sawit guna meningkatkan produktivitas, mempromosikan keberlanjutan dan pembagian keuntungan.
- F. **Pemantauan dan Evaluasi** agar dapat mengukur dan melaporkan prioritas-prioritas sebagaimana disebutkan di atas.

Standar-standar Perlindungan dan Kinerja

Sebagaimana di dalam semua unsur operasional, kebijakan-kebijakan lingkungan, perlindungan hukum dan sosial serta proses



konsultasi Bank Dunia berlaku¹, atau di mana proyek IFC sedang dibangun, Standar-standar Kinerja IFC² berlaku dan Panduan Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan (*Environmental, Health and Safety - EHS*) WBG yang umum dan spesifik bagi suatu sektor berlaku. Sebagai tambahan sesuai dengan Kebijakan Pengungkapannya³, IFC mengungkap Ringkasan Peninjauan Lingkungan hidup dan Sosial (*Environmental and Social Review Summary*) (ESRS) dan Rencana Tindakan Sosial dan Lingkungan Hidup (ESAP) yang masing-masing merupakan laporan uji tuntas (*due diligence*) atas risiko utama E&S serta dampak dari proyek dan langkah-langkah utama yang teridentifikasi untuk melakukan mitigasi di mana langkah-langkah tersebut konsisten dengan Standar-standar Kinerja dan Panduan EHS WBG.

Tujuan-tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk mencegah dan mengurangi bahaya kerugian yang tidak pantas terhadap masyarakat dan lingkungan hidup mereka dalam proses pembangunan. Kebijakan-kebijakan ini memberikan panduan bagi para staf bank dan peminjam dalam persiapan identifikasi, dan implementasi program-program dan proyek-proyek. Perlindungan-perlindungan atas habitat-habitat dan hutan-hutan alami dan Standar Kinerja 6 akan Konservasi Keaneka Ragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan secara khusus sangat relevan dalam

¹ Selama konsultasi seruan ditujukan kepada WBG untuk menerapkan kebiasaan Konsultasi Terbuka, Di Awal dan Terinformasi (*Free, Prior and Informed Consent*) (FPICConsent). Pendekatan WBG saat ini dijelaskan di dalam tulisan ini. IFC sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi FPICConsent sebagai bagian dari peninjauan yang terus menerus akan Standar Kinerjanya. WB akan turut meneliti hal tersebut pada proses yang terbaru untuk memulai membarui dan mengkonsolidasi kebijakan pengamanannya

² IFC sedang merevisi dan membarui Kerangka Berkelanjutannya, termasuk Standar Kinerja. Sambil menunggu persetujuan dari Dewan, revisi Standar Kinerja akan berlaku terhadap semua dan seluruh proyek-proyek IFC.

³ Kebijakan ini akan dinamakan sebagai Kebijakan Akses terhadap Informasi (*Access to Information Policy*) IFC dan, oleh karenanya, akan memiliki persyaratan pengungkapan yang lebih luas yang dapat menyertakan ESRS, ESAP dan pembaharuan tahunan terhadap kemajuan implementasi ESAP serta terhadap Sistem Pelacakan Hasil-hasil Pembangunan (*Development Outcomes Tracking System - DOTS*).

memajukan produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Pada habitat-habitat alami, Kelompok Bank Dunia mempromosikan dan mendukung konservasi habitat alami dan perbaikan atas penggunaan tanah dengan pendanaan proyek-proyek yang dirancang untuk terintegrasi dengan pembangunan nasional dan regional, konservasi habitat-habitat alami dan pemeliharaan fungsi-fungsi ekologis.

Pada hutan-hutan, kebijakan operasional atas hutan berlaku pada proyek-proyek yang (a) memiliki atau mungkin memiliki dampak-dampak terhadap kesehatan dan kualitas dari hutan-hutan, (b) memengaruhi hak-hak dan kesejahteraan masyarakat dan tingkat ketergantungan mereka atas atau interaksi mereka dengan hutan-hutan, atau (c) bertujuan untuk menyebabkan perubahan-perubahan pada pengelolaan, perlindungan, atau penggunaan hutan-hutan alami atau perkebunan-perkebunan, baik yang dimiliki secara umum, swasta atau adat.

Strategi IFC mencerminkan peranan utama dari sektor swasta

IFC memiliki peranan yang penting untuk dimainkan dalam mendukung dan menjadi katalisator dari keterlibatan sektor swasta yang berkelanjutan dan pertumbuhan perekonomian yang inklusif. Strategi IFC di dalam sektor minyak kelapa sawit didorong oleh komitmen WBG yang lebih luas untuk mendukung negara-negara klien memperbaiki kontribusi pertaniannya bagi keamanan makanan, pertumbuhan perekonomian, pendapatan masyarakat miskin, dan keberlangsungan lingkungan serta kehidupan sosial.

Karena IFC merupakan pemberi dana dan saran yang relatif kecil di dalam sektor, IFC bisa menyebabkan perbedaan yang terbaik dengan cara: (1) melakukan investasi pada daerah-daerah yang relatif kurang berkembang, seperti pada negara-negara yang lebih miskin atau daerah-daerah perbatasan, di mana proyek-proyek dapat memberikan dampak-dampak positif yang lebih besar (sebagai contoh, melalui mempekerjakan orang secara langsung atau dengan cara mendukung para petani kecil pemilik perkebunan); (2) keterlibatan secara selektif dengan mitra sektor swasta utama pada seluruh rantai pasokan industri (produsen-produsen, pedagang-pedagang, dan pengolah-



pengolah) yang dapat menunjukkan adanya praktik pengelolaan yang baik dan kehidupan sosial berkelanjutan serta keterlibatan dengan para petani kecil pemilik perkebunan; (3) bekerja sama dengan beragam inisiatif-inisiatif pemangku kepentingan untuk membangun standar-standar industri secara luas dan sukarela untuk pembangunan berkelanjutan.

Sementara intervensi akan disesuaikan dengan konteks negara, strategi tersebut memberi garis besar pendekatan IFC pada tiga daerah utama yang memproduksi kelapa sawit (Asia Timur dan Kepulauan Pasifik, Afrika (Sub-daerah Afrika Barat), dan Amerika Latin dan pendekatannya untuk terlibat dengan perusahaan-perusahaan dalam rantai nilai minyak kelapa sawit.

Asia Timur dan kepulauan Pasifik

- Mendukung pembangunan yang dipimpin oleh berbagai pemangku kepentingan akan standar-standar industri yang luas secara sukarela untuk investasi yang berkelanjutan (melengkapi keterlibatan yang mungkin ada oleh Bank Dunia dengan pemerintah-pemerintah);
- Mendukung upaya industri secara luas dan setingkat perusahaan untuk terlibat lebih lanjut dengan para petani kecil pemilik perkebunan; dan
- Secara selektif mendukung perusahaan-perusahaan di dalam rantai nilai minyak kelapa sawit yang berkomitmen dalam menerapkan praktek-praktek pengelolaan yang baik bagi lingkungan hidup dan kinerja sosial.

Afrika (Sub-daerah Afrika barat) dan Amerika Latin

- Mendukung investasi swasta yang membantu pertumbuhan perekonomian dan menguntungkan masyarakat setempat (idealnya yang dilakukan secara paralel dengan dukungan Bank Dunia atas kebijakan dan dukungan peraturan bagi pemerintah-pemerintah);
- Mendukung usaha-usaha industri secara luas dan setingkat perusahaan untuk terlibat lebih dengan dan yang mendukung para pemilik perkebunan;
- Bekerja untuk mengembangkan penafsiran nasional atas standar-standar sertifikat yang diakui secara internasional;

- Bekerja sama dengan pemerintah untuk mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor yang mungkin menghambat investasi swasta pada sektor tersebut (melengkapi kemungkinan keterlibatan Bank Dunia dengan pemerintah untuk memperkuat lingkungan hukum dan peraturannya); dan
- Mendukung investasi *South-South*.

Pendekatan Penilaian Faktor Resiko Sosial dan Lingkungan IFC

IFC telah merevisi pendekatan penilaian risiko dan prosedur kategorisasi lingkungan hidupnya agar mencerminkan rekomendasi-rekomendasi dari CAO-nya dan masukan-masukan dari proses konsultasi. Revisi selanjutnya terhadap standar-standar kinerja IFC sedang dipertimbangkan sebagai bagian dari proses pembaruan reguler yang terpisah. Bagian Strategi IFC menjelaskan pendekatan penilaian risiko yang telah direvisi dan juga bagaimana pembuatan standar-standar IFC diterapkan untuk melindungi hak-hak dari komunitas-komunitas dan penduduk asli yang terkena dampak.

Sehubungan dengan proyek-proyek yang berada pada habitat-habitat kritis, IFC menggunakan suatu analisis berbasis risiko yang menghasilkan suatu keputusan-keputusan berjalan atau tidak berjalan. Analisis ini akan mempertimbangkan tingkat kepentingan, tingkat dampak-dampak kerugian, dan kemampuan klien untuk mengurangi dan menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Portofolio investasi IFC sangat luas, dan dampak-dampak yang berhubungan dengan industri berbeda secara signifikan. Sebagai contoh, IFC sebelumnya tidak akan mendukung proyek perkebunan kelapa sawit apa pun yang akan mengubah lahan gambut dengan nilai karbon tinggi, karena nilai jasa-jasa lingkungan hidupnya (suatu komponen dalam habitat kritis). Pertimbangan serupa akan berlaku pada hutan tropis primer dengan cadangan karbon tinggi.

Melangkah Ke Depan

Pengawasan dan evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari operasional Kelompok Bank Dunia. Di mana pendekatan baru ini dapat diterapkan, kita akan terus belajar dari analisa dan pengalaman serta saling berbagi praktik terbaik di antara para pemangku kepentingan.



PENDAHULUAN

Dokumen ini menjelaskan Kerangka Kerja Bank Dunia dan Strategi IFC bagi Keterlibatan di dalam Sektor Minyak Kelapa Sawit ("Kerangka Kerja").

Kerangka Kerja meninjau signifikansi global minyak kelapa sawit, peranannya dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan, dampak-dampak lingkungan dan sosialnya serta dengan berbagai pemangku kepentingan yang aktif di dalam sektor tersebut, sebagai dasar untuk menentukan pengajuan daerah-daerah yang akan diperhatikan dan pendekatan yang direkomendasikan oleh WBG. Hal ini menandakan pentingnya pendekatan kolektif untuk meningkatkan keberlangsungan lingkungan dan sosial di dalam sektor tersebut. Yang terakhir, Kerangka Kerja juga mengusulkan keterlibatan yang selektif oleh WBG yang menanggapi kebutuhan klien-klien negaranya, mempertimbangkan keuntungan-keuntungan komparatif dan mencerminkan pendekatan terpadu yang telah direvisi bagi kegiatan-kegiatan Bank Dunia dan IFC di dalam sektor tersebut.

Kerangka Kerja mencerminkan komitmen WBG untuk mendukung klien-klien negara memperbaiki kontribusi pertaniannya untuk ketahanan pangan, meningkatkan penghasilan kaum miskin, memfasilitasi transformasi ekonomi dan menyediakan jasa-jasa lingkungan hidup⁴. Hal tersebut mengacu pada penelitian dan inisiatif-inisiatif WBG yang berhubungan dengan sektor pertanian termasuk *Laporan Pembangunan Dunia Tahun 2008: Pertanian bagi Pembangunan dan Rencana Kegiatan Pertanian 2010–2012 (Lihat Kotak I.1)* dari Bank Dunia. Kerangka Kerja konsisten dengan *Strategi Kehutanan Bank Dunia* tahun 2004 dengan elemen inti untuk *memanfaatkan potensi hutan untuk mengurangi kemiskinan* dan *Kerangka Kerja Strategis mengenai Pembangunan dan Perubahan Iklim (SFDC, Strategic Framework on Development and Climate Change)* WBG yang disetujui pada tahun 2008. SFDC memberikan panduan bagi WBG dalam (1) secara efektif mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan pada negara berkembang di saat risiko iklim

dan kesempatan-kesempatan perekonomian yang berhubungan dengan iklim timbul, dan (2) memfasilitasi kekegiatan dan interaksi di antara seluruh negara-negara. Akhirnya, Kerangka Kerja diinformasikan oleh penelitian WB dan analisis sektor termasuk publikasi tahun 2010 *Peningkatan Ketertarikan Global di dalam Lahan Pertanian: Dapatkah menghasilkan Keuntungan-keuntungan yang Berkelanjutan dan Merata?*, bersama-sama dengan evaluasi proyek yang terus menerus.

Penundaan dan Pendekatan Keterlibatan Kembali WBG

Sekalipun mengakui dampak dari produksi minyak kelapa sawit akan mengurangi kemiskinan, keprihatinan atas potensi dampak-dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial mendorong WBG untuk menyatakan suatu penundaan sementara bagi investasi baru di dalam minyak kelapa sawit.

WBG telah melakukan suatu proses konsultasi global yang ekstensif, transparan, dan inklusif untuk menginformasikan adanya kerangka kerja keterlibatan yang baru (*Lihat Lampiran II*) untuk suatu Ikhtisar dari Proses Konsultasi. Sementara para pemangku kepentingan menggarisbawahi keprihatinan mengenai tata pemerintahan yang baik, jangka waktu kepemilikan tanah, perubahan iklim, penebangan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati, keterlibatan pemilik perkebunan dan perbedaan produktivitas, kemampuan sektor untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian juga ditekankan. Selanjutnya walaupun terdapat perbedaan perspektif mengenai kondisi awal bagi keterlibatan kembali, terdapat konsensus bahwa WBG dapat dan harus memainkan peranan positif dalam mempromosikan keberkelanjutan dengan cara terlibat di dalam sektor tersebut.

Setelah adanya peninjauan ulang atas pendekatannya di dalam sektor dan dengan mempertimbangkan masukan-masukan yang berasal dari para pemangku kepentingan selama proses konsultasi, WBG telah membuat Kerangka Kerja ini di mana WBG akan secara selektif terlibat kembali ke dalam sektor. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya sektor tersebut dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan mengurangi kemiskinan, tantangan-tantangan dan juga kesempatan-kesempatan untuk

⁴ Mengimplementasikan Pertanian bagi Pembangunan: Rencana Kegiatan Pertanian WBG: 2010-2012



memastikan bahwa pembangunan di dalam sektor berlangsung dengan cara lingkungan hidup dan sosial yang berkelanjutan, dan

keselarasan dari permasalahan-permasalahan ini melalui mandat dan keahlian WBG.



THE WORLD BANK



IFC

**International
Finance Corporation**
World Bank Group

II. KONTEKS GLOBAL DARI MINYAK KELAPA SAWIT

2.1. Nilai dari Investasi Pertanian

Laporan Pembangunan Dunia tahun 2008: *Pertanian bagi Pembangunan* mencatat bahwa 75 persen dari masyarakat miskin dunia hidup di daerah pedesaan dan sebagian besar dari mereka adalah petani. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa pertumbuhan yang berasal dari pertanian tiga kali lebih efektif meningkatkan penghasilan masyarakat miskin daripada pertumbuhan yang dihasilkan oleh sektor-sektor lain. Analisa terakhir menunjukkan bahwa investasi pertanian tambahan yang dibutuhkan untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Milenium dalam mengurangi angka kemiskinan hingga separuhnya pada tahun 2015, diperkirakan akan mencapai \$14 miliar untuk setiap tahunnya bagi negara-negara berkembang⁵. Kesimpulan-kesimpulan ini telah menyebabkan bertambahnya investasi sektor swasta pada pertanian. WBG berkomitmen untuk secara signifikan meningkatkan dukungannya pada pertanian dengan memberi bantuan awal sebesar \$4,1 miliar di tahun 2008, hingga menjadi \$6,2-\$8,3 miliar setiap tahunnya dalam kurun hingga tahun 2012⁶. Namun, investasi dari sektor swasta saja kemungkinan tidak cukup. Pendekatan-pendekatan inovatif sebagai buah kemitraan antara pemerintah dan swasta (*PPP, public-private partnerships*) yang menyeluruh akan jauh lebih berperan dalam menghasilkan investasi, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan pertumbuhan.

Meningkatnya permintaan atas pangan (di 2050, akan ada 9 miliar orang yang membutuhkan pangan) dan perubahan iklim memberikan tekanan tambahan pada kehidupan pedesaan dan lingkungan hidup. Pertumbuhan produktivitas yang substansial akan diperlukan untuk memenuhi permintaan dan mengurangi risiko lebih lanjut atas degradasi lingkungan hidup. Dalam konteks ini, Rencana Kegiatan akan membimbing investasi pertanian WBG, dan para petani kecil pemilik perkebunan menjadi pusat sumber daya dari masing-masing pilar (*Lihat Kotak 1*).

⁵ Fan and Rosegrant, 2008

⁶ Implementing Agriculture for Development: The WBG Agriculture Action Plan: 2010 - 2012

2.2. Signifikansi Global dari Minyak Kelapa Sawit

Minyak kelapa sawit, yang dihasilkan dari buah tumbuhan kelapa sawit Afrika (*Elaeis guineensis*), telah menjadi komoditas utama pertanian dunia yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan banyak produk makanan dan bukan makanan. Kelapa sawit dibudidayakan seutuhnya di negara-negara berkembang beriklim tropis yang lembab, di mana tanaman ini sering kali menjadi tumpuan bagi perekonomian domestik, baik sebagai bahan ekspor, bahan baku industri, dan sebagai bahan konsumsi masyarakat setempat.

Kelapa sawit merupakan pendorong yang semakin penting bagi pertumbuhan perekonomian di Asia Tenggara, termasuk juga Papua Nugini, Afrika Tengah dan Barat, serta di sejumlah daerah tropis Amerika Latin. Saat ini minyak kelapa sawit sudah menjadi jenis minyak nabati tropis yang paling penting di industri minyak dan lemak dunia dalam hal nilai produksi dan perdagangannya. Industri tersebut telah sangat berperan dalam menghasilkan pendapatan ekspor dan mengurangi kemiskinan di negara-negara produsennya.

Awalnya, minyak kelapa sawit hanya digunakan dalam bentuk mentah untuk memasak, namun seiring perkembangannya, minyak kelapa sawit telah berevolusi menjadi komoditas internasional dengan pemanfaatannya sebagai bahan baku bagi produk-produk makanan dan penerapan terhadap produk yang bukan makanan. Akhir-akhir ini minyak kelapa sawit telah dipromosikan sebagai bahan baku bagi produksi bahan bakar nabati. Saat ini, sekitar 80 persen produksi minyak kelapa sawit dikonsumsi dalam bentuk makanan dan produk-produk yang dapat dimakan melalui perannya sebagai minyak masakan serta sebagai bahan makanan dalam produk-produk kemasan seperti margarin, es krim, kue kering, dan cokelat.

Penggunaan minyak kelapa sawit dan minyak biji kelapa sawit pada produk bukan makanan juga semakin penting, yang turut berkontribusi meningkatkan permintaan dan harga minyak kelapa sawit. Penggunaannya di dalam produk sabun, detergen dan surfaktan, kosmetik, farmasi, *nutraceutical* dan beberapa produk-produk rumah tangga dan industri telah

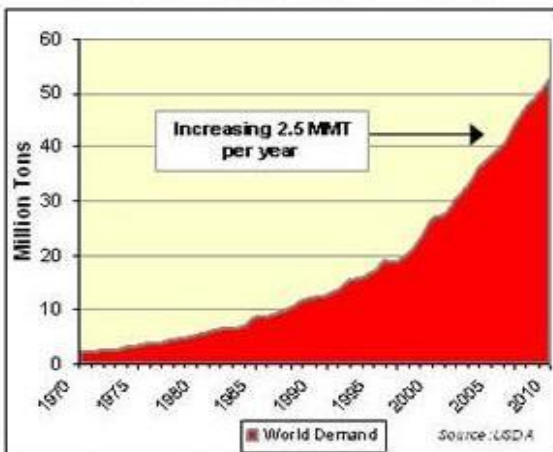


berkembang dikarenakan peralihan dari produk-produk berbasis minyak bumi, yang telah membuka jalan terhadap aplikasi non-tradisional bagi minyak kelapa sawit dan biji kelapa sawit. Keinginan global untuk mengganti setidaknya sebagian dari penggunaan bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang dapat diperbarui juga telah meningkatkan permintaan. Merek-merek dunia seperti Flora, Dove, dan Persil mengandung bahan-bahan yang berasal dari minyak kelapa sawit.

2.3. Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Nabati Lainnya

Di tahun 2009, total produksi minyak nabati dunia mencapai sekitar 133 juta ton dan 34% dari jumlah tersebut merupakan kontribusi dari minyak kelapa sawit, yaitu sekitar 45 juta ton (34 persen dari total diseluruh dunia). Tidak hanya itu, minyak biji kelapa sawit sebagai produk sampingan juga turut berkontribusi sebesar 4% yaitu lebih dari 5 juta ton untuk pemenuhan kebutuhan industri dan makanan. Sebagai perbandingan, produksi minyak kacang kedelai dan minyak biji anggur masing-masing seluruhnya berjumlah sekitar 36 dan 22 juta ton. Pertumbuhan sektor minyak kelapa sawit pada tiga dekade terakhir ini sangat fenomenal, dengan peningkatan luas lahan yang ditanami tanaman tersebut dari 1,55 juta hektar di tahun 1980 menjadi sekitar 12,2 juta hektar di tahun 2009, peningkatan yang hampir delapan kali lipat. Selama periode tersebut, produksi meningkat 10 kali lipat dari 4,5 juta ton di tahun 1980 menjadi sekitar 45 juta ton di tahun 2009 (Gambar 1).

Gambar 1: Permintaan Global Minyak Kelapa Sawit 1970-2010



* Includes palm oil & palm kernel oil

Kotak 1: Di dalam Mengimplementasikan Pertanian bagi Pembangunan: Rencana Kegiatan Pertanian Kelompok World Bank bagi Tahun Fiskal 2010-2012

Rencana Kegiatan Pertanian Kelompok World Bank bagi Tahun Fiskal 2010-2012 ("Rencana Kegiatan Pertanian") merupakan ringkasan dari proposal program kerja Kelompok World Bank bagi sektor tersebut. Rencana Kegiatan Pertanian merupakan tindak lanjut dari kelompok World Bank kepada konsensus luas yang diwakili oleh Laporan Pertumbuhan Dunia tahun 2008 (WDR 2008), *Pertanian bagi Pembangunan*.

Penyusunan konsep dari WDR 2008 mengikutsertakan kolaborasi eksternal beragam dari pemangku kepentingan yang luas, dan juga konsultasi yang ekstensif dengan para pemangku kepentingan baik di negara maju maupun negara berkembang. Ini merupakan WDR yang pertama mengenai pertanian sejak 1982 dan menjadi peninjauan strategis yang dipuji secara luas mengenai apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah-pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan kebijakan lingkungan hidup dan investasi barang publik yang dibutuhkan untuk memastikan pihak swasta-- termasuk para petani kecil pemilik perkebunan--memenuhi pasokan.

Rencana Kegiatan Pertanian diatur untuk fokus pada lima bidang:

- Meningkatkan produktivitas pertanian – termasuk dukungan untuk meningkatkan penerapan teknologi baru (contoh. variasi bibit, jenis-jenis ternak), memperbaiki pengelolaan pengairan pertanian, keamanan kepemilikan tanah dan pemasaran jual beli pertanahan dan memperkuat sistem inovasi pertanian.
- Menghubungkan para petani ke pasar dan memperkuat nilai tambahan – termasuk investasi pada infrastruktur transportasi, memperkuat organisasi-organisasi produsen, memperbaiki informasi pasar dan akses ke pendanaan.
- Mengurangi risiko dan kerentanan – dukungan terus menerus bagi jaringan keselamatan, agar dapat mengelola impor makanan nasional dengan lebih baik, perlindungan terhadap kerugian akibat dari bencana, dan mengurangi risiko wabah penyakit pada hewan ternak utama.
- Memfasilitasi pemasukan dan pengeluaran pertanian dan penghasilan pedesaan non-pertanian – termasuk memperbaiki iklim investasi pedesaan dan memperbaiki keterampilan.
- Meningkatkan pelayanan lingkungan dan berkelanjutan – termasuk pengelolaan yang lebih baik atas intensifikasi ternak, pengelolaan lahan penggembalaan, daerah aliran sungai, pengelolaan kehutanan dan perikanan, serta dukungan untuk menghubungkan kebiasaan pertanian yang telah diperbaiki dengan pasar karbon (contoh., melalui penyitaan tanah berkarbon).



Di antara jenis sayur-sayuran utama, minyak kelapa sawit adalah yang paling banyak diperdagangkan secara global; volume ekspor minyak kelapa sawit meningkat hampir 10 kali lipat, dari 3,8 juta ton di tahun 1980 menjadi 36,2 juta ton di tahun 2009. Indonesia dan Malaysia merupakan pengeksport minyak kelapa sawit terbesar di dunia, mencapai hampir 90 persen pada tahun 2009. Hampir tiga perempat dari 45 juta ton produksi global diperdagangkan. Pengimpor minyak kelapa sawit terbesar di dunia adalah India, Cina, dan EU-27. Secara berurutan, masing-masing berkontribusi sebesar 18,8 persen (6,8 juta ton), 18,2 persen (6,6 juta ton), dan 16 persen (5,8 juta ton) dari impor global⁷. Ketergantungan terhadap impor minyak nabati di antara konsumen utama terus bertambah dan suatu tren linear dalam impor minyak kelapa sawit dapat terlihat pada EU-27, India, Cina, dan juga Rusia serta Ukraina pada 10 tahun terakhir.⁸

Lampiran III menunjukkan data produksi dan perdagangan minyak nabati utama di berbagai negara. Pertumbuhan produksi, konsumsi, dan penguasaan pasar atas minyak kelapa sawit sebagian besar dikarenakan biaya persaingan antara harga minyak kelapa sawit dengan harga minyak nabati dan lemak hewani lainnya. Minyak kelapa sawit, yang lebih murah dari minyak kedelai, secara efektif telah mendapatkan pasar-pasar baru dan membangun jalan masuk ke dalam pasar-pasar yang secara tradisional telah didominasi oleh minyak-minyak lainnya. Minyak kelapa sawit juga sangat serbaguna, dengan berbagai aplikasi pengolahan dan tahan lama. Kekhawatiran mengenai bahaya kesehatan terkait asam lemak trans (*trans-fatty acid*-TFA) dan organisme yang telah termodifikasi secara genetik (*genetically modified organisms*-GMO) juga telah menyebabkan permintaan meningkat. Minyak kelapa sawit yang hanya memerlukan sedikit atau hampir tidak memerlukan proses hidrogenasi bagi produksi margarin, mentega roti, dan lemak-lemak *confectionery*, merupakan pengganti yang lebih dapat diterima di antara jenis minyak nabati lain yang memerlukan proses

hidrogenasi untuk menyediakan produk-produk ini.

Alasan utama lainnya bagi dominasi minyak kelapa sawit pada pasar minyak nabati adalah kelebihan sifat produktivitasnya dibandingkan dengan minyak biji-bijian. Kelapa sawit rata-rata menghasilkan empat ton minyak per hektar, dibandingkan dengan biji-bijian pesaing lainnya (biji penghasil minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan minyak lobak) yang menghasilkan kurang dari 0,8 ton minyak per hektar⁹ (Tabel 1).

Tabel 1: Kandungan Potensial Minyak Kelapa Sawit dibandingkan Minyak Lainnya

Minyak	Ton per hektar
Kedelai	0.37
Bunga Matahari	0.5
Lobak	0.75
Kelapa Sawit	4.09

Sumber: Minyak Dunia 2010

Terkait penggunaan lahan di mana dibutuhkan sekitar 229 juta hektar untuk usaha perkebunan minyak, minyak kelapa sawit membutuhkan sekitar 12,2 juta hektar (atau 5,3%) untuk produksinya di tahun 2009, sementara minyak kedelai membutuhkan 98,0 juta hektar (42,7% dari total lahan). Keuntungan lain dari minyak kelapa sawit dibanding minyak dari biji-bijian adalah penggunaan energi yang efisien melalui penggunaan bio-massanya sendiri sebagai bahan bakar untuk pembuatan tenaga dan uap dalam pabrik pengolahan, serta pemakaian pupuk dan pestisida yang paling rendah.¹⁰

2.4. Pengamatan Permintaan

Permintaan yang tinggi terhadap minyak nabati telah tercermin dari naiknya harga-harga minyak kelapa sawit di tahun 2000. Minyak kelapa sawit telah menjadi minyak makanan pokok di Malaysia dan Indonesia, dalam hal ini seperti halnya yang telah berlaku

⁷ Oil World, 2010. www.oilworld.de

⁸ Basiron, Y. 2010. "Pandangan Sekilas tahun 2011: Petunjuk bagi Perdagangan Global Minyak & Lemak 2011." Tulisan dipresentasikan pada Pekan Raya Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Internasional Ketiga & Seminar, Kuala Lumpur.

⁹ Dunia Minyak, 2010, "Dunia Minyak Tahunan 2010", Hamburg, Germany.

¹⁰ Teoh, C. H. 2004. "Menjual Keuntungan Minyak kelapa Sawit Hijau?" *Jurnal Ekonomi Industri Minyak Kelapa Sawit* 4: 1.



di sebagian besar wilayah di Afrika Barat. Saat ini harga minyak kelapa sawit mentah berada pada posisi di atas \$1.200 per ton (CIF Rotterdam), masih 183 persen di atas tren harga jangka panjang¹¹

Permintaan dunia terhadap minyak nabati diharapkan bertambah 36 persen dari tahun 2007 sampai dengan 2017, dengan bahan bakar hayati mencapai satu pertiga dari kenaikan tersebut.¹² Permintaan terhadap minyak kelapa sawit sebagai bahan makanan diperkirakan akan terus meningkat dikarenakan pertumbuhan populasi, naiknya konsumsi per kapita, dan kecenderungan dunia berkembang yang menjauhi lemak jenuh hewani.

Sementara konsumsi minyak dan lemak per kapita selama tahun 2008-2009 pada EU-27 dan Amerika Serikat masing-masing sejumlah 59,3 kg dan 51,7 kg, konsumsi pada negara berkembang seperti India, Pakistan, dan Nigeria masing-masing sejumlah 13,4 kg, 19,9 kg, dan 12,5 kg. Dengan kecenderungan dunia berkembang yang berusaha mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik, lonjakan lebih lanjut dari produksi minyak nabati akan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan di masa mendatang.¹³

Dengan asumsi pertambahan jumlah populasi sebesar 11,6 persen (berdasarkan proyeksi jumlah populasi Bank Dunia, populasi mencapai 7,58 milyar di tahun 2020) dan kenaikan konsumsi 5 persen per kapita, tentunya harus dilakukan penambahan produksi minyak nabati sebanyak 27,7 juta ton setiap tahunnya hingga tahun 2020. Dikarenakan produktivitasnya yang superior, kelapa sawit sangat ideal untuk memenuhi permintaan ini, terlebih dengan pertimbangan kebutuhan kelapa sawit terhadap lahan baru yang terendah. Tambahan 6,3 juta hektar akan diperlukan untuk penanaman kelapa sawit, dengan asumsi 10 persen peningkatan produktivitas per hektarnya. Bilamana permintaan atas peningkatan ini dipenuhi oleh minyak kedelai maka dibutuhkan tambahan 42 juta hektar lahan untuk diolah.

¹¹ LMC, Desember 2010

¹² FAO/OECD *Agricultural Outlook 2008-2017*.

¹³ Bek-Nielsen, C. 2010. "Suatu Perspektif terhadap minyak kelapa Sawit dan Berkelanjutannya." Tulisan di presentasikan pada Konferensi Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Lauric POC2010, Kuala Lumpur.

Di dalam sektor bahan bakar hayati, negara-negara telah menetapkan target-target penyampuran biodiesel nasional yang berbeda-beda dari 1 persen di Filipina sampai 10 persen di EU sampai dengan 2020. Bilamana mandat-mandat yang direncanakan tersebut terjadi, maka diperkirakan tambahan 4 juta hektar lahan kelapa sawit akan diperlukan untuk ditanam demi memenuhi kebutuhan EU, dan 1 juta hektar lagi untuk memenuhi permintaan Cina¹⁴.

2.5. Pengamatan Pasokan

Indonesia dan Malaysia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 38,5 juta ton atau hampir 90 persen dari produksi dunia. Produsen lain yang lebih kecil dan signifikan adalah Nigeria, Kolombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Cote d'Ivoire, Ghana, Cameroon, Papua Nugini, dan Thailand.

Indonesia diharapkan dapat terus menjadi produsen pemimpin dengan ekspansi lanjutan dari sektor tersebut. Pemerintah telah mengumumkan tujuannya bahwa Indonesia akan memproduksi 40 juta ton minyak kelapa sawit di tahun 2020, masing-masing 50 persen untuk makanan dan energi. Sementara itu, Indonesia juga diharapkan bisa menjadi "produsen terbaik minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di dunia".

Agar dapat mencapai tujuan ini, produksi nasional harus dilipatgandakan dalam waktu 10 tahun mendatang dengan 300.000 hektar lahan baru yang diperlukan setiap tahunnya¹⁵. Ekspansi produksi kelapa sawit Malaysia diperkirakan akan menurun melihat keterbatasan lahan yang ada. Namun, pemerintah Negara Sarawak itu telah mengumumkan akan membuka lahan luas yang akan diperuntukkan bagi pengolahan kelapa sawit. Hal ini akan menambah area

¹⁴ Sheil, D., Casson, A., Meijard, E., van Nordwijk, M. Gaskell, J., Sunderland - Groves, J., Wertz, K., and Kanninen, M. 2009. "Dampak dan Kesempatan dari Kelapa Sawit di Asia Tenggara : Apa yang Kita Ketahui dan Apa yang perlu Kita Ketahui?" Tulisan Lepas 51. Cifor, Bogor, Indonesia

¹⁵ Greenpeace. 2009. *Pengerusakan Hutan, Perubahan Iklim dan Perluasan Minyak Kelapa Sawit di Indonesia*. Amsterdam: Greenpeace International.



lahan nasional kelapa sawit Malaysia dari 4,67 juta hektar menjadi 5,4 juta hektar¹⁶.

Area-area penanaman kelapa sawit negara-negara tropis di Afrika dan Amerika Latin juga diharapkan dapat meluas agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan global. Mengingat konsumsi rata-rata per kapita Afrika atas minyak dan lemak yang hanya sekitar 11 kg, dibandingkan dengan konsumsi rata-rata per kapita dunia sekitar 24 kg, dan dikarenakan ketidaksesuaian produksi dan konsumsi yang luas antara minyak kelapa sawit dan minyak nabati, Afrika memberikan kesempatan yang signifikan bagi ekspansi di masa mendatang bagi produksi minyak kelapa sawit, baik untuk pasokan regional maupun pasokan dari negara Uni Eropa.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak makanan, beberapa negara Afrika dan Amerika Latin menarik perusahaan-perusahaan Asia dan Eropa untuk berinvestasi pada sektor tersebut. Upaya itu juga termasuk penarikan perusahaan-perusahaan yang ada di Liberia, Cameroon, Ghana, Negara Republik Demokratis Kongo, Ivory Coast, dan Brazil.

Dalam waktu dekat, ekspansi industri kemungkinan akan terus berpusat pada Asia Tenggara, dengan pertimbangan di mana pemerintahnya mendukung sektor minyak kelapa sawit, terdapat rantai suplai yang telah berjalan dengan baik di dalam pasar internal dan eksternal, serta terdapat beberapa daerah-daerah penanaman baru yang akan masuk ke dalam proses produksi dalam beberapa tahun mendatang. Di Asia Tenggara, dengan adanya peningkatan fokus pada pembangunan yang berkelanjutan serta adanya sistem sertifikasi Meja Bundar mengenai Minyak Kelapa Sawit yang Berkelanjutan (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*-RSPO) yang makin meningkat daya tariknya, diharapkan bahwa penanaman akan perlahan-lahan beralih dari daerah-daerah hutan dengan nilai konservasinya yang tinggi (*High Conservation Value*-HCV) ke lahan pertanian yang ada atau daerah-daerah yang ditetapkan sebagai lahan yang terdegradasi.

¹⁶ Wong, J. (2010). "Sarawak: Suatu *Hotspot* bagi Penanam Kelapa Sawit." *StarBiz* 8 (Maret2010), B1.

Pemangku kepentingan yang khawatir akan keadaan global mencari insentif-insentif yang dapat mendorong peralihan yang kritis/penting ini.

2.6. Pendapatan Ekspor

Sektor minyak kelapa sawit juga telah menjadi kontributor utama pendapatan ekspor bagi negara-negara produsen. Di Malaysia nilai ekspor minyak kelapa sawit dan derivatnya meningkat dari RM 2,98 miliar (US\$903 juta), menjadi RM 45,61 miliar (US\$13,8 miliar) pada tahun 2007. Selama krisis keuangan Asia di tahun 1997-1998, minyak kelapa sawit merupakan penghasil devisa teratas, melampaui penghasilan yang didapatkan dari minyak bumi serta produk-produk minyak bumi dan kehutanan dalam margin yang luas. Sektor minyak kelapa sawit juga merupakan penghasilan ekspor utama di Indonesia, memberikan kontribusi US\$7,9 miliar pada tahun 2007¹⁷. Indonesia dan Malaysia melaporkan penjualan gabungan sebesar \$27 miliar pada tahun 2007.

2.7. Menciptakan Pekerjaan dan Penghasilan

Dikarenakan rendahnya tingkat mekanisasi, perkebunan kelapa sawit besar memerlukan tenaga kerja yang ekstensif dan menghasilkan sampai 30 kali lebih banyak pekerjaan per hektar dibanding sektor pertanian skala besar lainnya seperti kedelai. 80 persen dari perkebunan kelapa sawit di Afrika dan 40 persen di Asia Tenggara, di mana para pemilik perkebunan terlibat, mampu menciptakan penghasilan yang lebih tinggi dibanding penghasilan yang didapat dari tanaman pesaing lainnya (Lihat Kotak 2 mengenai Contoh Nigeria). Walaupun penghasilan yang didapatkan oleh para pemilik perkebunan sangat berbeda-beda dan dipengaruhi oleh akses terhadap pasar, harga internasional, dan bentuk keterlibatan pemilik perkebunan, banyak dari pemilik perkebunan Indonesia dan Papua Nugini melaporkan bahwa penghasilan mereka dari pengolahan kelapa sawit secara signifikan lebih tinggi dibanding penghasilan mereka dari bercocok tanam secara terus menerus atau dari tanaman perdagangan saingan lainnya termasuk cokelat atau kopi¹⁸.

¹⁷ World Bank, 2009

¹⁸ World Bank Inspection Panel Report No 53280-PG 10 March 2010. Report and Recommendation. Papua New Guinea: Smallholder Agriculture Development Project (SADP) (IDA Credit No. 43740-PNG).p. 8. and Annex II. Management Response to Request for Inspection Panel



Sebagai tambahan, di Afrika dilakukan penanaman kelapa sawit dengan sistem tumpangsari di mana ditanam juga jenis tanaman lain dan secara efektif dapat digunakan untuk memperluas sumber-sumber penghasilan. Saat ini para pemilik perkebunan memasuki industri dalam jumlah yang terus bertambah.

Di Malaysia jumlah orang yang dipekerjakan di sektor minyak kelapa sawit tumbuh dari 92.352 pada tahun 1980 menjadi sekitar 570.000 pada tahun 2009¹⁹. Diperkirakan bahwa 290.000 lagi dipekerjakan pada bagian operasional hilir. Di Malaysia sektor tersebut juga memberikan lapangan kerja bagi pekerja imigran dari Indonesia, Thailand, dan Bangladesh yang memberikan sumbangan devisa yang substansial bagi negara asalnya. Perkiraan dari jumlah yang dipekerjakan di dalam sektor minyak kelapa sawit di Indonesia cukup berbeda namun diperkirakan 2-3 juta orang terlibat di dalam industri tersebut.

Baik di Indonesia maupun di Malaysia pembangunan pertanian berbasis kelapa sawit telah menjadi pendorong utama diversifikasi pembangunan dan pertanian. Sebelum tahun 1960, Indonesia dan Malaysia merupakan produsen karet terbesar dunia. Namun, setelah merosotnya harga karet dan selanjutnya pendapatan negara, Malaysia memulai suatu program konversi dan diversifikasi yang mendorong pembangunan skala besar pada sektor minyak kelapa sawit. Keputusan untuk melakukan deversifikasi menyebabkan pendirian sebuah Federasi Kewenangan Pembangunan Tanah (*Federal Land Development Authority-Felda*) pada bulan Juli 1956 dengan dua tujuan yaitu menempatkan kembali masyarakat miskin dan tak bertanah serta melakukan diversifikasi beralih dari karet. Skema Felda yang pertama yang mengikutsertakan kelapa sawit dimulai pada tahun 1961. Saat ini petani-pemilik perkebunan yang dahulu dibantu Felda merupakan produsen-produsen terbesar minyak kelapa sawit Malaysia, dengan 720.000 hektar lahan kelapa sawit yang telah berdiri dan menempatkan kembali 112.635 keluarga-keluarga yang tidak memiliki tanah²⁰.

Dalam kasus Brazil, potensi minyak kelapa sawit yang mampu menguntungkan petani-

petani miskin telah diketahui dengan baik sejak tahun 2002, sejak perusahaan Agropalma dan pemerintah negara Pará memperkenalkan program baru bagi para petani miskin pedesaan, yang kebanyakan dari mereka adalah wanita. Antara 2002 dan 2005, pemerintah negara memberikan 150 10 hektar paket lahan yang terletak berdekatan dengan lokasi di mana Agropalma menghasilkan langsung minyak kelapa sawitnya. Tantangan awal yang dihadapi oleh para peserta adalah harus menunggu selama tiga tahun sebelum panen dapat dimulai, namun masukan dan peralatan diatasi dengan pinjaman dari sebuah bank pembangunan regional yang dikelola oleh negara yakni Banco da Amôzonia. Kurang lebih 90 persen dari petani yang ikut serta di dalam program telah berhasil dan mencapai kandungan yang lebih tinggi dibanding perkebunan-perkebunan di mana Agropalma memproduksi secara langsung minyak kelapa sawitnya. Setelah 25 tahun kepemilikan, paket lahan akan kembali kepada petani-petani yang dapat menentukan apakah dapat terus mengolah kelapa sawit atau tidak.

2.8. Mengurangi Kemiskinan

Perluasan kegiatan kelapa sawit di Indonesia akhir-akhir ini dinilai secara signifikan berhubungan dengan pengurangan kemiskinan. Sebagai contoh, pada tahun 2005 dan 2008 dilaporkan bahwa perhitungan kasar nasional terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia sama dengan 15,7 dan 15,4 persen, sementara kabupaten-kabupaten dengan peningkatan produksi minyak kelapa sawit menunjukkan adanya penurunan kemiskinan yang signifikan pada jangka waktu yang sama (Perkiraan Staf Bank Dunia). Penurunan yang terjadi pada tingkat kabupaten, mengatur tingkat awal dari kegiatan minyak kelapa sawit (juga bersifat prediktif dari pengurangan kemiskinan) menunjukkan bahwa kenaikan 1 persen pada hektar lahan di dalam produksi kelapa sawit memiliki andil dalam mengurangi kemiskinan antara 0,15 sampai 0,25 persen. Dengan peningkatan 50 persen atau lebih di dalam produksi kelapa sawit pada begitu banyak kabupaten berdampak besar pada kemiskinan.

Review of the Papua New Guinea Smallholder Development Project (IDA 43740-PNG). pp. VI-VII

¹⁹ Rising Global Interest in Farmland: Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits? Conference Edition.

p.20

²⁰ Ahmad Tarmizi, 2009



Kotak 2: Minyak Kelapa Sawit dan Meningkatkan Produktivitas Pemilik perkebunan: Nigeria

Lebih dari 80 persen minyak kelapa sawit Nigeria diproduksi oleh pemilik perkebunan dan generasi baru teknologi yang diproduksi secara lokal meningkatkan keuntungan, peningkatan pendapatan dari tenaga kerja, dan menurunkan biaya pengolahan – suatu perkembangan yang sangat signifikan bagi wanita pedesaan yang diseluruh Afrika Barat secara prinsip bertanggung jawab atas pengolahan dan penjualan hasil pertanian (FAO 2002; Olagunju dan Akintola 2008). Perkembangan teknologi-teknologi ini telah didorong oleh pemilik perkebunan setempat yang menuntut mesin-mesin yang lebih canggih, efisien, dan terpercaya. Menggantikan kebiasaan tradisional yang secara manual menumbuk buah kelapa sawit telah menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mengatasi rendahnya pendapatan dari tenaga kerja yang memberikan disinsentif bagi orang-orang yang terlibat di dalam pengolahan. Hal ini menunjukkan jenis "revolusi produktivitas pada pertanian pemilik perkebunan" yang di dalam Laporan Pembangunan Dunia tahun 2008 disarankan bagi pertanian agar dapat menjalankan peranan kuncinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta keragu-raguan pangan pada negara-negara berbasis pertanian.

Analisis²¹ juga memastikan bahwa dampak-dampak pengurangan kemiskinan dari kegiatan pemilik perkebunan lebih besar dari dampak-dampak meningkatnya kegiatan-kegiatan swasta atau Perusahaan Milik Negara.

²¹ Akan terbit pada World Bank. Analisis ini walaupun kuat atas kemiskinan yang diukur pada garis kemiskinan yang ada saat ini, namun tidak berdasarkan spekulasi penuh dari saluran-saluran signifikan yang mana kegiatan kelapa sawit mempengaruhi rumah tangga rumah tangga miskin. Sebagai contoh analisis tidak memberikan bukti atas kontribusi tata kelola yang lebih baik, iklim investasi yang lebih sehat atau prosedur kepemilikan tanah yang lebih baik akan turut serta memperbaiki kinerja kemiskinan dan meningkatkan kegiatan perekonomian. Dan dengan penurunan apapun bilamana terjadi dihilangkannya variable dampak kemiskinan yang penting dampak-dampak dapat dibesar-besarkan. Disisi lain, perkiraan-perkiraan ini hanya mengijinkan kabupaten-kabupaten yang terdapat kegiatan kelapa sawit untuk memiliki dampak atas kemiskinan oleh karena itu mkengecualikan dampak-dampak pada kemiskinan didaerah perkotaan atau pedesaan yang dekat dengan pusat produksi kelapa sawit dan dengan demikian mengurangi dampak-dampak kemiskinan. Akhirnya, pengurangan kemiskinan atau peningkatan penghasilan merupakan satu dari banyak permasalahan dalam biaya dan keuntungan dari kegiatan kelapa sawit.

Selanjutnya dampak-dampak pengurangan kemiskinan dari produksi kelapa sawit oleh para pemilik perkebunan lebih besar bagi kabupaten-kabupaten di mana rumah tangga miskin berpusat pada pertanian.

Minyak kelapa sawit merupakan yang termurah di antara minyak nabati utama. Menurut sejarah, minyak kelapa sawit telah di perdagangkan dengan harga diskon dibandingkan dengan minyak kedelai dan minyak lainnya seperti lobak, bunga matahari, dan lain-lain. Karena biayanya yang rendah dan ketersediaannya yang relatif banyak dibandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya, minyak kelapa sawit lebih banyak dipergunakan oleh rumah tangga yang kurang mampu, khususnya pada negara berkembang, dan bagi produksi produk makanan dengan biaya rendah seperti mie instan dan barang-barang toko roti.

2.9. Keamanan Pangan

Secara keseluruhan, dengan diperkirakan populasi akan meningkat sampai dengan 9 miliar di tahun 2050, produksi makanan akan perlu meningkat sampai dengan 70 persen pada tahun 2050 agar dapat memberi makanan pada seluruh penduduk di dunia. Permintaan akan minyak goreng merupakan "pendapatan elastis" dan oleh karenanya diperkirakan akan meningkat lebih cepat dibanding permintaan terhadap sereal dan sugu-suguan. Minyak kelapa sawit sebagai salah satu minyak yang paling produktif dan efektif, akan terus menjadi pemeran utama dalam memenuhi permintaan yang bertambah. Hasil minyak per hektar dari kelapa sawit setidaknya lima kali lebih tinggi dibanding biji minyak utama lainnya. Oleh karena sistem perakarannya yang dalam dan luas, kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik meski pada tanah yang berkontur tidak rata dan mudah bererosi, yang umumnya kurang cocok untuk ditanami tanaman tahunan seperti tanaman biji-bijian; oleh karena itu, persaingan langsung dengan tanaman-tanaman ini tidaklah banyak. Uang yang berasal dari penjualan kelapa sawit dapat memberikan pemilik perkebunan penghasilan yang mereka butuhkan untuk diversifikasi ekonomi dan peningkatan standar kehidupan, suatu elemen utama dalam strategi keamanan pangan yang lebih luas.

Kelapa sawit belum dimanfaatkan secara luas sebagai bahan bakar nabati; walaupun kelapa sawit memiliki potensi sebagai pilihan yang hemat biaya dibandingkan dengan bahan baku lainnya, biaya produksi tidak dapat bersaing



dengan bahan bakar fosil dan terdapat permintaan yang tinggi akan minyak kelapa sawit sebagai minyak goreng. Permintaan di masa mendatang akan tergantung pada kebijakan prioritas baik dari negara-negara produsen utama bahan bakar nabati maupun dari negara-negara pengimpor yang mungkin berkeinginan untuk mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar nabati. Karena produksi yang rendah biaya, kelapa sawit (seperti pohon tebu) merupakan bahan baku yang lebih menarik bagi bahan bakar nabati. Negara-negara produsen utama minyak kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia mungkin akan memilih (seperti Brazil terkait pohon tebu) untuk mendukung penggunaan bahan bakar nabati sebagai bagian dari strategi pengembangan karbon rendah. Suatu pemusatan terhadap peningkatan produktivitas dan kandungan di satu sisi, membatasi area lahan perluasan kepada lahan dengan tanah degradasi dan di sisi lain, bersama dengan rezim pemberi harga yang menghindari keadaan yang mendistorsi pasar, adalah kunci dalam meminimalisasi potensi penukaran antara produksi bahan bakar nabati atau minyak goreng.

2.10. Pengalaman Bank Dunia dan IFC

Sebagaimana dikatakan sebelumnya di Malaysia, Bank Dunia mendukung sektor minyak kelapa sawit yang memainkan peranan kunci dalam pemberantasan kemiskinan melalui badan-badan pertanahan dan pembangunan. Secara global, proyek-proyek yang didanai oleh IFC memiliki dampak yang signifikan terhadap mata pencarian masyarakat setempat, dan diperkirakan satu pekerjaan terbentuk bagi setiap 5 hektar dari perkebunan-perkebunan yang dikembangkan. Porofolio evaluasi Bank Dunia menyarankan bahwa dampak dari mengurangi kemiskinan ditentukan sekurang-kurangnya pada tingkat di mana proyek-proyek tersebut menangani permasalahan-permasalahan jangka waktu kepemilikan tanah, terutama sejauh mana integrasi infrastruktur ke dalam proyek-proyek dan kepentingan dari manajemen kapasitas secara khusus di dalam perkebunan sektor publik (Lihat Lampiran IV bagi penjelasan terhadap pengalaman WBG).



III. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL: KEPRIHATINAN DAN KEMUNGKINAN PENYELESAIANNYA

A. LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Keprihatinan Lingkungan Hidup

Walaupun kelapa sawit telah memberi dampak positif bagi masyarakat kurang mampu atas lapangan pekerjaan dan penghasilan, namun di beberapa negara, industri ini sudah lama dikritik sebagai kontributor utama deforestasi dan penyebab emisi gas rumah kaca. Hal ini sepertinya menandakan adanya penukaran yang tidak terpisahkan dari perkembangan kelapa sawit dengan lingkungan hidup namun hal tersebut belum tentu demikian. Dampak menyeluruh dari industri kelapa sawit terhadap lingkungan hidup dan sosial tergantung dari di mana dan bagaimana industri tersebut dikembangkan. Persoalan timbul di saat insentif perkembangan ekonomi yang sangat kuat dipaksakan pada kerangka kerja pemerintahan yang memiliki kapasitas lemah. Kapasitas lemah ini terutama dalam membimbing pembangunan perkebunan kelapa sawit baru pada daerah-daerah di mana dampak-dampak lingkungan hidup dan sosial seharusnya juga diperkecil.

Hilangnya hutan dapat menyebabkan terjadinya degradasi terhadap daerah aliran sungai, kekeringan, dan meningkatnya risiko kebakaran, erosi dan degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, berkurangnya sumber daya dan emisi-emisi gas rumah kaca²². Perkebunan kelapa sawit memiliki keanekaragaman hayati yang lebih sedikit dibandingkan dengan hutan alam, dan umumnya tidak memberikan tingkat layanan lingkungan hidup yang sama, seperti penyimpanan zat karbon, produk kehutanan (kayu dan non-kayu), dan keuntungan tanah. Sekitar 70 persen atau 4,2 juta hektar dari perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Indonesia berada pada lahan yang sebelumnya merupakan lahan hutan. Lebih dari 56 persen perluasan kelapa sawit antara tahun 1990 dan 2005 terjadi dengan mengorbankan tutupan hutan alami²³. Demikian halnya dengan perluasan lahan kelapa sawit yang terjadi di Malaysia pada kurun waktu yang sama, di mana perluasan itu telah mengorbankan lahan hutan. Meski untuk membangun perkebunan-perkebunan banyak pohon banyak yang

ditebang, namun di beberapa daerah, pembersihan lahan hutan dilakukan secara khusus.

Dengan adanya permintaan global yang terus menerus, perluasan pengolahan kelapa sawit kemungkinan menjulur ke daerah-daerah lain seperti Afrika dan Amerika Latin. Penilaian Sumber Daya Hutan Global tahun 2010 menunjukkan bahwa tingkat deforestasi di Amerika Selatan dan Afrika yang terus tinggi²⁴. Bertambahnya minat terhadap produksi di daerah-daerah ini dapat menyebabkan ancaman lebih lanjut terhadap sumber daya hutan namun ada juga contoh yang menunjukkan tindakan-tindakan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat mengurangi tekanan-tekanan tersebut. Hal ini termasuk perencanaan penggunaan lahan yang lebih baik, peraturan-peraturan dan insentif-insentif (seperti REDD+) bagi penggunaan lahan yang tanahnya telah terdegradasi bagi perkebunan baru dan memusatkan pada peningkatan produktivitas perkebunan-perkebunan yang telah ada (khususnya perkebunan-perkebunan pemilik perkebunan).

3.1.1. Keanekaragaman Hayati

Beberapa negara produsen minyak kelapa sawit juga merupakan pusat utama keanekaragaman hayati. Sudah sangat diketahui bahwa keanekaragaman hayati pada perkebunan-perkebunan kelapa sawit jauh lebih rendah dibanding hutan alami, yang pada dasarnya disebabkan oleh berkurangnya kompleksitas struktural dari perkebunan-perkebunan tersebut. Habitat yang menurun ini memberikan ruang yang lebih kecil bagi flora dan fauna. Perhatian besar telah dipusatkan kepada spesies terancam punah seperti Macan Sumatera, gajah Asia, dan orangutan. Binatang-binatang ini serta spesies lainnya sangat rentan terhadap pembersihan lahan hutan, dikarenakan lahan sisa yang ada menyebabkan bertambahnya perburuan, penebangan liar, dan membuka daerah-daerah bagi pemukiman manusia. Bertambahnya fragmentasi lahan menyebabkan timbulnya lebih banyak konflik antara manusia dan spesies-spesies ini.

²² World Bank, 2007

²³ Koh and Wilcove, 2008

²⁴ FAO. 2010. "Penilaian Sumber Daya Hutan Global (*Global Forests Resources Assessment*) tahun 2010: Temuan Kunci." www.fao.org/forestry/gfra2010.



Pusat keprihatinan terkait deforestasi dan keanekaragaman hayati adalah kurangnya perhatian yang diberikan selama fase perencanaan perkebunan, apakah daerah tersebut memiliki nilai konservasi yang signifikan atau apakah memiliki kepentingan keanekaragaman atau apakah merupakan HCV²⁵.

3.1.2. Produksi Kelapa Sawit dan Emisi Gas Rumah Kaca

Perubahan penggunaan tanah dan deforestasi merupakan kontributor tunggal utama bagi emisi gas rumah kaca pada negara-negara tropis seperti Brazil dan Indonesia. Sektor kelapa sawit dapat menambah gas rumah kaca (GHS) melalui: (1) pembersihan lahan hutan tropis padat karbon digantikan dengan perkebunan-perkebunan baru, dan pembakaran dari biomasa yang telah dibersihkan; (2) pengeringan daerah gambut, yang dapat menyebabkan hilangnya zat karbon dikarenakan daerah gambut tersebut dioksidasi; dan (3) pelepasan gas metana dari kolam pengolahan air limbah yang deras.

Sumber-sumber signifikan dari emisi GHG yang berhubungan dengan kelapa sawit adalah pembersihan lahan dan penggunaan api dalam pembersihan lahan tersebut. Walaupun negara-negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) telah menandatangani Perjanjian mengenai Polusi Kabut Lintas Batas pada tahun 2002 dan telah menerapkan kebijakan regional untuk tidak melakukan pembakaran lahan²⁶, namun penggunaan api untuk membersihkan lahan pertanian terus memberikan kontribusi terhadap polusi udara di daerah ini. Penggunaan api ini merupakan kebiasaan tradisional di antara para pemilik perkebunan dan petani-petani yang umumnya tidak memiliki akses atas peralatan mesin berat untuk melakukan tugas tersebut.

Saat ini pada kebanyakan negara, terdapat peraturan yang berlaku yang mensyaratkan pengolahan limbah pabrik kelapa sawit sebelum dilepaskan pada saluran air. Sistem yang paling banyak dipergunakan adalah pencernaan anaerobik atas limbah melalui serangkaian kolam. Namun kolam-kolam terbuka merupakan sumber-sumber utama

dari emisi GHG sebagai gas metana, yang lebih keras dibanding CO₂ dalam hal efek pemanasan global, di mana gas tersebut dilepas melalui proses pencernaan. Saat ini sebagian besar sistem pengolahan kolam terbuka tidak menangkap pelepasan gas metana. Perusahaan-perusahaan besar sudah bergerak dalam penerapan teknologi untuk menangkap dan mempergunakan gas metana, namun hal ini biasanya di luar jangkauan bagioperator-operator yang lebih kecil. Di bawah Protokol Mekanisme Pembangunan Bersih Kyoto, petani-petani dapat dibayar untuk menangkap gas metana, namun ketidakpastian peraturan dan rendahnya harga untuk mendapatkan pinjaman bagi pengurangan emisi karbon telah menghalangi penekanan emisi gas metana melalui mekanisme PBB dari Kyoto.

3.1.3. REDD dan penggunaan Lahan Degradasi

Sejumlah penelitian telah menunjukkan kesempatan yang diberikan oleh tanah yang terdegradasi dan yang terabaikan sebagai cara untuk mengurangi tekanan terhadap deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ancaman deforestasi dapat dikurangi jika perluasan di masa yang akan datang diarahkan pada lahan tanah degradasi.

Lembaga Sumber Daya Dunia (*World Resources Institute-WRI*) telah memperkirakan bahwa setidaknya ada 6 juta hektar lahan kritis di Indonesia, yang cukup untuk mendukung ekspansi hingga 2020²⁷. Pada tahun-tahun awal perkembangan kelapa sawit di Indonesia dan sampai kini, pendapatan dari hasil panen kayu komersil pada suatu lokasi sering kali dipergunakan untuk membayar biaya pembangunan perkebunan kelapa sawit selanjutnya.

Dikarenakan pembangunan telah bergerak menuju hutan sekunder dan lahan pertanian, sumber penghasilan ini sering kali tidak lagi tersedia. Namun, penerapan REDD menawarkan insentif keuangan untuk menghindari potensi konversi hutan. Hal ini dapat menyebabkan perluasan lahan kelapa sawit terdegradasi dan dikonversi.

²⁵ Sesuai definisi yang diangkat oleh Dewan Pembimbing Kehutanan dan RSPO.

²⁶ ASEAN. 2003. *Panduan Implementasi bagi Kebijakan ASEAN mengenai Zero Burning*. Jakarta: ASEAN Sekretariat.

²⁷ Namun dalam hal skema Pemilik perkebunan Perkebunan Inti di Indonesia, istilah tersebut mengacu pada keluarga-keluarga yang telah dialokasikan lahan tanah yang lebih kecil (umumnya 2 Ha).



Kotak 3: Contoh-contoh Upaya yang dipimpin oleh Negara mengenai REDD dan Lahan Tanah Degradasi

Indonesia: Pada pertemuan G20 pada bulan September 2009, Presiden Yudhoyono mengumumkan bahwa Indonesia akan mengurangi emisi GHG sampai dengan 26 persen pada tahun 2020, dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan dunia. Berdasarkan komitmen ini, Pemerintah Indonesia telah merancang suatu program tindakan perubahan iklim yang kuat, termasuk Strategi Nasional REDD+. Pemerintah Indonesia membiayai kegiatan-kegiatan Persiapan REDD yang didanai *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF), UN REDD, *Global Environment Facility*, dan sumber-sumber lainnya. Indonesia merupakan negara perintis bagi investasi kegiatan-kegiatan REDD di bawah *Forest Investment Program* (FIP) dari *Climate Investment Funds**. Pemerintah Indonesia juga telah menyusun suatu Program Reformasi Perubahan Iklim dengan tonggak kebijakan pada kehutanan, energi, adaptasi dan pengembangan lembaga-lembaga yang didukung oleh *Japan International Cooperation Agency*, *Agence Francaise de Development*, World Bank, dan *Asian Development Bank*. Baru saja, pada bulan Mei 2010, Indonesia sepakat dengan Norwegia atas suatu inisiatif yang berhubungan dengan kebijakan yang berani untuk mempercepat tindakan terhadap REDD+. Surat bilateral intent (LoI) menetapkan serangkaian tonggak dan fase pendanaan, dengan kebijakan yang berani untuk mempercepat tindakan terhadap REDD+. Surat bilateral intent (LoI) menetapkan serangkaian tonggak dan fase pendanaan, dengan fokus pertama pada pembentukan Badan Pengelola REDD +, pemantauan, verifikasi dan laporan Badan, strategi nasional REDD, suatu provinsi perintis dan alat pembiayaan.

Brazil: Pengalaman Brazil dalam memberikan insentif-insentif tambahan untuk membatasi pembudidayaan kelapa sawit kepada lahan tanah yang diabaikan dan tanah degradasi dan lahan tanah yang telah dideforestasi sejak lama menunjukkan potensi-potensi dari pendekatan-pendekatan ini. Pada bulan Mei 2010, Mantan Presiden Brazil Lula da Silva mengumumkan Program bagi Produksi Minyak Kelapa Sawit yang Berkelanjutan bertujuan untuk mengolah tanah hampir seluas 5 juta hektar lahan tanah yang terabaikan dan tanah degradasi ke dalam produksi sementara melarang konversi hutan alam. Perkebunan kelapa sawit mempekerjakan satu pekerja setiap 8 sampai 10 hektar dan lebih padat karya dibandingkan dengan pertanian kedelai yang termekanisasi dan peternakan, yang merupakan sistem produksi pertanian terdepan lainnya di Amazon Brazil. Upaya memastikan kepatuhan atas larangan deforestasi ini akan sangat difasilitasi oleh sistem pengawasan satelit terancang negara Brazil.

* *Climate Investment Funds* (termasuk FIP dan CTF) dan FCPF merupakan mekanisme multi donor dengan kontribusi dari mitra-mitra pembangunan termasuk: Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa pengembangan kelapa sawit di lahan terdegradasi akan menjadi bagian dari strategi nasional untuk REDD+ yang dikembangkan di bawah kemitraan miliar dolar di Norwegia²⁸.

Selain itu, penelitian terbaru oleh WRI, dalam proyek *Prince's Rainforests Project* dan ekonom pertanian Thomas Fairhurst menunjukkan bahwa beberapa perusahaan kelapa sawit lebih suka memperluas lahan non hutan untuk mengurangi biaya instalasi dan menghindari proses panjang untuk mendapatkan izin di kawasan hutan. Tak satu pun dari perusahaan yang disurvei untuk pendanaan penelitian - dan oleh karena itu perlu dilakukan pemotongan kayu untuk menghasilkan uang - sebagai faktor pembatas ekspansi mereka. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya memperbaiki rencana tata ruang sebagai persyaratan utama untuk mencapai tujuan pembangunan minyak sawit dan tujuan konservasi hutan di Indonesia²⁹. Penelitian juga menunjukkan bahwa banyak lahan terdegradasi yang cocok untuk penanaman kelapa sawit dan dapat memberi hasil yang sebanding dengan tanah yang baru-baru ini dibersihkan³⁰.

3.2. Kemungkinan Solusi untuk Memperbaiki Hasil Lingkungan Hidup dari Perluasan Kelapa Sawit

Dampak-dampak dari ekosistem terhadap hutan dan lahan gambut dari suatu sektor kelapa sawit yang mengalami perluasan sungguh sangat signifikan namun sangat dapat dihindari. Suatu kerangka kerja kebijakan yang perkembangan perkebunan kepada tanah mineral non-hutan dan suatu lingkungan yang mendukung usaha akan sangat memperbaiki jejak lingkungan sektor tersebut. Patut dicatat bahwa pilihan utama berikut ini diterapkan secara luas atas alokasi penggunaan lahan dan tidak spesifik pada suatu sektor.

²⁸ <http://www.thejakartapost.com/news/2010/05/27/ri-honor-palm-oil-contracts-despite-forest-protection.html>

²⁹ http://news.mongabay.com/2011/0103-wri_interview_hance_butler.html

³⁰ T. Fairhurst and D. McLaughlin, "Sustainable Oil Palm Development on Degraded Land in Kalimantan." WWF, 2009; Indonesian National Development Planning Agency (BAPPENAS) "Reducing carbon emissions from Indonesia's peatlands," 2009.



- **Mengidentifikasi lahan yang sesuai bagi pembudidayaan kelapa sawit yang berkelanjutan dan daerah-daerah mana yang harus dilindungi.**

Terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi daerah-daerah non-hutan dan/atau daerah-daerah yang memiliki nilai konservasi rendah, yang sesuai bagi perkebunan kelapa yang sesuai bagi perkebunan kelapa sawit. Tantangan utama adalah menemukan lahan yang memiliki atribut fisik yang tepat di mana tidak terdapat tuntutan dari masyarakat setempat atau di mana masyarakat setempat memiliki minat mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Peningkatan pada teknologi indra jarak jauh (*remote sensing technology*) perlu dikombinasikan dengan verifikasi di lapangan untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang sesuai.

- **Meningkatkan upaya-upaya perencanaan tata ruang.** Perbaikan perencanaan tata ruang di dalam ruang lingkup hutan sepatutnya dapat memperbaiki pengawasan daerah hutan dan mencegah hutan-hutan dari suatu nilai perubahan. Upaya-upaya juga harus dilakukan untuk memperbaiki tata ruang di luar ruang lingkup hutan untuk mengidentifikasi lahan-lahan degradasi yang mungkin sesuai bagi produksi kelapa sawit.

- **Memberikan insentif-insentif bagi perlindungan lahan-lahan gambut.** Dengan bertambahnya pengakuan akan nilai karbon yang tersimpan pada lahan gambut terdapat potensi untuk memberikan insentif keuangan kepada pemerintah dan juga kepada perusahaan swasta agar tidak mengolah lahan-lahan tersebut. Dalam jangka pendek, diberikan mekanisme yang dapat digunakan untuk membeli kredit karbon dari konservasi lahan gambut. Untuk jangka panjang, hal ini dapat difasilitasi dengan cara mengikutsertakan lahan-lahan gambut di dalam mekanisme pasar/pembayaran hutan karbon di dalam REDD yang muncul.

Akan tetapi agar berhasil menerapkan mekanisme REDD diperlukan identifikasi terhadap hak-hak penghuni yang telah ada pada lahan-lahan degradasi serta adanya pembagian keuntungan. Perencanaan masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Sumber Daya Dunia (*World Resources Institute*) dan Sekala dalam mengidentifikasi lahan degradasi yang

dapat ditukar dengan lahan-lahan hutan yang direncanakan untuk perluasan akan menjadi komponen yang penting bagi inisiatif REDD.

- **Memperbaiki lingkungan untuk menciptakan iklim usaha bagi pengembangan daerah rendah karbon.** Peningkatan perencanaan tata ruang, sebuah deliniasi yang jelas atas hak milik, tanah klaim penyelesaian konflik, dan mekanisme untuk resolusi konflik, akan membantu perusahaan untuk mengembangkan perkebunan di daerah-daerah yang telah dibersihkan, mengurangi kebutuhan untuk membuka daerah baru.
- **Meningkatkan produktivitas pada perkebunan-perkebunan yang telah ada.** Dengan mendukung penggantian kelapa sawit yang telah menua dan yang telah melampaui kehidupan ekonomisnya dengan kelapa sawit baru, serta mendukung teknik-teknik pertanian yang memastikan bahwa potensi kandungan minyak yang lebih tinggi akan tercapai. Penghalang utama untuk ditanggulangi adalah "pendanaan di muka" khususnya bagi para pemilik perkebunan, untuk menutup periode 8 tahun sebelum kelapa sawit yang baru ditanam siap berproduksi secara penuh.
- **Mengembangkan dan Menerapkan Standar-standar Sukarela.** Dalam mengembangkan dan mengadopsi praktik diverifikasi, perusahaan minyak kelapa dapat melindungi hutan HCV bercadangan karbon tinggi. Pemain lainnya dalam rantai pasokan, termasuk pembeli, prosesor dan pengecer juga dapat efektif dalam mempromosikan petani kelapa sawit untuk mengadopsi standar yang lebih tinggi.

B. SOSIAL

3.3. Keprihatinan Sosial

Kegiatan-kegiatan pertanian merupakan andalan dari rumah tangga pedesaan pada sebagian besar negara-negara tropis dan pertumbuhan pada sektor pertanian merupakan pendorong yang kuat bagi pengurangan kemiskinan³¹. Perluasan kelapa sawit dapat mengandung keuntungan-keuntungan sosial-ekonomis bagi masyarakat setempat melalui kesempatan pekerjaan,

³¹ World Bank, 2007



infrastruktur yang diperbaiki, peningkatan pada nilai tanah, dan penghasilan dari pembudidayaan kelapa sawit. Perluasan kelapa sawit juga mengandung keuntungan tidak langsung atau pengurangan kemiskinan pada tingkat nasional melalui alokasi pemerintah terhadap pendapatan perpajakan dan pendapatan devisa. Namun, juga terdapat dampak-dampak negatif, termasuk hilangnya akses terhadap tanah tanpa adanya kompensasi yang cukup, hilangnya keuntungan dari strategi-strategi penghasilan campuran, dan hilangnya jasa lingkungan dari hutan alami (contoh., air, perburuan, tanaman obat-obatan) saat diganti oleh perkebunan-perkebunan.

Terdapat keprihatinan bahwa pembagian keuntungan dan penyelesaian perselisihan bagi pemilik perkebunan dan masyarakat setempat selama ini tidak mencukupi. Permasalahan-permasalahan yang ada termasuk kurangnya kejelasan mengenai hak atas tanah dan pertentangan dengan Penduduk Asli dan masyarakat setempat.

3.3.1. Hak atas Tanah

Ketegangan dapat timbul sehubungan dengan akuisisi tanah, dan pengakuan hak masyarakat setempat atas tanah selama pendirian lingkungan industrial. Saat perkebunan kelapa sawit didirikan, kompensasi atas hilangnya akses terhadap tanah dapat memperbaiki distribusi keuntungan-keuntungan, namun hak atas tanah yang tidak jelas dan kurangnya transparansi dapat menyebabkan hasil-hasil yang tidak merata. Terutama Penduduk Asli dengan tuntutan tradisional atas tanah yang kurang beruntung karena pengakuan formal terhadap bentuk tuntutan tersebut sangat terbatas. Jumlah masyarakat pedesaan yang sangat besar tergantung pada hutan untuk berbagai macam barang dan jasa, dan perubahan pada hutan-hutan dapat memiliki dampak-dampak merugikan atas penghasilan dan kebudayaan mereka.

Skala ekonomi pada penggilingan dan kebutuhan atas buah-buah yang telah diproses setelah panen, memerlukan penggilingan untuk mendapatkan akses atas suatu bidang tanah yang luas yang mungkin akan dipanen secara tunggal, merampas hak masyarakat setempat atas keuntungan-keuntungan yang berasal dari strategi penghasilan campuran. Saat hutan diganti dengan perkebunan kelapa sawit, masyarakat kehilangan akses terhadap kayu bagi konstruksi, rotan, dan taman-taman

karet hutan³². Masyarakat juga dapat kehilangan otonomi dan kemandirian yang berhubungan dengan kebiasaan penghasilan tradisional dan mungkin akan tergantung kepada fluktuasi pasar atas harga kelapa sawit dan kebiasaan pembelian dari pabrik-pabrik minyak kelapa sawit.

Partisipasi komunitas berbasis luas yang efektif di dalam perencanaan penggunaan tanah diperlukan untuk menangani cakupan luas dari permasalahan yang disajikan saat perkebunan-perkebunan besar mana pun berinteraksi dengan masyarakat setempat. Sekalipun tantangan dan peluang jelas merupakan hal yang spesifik pada suatu konteks, pada umumnya termasuk: kurangnya kejelasan mengenai hak atas tanah dan air dan peralihannya (bila ada). Kurangnya kejelasan mengenai pengaturan kontrak antara perusahaan dan pemilik perkebunan, serta rendahnya kapasitas masyarakat setempat untuk bernegosiasi secara adil, kurangnya informasi yang tersedia secara umum mengenai proposal tersebut, kurangnya informasi mengenai model-model alternatif dari masyarakat atau keterlibatan pemilik perkebunan yang menawarkan berbagai tingkat keuntungan, dan bagi beberapa penghidupan pemilik perkebunan, dampak-dampak yang tercampur dari peralihan kepada tanaman panen dan hilangnya otonomi yang didapatkan dari kebiasaan-kebiasaan penghidupan tradisional.

Sementara partisipasi masyarakat di dalam perencanaan tata ruang sangat penting, peraturan-peraturan dasar, ekspektasi-ekspektasi, dan prosedur pencatatan atas konsultasi-konsultasi sering kali kurang. Penduduk Asli dapat menjadi sangat rentan apabila perkebunan diajukan. Di mana penduduk asli memiliki kebiasaan melakukan perladangan yang berpindah, dan perusahaan perkebunan lebih senang mempekerjakan pekerja dengan latar belakang pertanian yang menetap, ketegangan di antara pendatang baru dan Penduduk Asli dapat timbul.

3.3.2. Dampak terhadap Kebudayaan dan Penghidupan

Ide dasar dari keberlanjutan adalah hidup dengan kesadaran bahwa tindakan sementara memiliki dampak pada orang lain dan dunia pada umumnya, pada generasi mendatang. Keberlanjutan sosial mempertimbangkan pandangan dunia yang lebih luas sehubungan

³² Belcher et al., 2004, cited in Shell et al., 2009



dengan masyarakat, kebudayaan, dan globalisasi. Laporan terbaru *Meningkatnya Minat Global pada Lahan Pertanian: Dapatkah Mengadung Keuntungan-keuntungan yang Berkelanjutan dan Merata*, merujuk pada contoh-contoh di mana investasi memberikan keuntungan-keuntungan yang besar dan berkelanjutan bagi populasi setempat.

Namun di dalam banyak kasus, keuntungan yang diinginkan tidak tercapai. Khususnya di Afrika, investasi sering kali tidak mencapai potensi sepenuhnya dalam hal produktivitas dan pengurangan kemiskinan dikarenakan:

- Lemahnya tata kelola tanah dan kegagalan dalam mengenali atau melindungi hak atas tanah masyarakat setempat;
- Negara tidak memiliki kapasitas untuk memproses dan mengelola investasi skala besar terkait pembebasan tanah;
- Proposal investor yang tidak diuraikan dengan cukup atau secara teknis tidak layak; dan
- Kurangnya strategi pembangunan untuk menentukan apakah investasi dalam skala besar dapat berperan dalam membantu negara tuan rumah untuk mencapai tujuan pembangunannya, dan apabila sesuai, di mana dan bagaimana investasi dapat berkontribusi terhadap tujuan-tujuan tersebut.

Sebagai tambahan, di banyak negara, kurangnya informasi yang tersebar luas menyebabkan lembaga umum tersebut sulit untuk melakukan pekerjaannya. Tanpa menanggapi kekurangan informasi ini, peraturan yang paling progresif pun akan sulit atau tidak mungkin diberlakukan, korupsi dapat berkembang, dan akan sulit untuk menarik investor-investor yang serius. Akan sangat kritis untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan membentuk jalan di mana dapat dipergunakan untuk menerapkan peraturan-peraturan dan mengizinkan basis data terbuka untuk menginformasikan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan, sebagai tambahan dari memperkuat struktur-struktur pemerintah sendiri dan membuat data dapat diakses secara umum.

Penekanan lebih lanjut terhadap kebudayaan dan keterlibatan masyarakat setempat pada daerah-daerah yang ditujukan bagi perkebunan kelapa sawit baru sangat fundamental dalam mengurangi perselisihan dan memfasilitasi proses perubahan dengan damai dan keadilan yang merata.

3.3.3. Tenaga Kerja

Walaupun sektor tersebut merupakan sumber penting bagi pekerjaan, para kritikus menunjukkan kurangnya kondisi keamanan dan kondisi kerja yang layak pada beberapa kasus. Para wanita, buruh lepas, dan buruh migran adalah yang sangat rentan. Bagian-bagian yang dikhawatirkan termasuk keselamatan kerja, kebijakan dan kebiasaan yang menyangkut kesehatan dan keselamatan, kebebasan berasosiasi, buruh anak-anak, buruh paksa dan bentuk-bentuk kerja paksa, dan diskriminasi. Meskipun upah minimum dan tunjangan ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah atau melalui suatu perjanjian bersama antara majikan dan serikat buruh, penerapan yang konsisten dari standar gaji dan manfaat di seluruh industri merupakan suatu masalah.

Secara khusus, langkah-langkah untuk mengatasi perlakuan terhadap perempuan sering kalikurang. Dampak industri terhadap perempuan dan laki-laki biasanya berbeda. Di mana keputusan untuk mengambil keputusan terletak pada laki-laki, keterlibatan perempuan akan memerlukan suatu pendekatan yang proaktif dan implikasi gender pada pekerjaan, akses untuk mempergunakan tanah, perumahan, pendidikan dan kesehatan, semuanya membutuhkan analisis lebih lanjut. Sebagai contoh, perempuan dapat dipekerjakan pada operasi lapangan seperti penyiangan dan pemberian pestisida. Paparan terhadap bahan kimia berbahaya seperti herbisida dan fungisida pada pembudidayaan minyak kelapa sawit telah dilaporkan menyebabkan gangguan kesehatan di antara pekerja perempuan, dan risiko tersebut diperburuk saat perempuan hamil terkena pestisida.

3.4. Pemilik perkebunan

RSPO, mendefinisikan pemilik perkebunan sebagai petani-petani yang menguasai 50 hektar atau kurang dari lahan budi daya³³. Laporan ini menggunakan definisi yang mengakui bahwa definisi pemilik perkebunan bergantung pada tiap negara. Selain itu, mungkin ada perkembangan yang signifikan yang terkait dengan petani menengah dan pekerja perkebunan yang tidak memiliki tanah.

³³ Namun dalam hal skema Pemilik perkebunan Perkebunan Inti di Indonesia, istilah tersebut mengacu pada keluarga-keluarga yang telah dialokasikan lahan tanah yang lebih kecil (umumnya 2 Ha).



Para pemilik perkebunan mewakili bagian yang signifikan dari pembudidayaan kelapa sawit di seluruh dunia. Secara global, tiga juta pemilik perkebunan yang merupakan kepala keluarga terlibat di dalam sektor kelapa sawit³⁴. Walaupun pengumpulan data tidak secara konsisten tersedia di seluruh tempat, terdapat variasi yang signifikan pada daerah-daerah kunci (lihat Tabel 2).

Tabel 2: Produksi Pemilik Perkebunan pada Negara-negara Produsen Utama³⁵

Negara	Persentase dari Daerah di bawah Pemilik Perkebunan	Persentase dari Produksi di bawah Pemilik Perkebunan
Indonesia	44 persen	33 persen
Malaysia	41 persen	-
Nigeria	-	80 persen
PNG	42 persen	35 persen
Thailand	76 persen	-

Box 4: Partisipasi produsen kecil di kelapa sawit dan agro-industri

Secara tradisional dalam proyek-proyek pembangunan agro-industri, partisipasi petani kecil akan dalam bentuk skema keluar produsen atau skema inti nyata, di mana perkebunan agro-industri atau sektor real akan dibentuk dan dikelola langsung oleh perusahaan agro-industri (swasta, atau sering parastatal), termasuk unit pengolahan sentral (pabrik minyak, pabrik gula, tanaman karet) dan infrastruktur lainnya (desa untuk pekerja, sekolah dan pusat-pusat kesehatan atau rumah sakit) dan produser / pemilik perkebunan kecil akan dibentuk untuk pinggiran. Seringkali, petani bukan penduduk asli tapi imigran yang menerima alokasi tanah untuk membangun perkebunan dan tanaman pangan. Mereka umumnya erat kaitannya dengan - dan tergantung pada - perusahaan agro-industri, tidak hanya dalam menerima alokasi tanah, tetapi juga untuk bantuan teknis dalam pembukaan lahan dan menciptakan perkebunan yang dapat mengakses input (bibit dipilih) dan kredit - yang terakhir dengan intermediasi keuangan beberapa lembaga untuk membayar kembali pinjaman berdasarkan hasil dari pengiriman produk kepada industri-agro bagi perusahaan agro-industri. Biasanya para petani juga tergantung pada agro industri di wilayah untuk pembelian produksi (kelapa sawit tandan buah segar, lateks cair atau dikoagulasi, tanaman tebu) dengan harga pre-set, kadang-kadang tanpa ada kontrak tertulis yang diberikan fakta bahwa mereka telah tidak ada pilihan lain selain untuk menyampaikan produksi mereka kepada perusahaan. Model pengembangan Agro-industri telah banyak digunakan selama beberapa dekade, terutama pada 1970-an dan 1980-an di berbagai wilayah Asia Tenggara (Malaysia dan Vietnam) dan Afrika (Pantai Gading, Nigeria, Kamerun, Ghana), dan didukung serta didanai oleh berbagai lembaga bantuan termasuk Bank Dunia. Secara bertahap berakhir ketika parastatal agro-industri diprivatisasi dan ketika sebagai akibat dari pinjaman Bank Dunia kepada pemerintah untuk jenis proyek menurun (dengan beberapa pengecualian mencolok, seperti Vietnam di mana proyek masih didanai pada tahun 1990 dan 2000's. Penting untuk menekankan fakta bahwa sementara konteks telah berubah, seperti diuraikan di atas, masih terdapat pemikiran dan pendekatan terhadap pengembangan pengusaha kecil di industri agro-tropis. Selama bertahun-tahun telah terjadi pergeseran dari negara *oligopsonic* "terpadu", dan *model-driven*, untuk mengetik sektor swasta dukungan tersebar lebih kepada petani dan pertanian kecil, di mana unit pertanian dengan ukuran yang berbeda yang tersisa dapat memutuskan apakah akan tumbuh atau tidak sebuah tanaman agro-industri di tanah mereka sendiri, dan memberikan dukungan jika diperlukan dari berbagai penyedia layanan swasta lokal seperti pemasok input, pedagang dan lembaga keuangan.

³⁴ Teoh, 2010

³⁵ Data produksi Petani kecil Teoh 2010 dan Vermeulen 2006. Data lengkap tentang budidaya kecil (menurut daerah dan total produksi) tidak selalu tersedia di semua negara; Tabel ini menyoroti tersedia di negara produsen utama data



Struktur Hubungan-hubungan Pemilik Perkebunan

Struktur hubungan antara pemilik perkebunan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan dan/atau pabrik yang membeli buah-buah merupakan faktor penentu bagi kondisi pemilik perkebunan. Terdapat beberapa jenis struktur-struktur utama dari hubungan tersebut, walaupun terdapat variabilitas yang signifikan bahkan di dalam jenis-jenis ini.

Para pemilik perkebunan mandiri bebas untuk menjual kepada pabrik mana pun, maka mungkin akan dapat mengejar harga yang lebih tinggi. Namun akses pasar mereka tidak dapat dipastikan, dan meskipun demikian mungkin tidak ada keragaman dari sisi pembeli apabila pabrik-pabrik tersebar. Pemilik perkebunan mandiri sering kali kurang produktif; penelitian telah mengidentifikasi elemen-elemen dari inefisiensi yang termasuk mempertahankan kelapa sawit tua terlalu lama, mempergunakan bibit pemilik perkebunan sendiri (kualitas rendah), memberi jumlah pupuk yang tidak mencukupi, memanen tandan buah segar (*fresh fruits bunches* - FFB) yang belum matang, dan tidak memiliki sistem manajemen data yang kuat³⁶.

Secara kontras, pemilik perkebunan dengan dukungan umumnya terikat kepada pabrik-pabrik spesifik. Mekanisme yang pasti mengenai ikatan tersebut bervariasi: dapat termasuk hubungan formal dalam sertifikat tanah atau hubungan kontraktual yang berhubungan dengan pinjaman. Umumnya, pemilik perkebunan dengan dukungan memiliki akses atas suatu tingkat dukungan dari perusahaan-perusahaan perkebunan – melalui akses terhadap pinjaman, bantuan teknis, atau cara lainnya.

Penghasilan rata-rata dari pembudidayaan kelapa sawit sedikit lebih tinggi dibanding pertanian subsisten³⁷ atau dari tanaman panen yang bersaing. Pada tahun 2006, pendapatan tahunan petani dari minyak kelapa sawit yang matang sekitar US\$ 980 per hektar, dibandingkan dengan US\$ 410 dari kopi, US\$ 580 dari jagung, dan US\$ 150 dari karet³⁸, di masa yang akan datang. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa banyak penduduk desa berharap untuk dapat masuk ke dalam perekonomian tunai dan melihat pembudidayaan kelapa sawit sebagai suatu

Di sisi pemasaran, pengaturan dapat berkisar dari penandatanganan kontrak untuk memasok melalui Industri Pertanian terdekat hingga memberi kebebasan kepada petani untuk menentukan dimana mereka ingin menawarkan dan menjual produk mereka. Berbagai model transisi diterapkan tergantung pada situasi di negara itu, tetapi trend yang jelas adalah untuk sistem terbuka dan lebih kompetitif, yang juga lebih memperhitungkan situasi dalam hal tanah dan partisipasi masyarakat lokal serta lebih bergantung pada penyediaan jasa swasta untuk petani dan daerah pedesaan. Pendekatan (relatif) baru ini menawarkan kesempatan besar untuk keterlibatan tingkat negara, karena jumlah klien pemerintah dan pemangku kepentingan yang telah menyatakan minatnya untuk mengeksplorasi cara baru untuk merangsang pertumbuhan dan lapangan kerja di daerah pedesaan, sambil memanfaatkan potensi yang ditawarkan oleh ekspansi agro-industri tanaman. Pada tantangan yang sama dan *trade-off* yang terkait dengan model pembangunan yang tidak dapat dianggap remeh: bagaimana untuk mempertahankan / mencapai skala ekonomis dan agregasi bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri ini dalam hal volume kritis dan daya saing? Bagaimana mengelola ini liberalisasi sub-sektor terhadap lingkungan dan menghindari / membatasi sisi-jual dan praktek lainnya yang dalam jangka panjang masing-masing industri yang merugikan? Bagaimana mengelola pemanfaatan lahan dan pengembangan geospasial? Setiap kasus ini merupakan area untuk pengembangan penelitian dan percobaan di mana WB dapat terlibat di masa mendatang.

tahun 1997 dan 2007, lebih cepat daripada pertumbuhan Perkebunan-perkebunan Milik Negara dan Swasta (Table 3).

Walaupun pemilik perkebunan menghasilkan 60 persen dari minyak kelapa sawit dunia, umumnya mereka memiliki hasil yang secara signifikan lebih rendah dibanding perkebunan milik negara.

Meningkatkan produktivitas dari pemilik perkebunan merupakan suatu tantangan yang besar. Perkebunan yang terbaik di Asia Tenggara menghasilkan 7 ton tandan buah segar (*fresh fruit bunches*-FFB)/ha/th, dan dengan beberapa pemilik perkebunan menghasilkan kurang dari 0,5 t FFB/ha/th. Permasalahan lebih serius dengan petani kecil mandiri: dikarenakan pemilik perkebunan dengan dukungan atau "skema" yang beroperasi di bawah kebijakan-kebijakan seperti FELDA di Malaysia dan NES dan skema kerjasama serupa di Indonesia umumnya memiliki akses terhadap dukungan teknis dan keuangan dari perusahaan-perusahaan "induknya".

³⁶ Ayat Rahman et al 2008

³⁷ Hardter et al, dikutip dalam Sheil et al., 2009

³⁸ Koh et al., forthcoming

³⁹ Rist et al., forthcoming

⁴⁰ Levang 2002

⁴¹ Rist et al., forthcoming



Kendala utama bagi produksi pemilik perkebunan termasuk kesulitan dalam mendapatkan modal untuk memenuhi pengeluaran di muka. Pemilik perkebunan umumnya kekurangan jaminan bagi pendanaan dari bank, dan akses terhadap saran teknis yang baik dan informasi pasar. Mendapatkan harga yang adil bagi hasil panen mereka merupakan keprihatinan utama. Berada pada situasi monopsonik di daerah pedesaan, biasanya mereka memiliki pengaruh yang lemah atas pemberian harga. Sementara industri minyak bergerak ke arah produksi minyak kelapa sawit yang bersertifikat dan berkelanjutan sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan oleh RSPO dan organisasi lainnya, pemilik perkebunan berisiko kehilangan kesempatan pasar apabila mereka tidak memperbaiki kebiasaan-kebiasan produksi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang sertifikasinya ketat.

Penelitian menunjukkan bahwa akses yang lebih baik untuk bahan tanaman ditingkatkan, pupuk dan praktik manajemen yang lebih baik menyebabkan keuntungan meningkat. Sebagai

contoh, Lembaga Penelitian Minyak Kelapa Sawit Indonesia (*Indonesian Oil Palm Research Institute* (IOPRI)) memiliki program produksi bibit aktif dan pembudidayaan. Pengalaman orang Brazil dan meningkatnya lembaga penelitian sangat menjanjikan. Dalam suatu program di Brazil yang dirancang bagi para petani miskin di pedesaan, kebanyakan dari mereka adalah perempuan, 90% dari para petani berhasil mendapatkan pendapatan lebih tinggi dibanding perusahaan-perusahaan perkebunan, dan di Papua Nugini penelitian terbaru menemukan bahwa menyesuaikan pemberian pupuk sesuai dengan lokasi spesifik, bersama dengan jasa perluasan teknis terarah menghasilkan 30 persen peningkatan pendapatan bagi pemilik perkebunan. Memperkuat perluasan atas permintaan yang didorong oleh pemilik perkebunan dan jasa pesisat dan mekanisme inovasi-inovasi untuk memberikan pendanaan bagi pemilik perkebunan juga merupakan hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan-keuntungan.

Tabel 3: Daerah Produksi Kelapa Sawit di Indonesia, 1997-2007

Daerah Kelapa Sawit (Jutaan Hektar)	1997	2007	1997-2007 pertumbuhan rata-rata /th	Produksi Minyak Kelapa Sawit (Jutaan Ton)	1997	2007	1997-2007 pertumbuhan rata-rata /th
Pemilik perkebunan	0,81	2,57	12 persen	Pemilik perkebunan	1,28	5,81	16 persen
Milik Negara	0,52	0,69	3,0 persen	Milik Negara	1,59	2,39	4 persen
Perkebunan Swasta	1,59	3,06	6,7 persen	Perkebunan Swasta	2,58	8,69	13 persen
Total	2,92	6,32	8,0 persen	Total	5,45	16,89	12 persen

Sumber: Data dari Dewan Minyak Kelapa Sawit Indonesia (Indonesia Palm Oil Board) IPOB, 2008

3.5. Kemungkinan Penyelesaian untuk Memperbaiki Dampak-dampak Sosial dari Perkembangan Kelapa Sawit

Mengklarifikasi penggunaan tanah dan hak akses tanah. Kebanyakan dari konflik antara perusahaan-perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat setempat berkisar pada permasalahan hak atas tanah. Kejelasan akan hak atas tanah akan memperbolehkan

masyarakat setempat untuk menolak perluasan perusahaan-perusahaan kelapa sawit di daerah di mana mereka tidak diinginkan, dan akan memperbolehkan para petani untuk menegosiasikan transaksi yang lebih menguntungkan dengan perusahaan-perusahaan di mana perusahaan tersebut diinginkan. Adanya kejelasan akan hak atas tanah adalah bagi kebaikan perusahaan juga, karena konflik yang berasal dari tuntutan tanah yang tidak jelas atau tumpang tindih



merupakan biaya usaha yang signifikan. Sertifikat atas tanah akan menambah keuntungan membantu memfasilitasi akses pemilik perkebunan kepada pendanaan. Namun sertifikat individu bukan merupakan bentuk satu-satunya dari pengakuan hak atas tanah, dan beberapa kelompok tradisional mungkin tidak menginginkan sertifikat individu.

Mendukung mekanisme penyelesaian konflik. Konflik-konflik dapat timbul antara perusahaan dan masyarakat setempat atas tanah dan mungkin akan ada peranan bagi penengah untuk memperbaiki hasil-hasil dalam jangka pendek. Pusat Agrokehutanan Dunia (*World Agroforestry Center*) telah mengembangkan dan menguji suatu Sistem Pendukung Negosiasi dan program Keadilan bagi Masyarakat Miskin telah menguji model-model dari adjudikasi konflik. Kebanyakan sistem sertifikasi sukarela juga termasuk mekanisme penyelesaian konflik. Model-model ini dan model lainnya dapat dievaluasi untuk peningkatan, namun akan memerlukan pertimbangan atas kerangka kerja lembaga dan keberkelanjutan pendanaan.

Proses-proses reformasi dan standar negosiasi dan kontrak-kontrak antara para pemilik perkebunan dan perusahaan-perusahaan. Para pemilik perkebunan seringkali tidak memahami ketentuan-ketentuan di dalam kontrak yang mereka tandatangani dan terkadang ketentuan-ketentuan ini tidak jelas, hal ini menyebabkan konflik di masa mendatang. Kontrak-kontrak perlu sangat jelas dan adil atas permasalahan yang berhubungan dengan peralihan tanah dan ketentuan-ketentuan hutang piutang. Multipemangku kepentingan seperti RSPO dapat memainkan peranan dalam mengembangkan standar-standar kontrak yang diterapkan atau dapat diterapkan pada kondisi-kondisi setempat⁴².

Memperbaiki kapasitas negosiasi dari perwakilan pemilik perkebunan dan koperasi-koperasi pemilik perkebunan. Asosiasi pemilik perkebunan memainkan peranan yang penting dalam menegosiasikan transaksi dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Badan-badan perluasan pedesaan dan kelompok masyarakat sipil dapat meningkatkan kesadaran atas hak-hak hukum dan pilihan-pilihan para pemilik perkebunan dan dapat meningkatkan kapasitas dari koperasi-koperasi pemilik perkebunan untuk

bernegosiasi atas perjanjian-perjanjian yang menguntungkan⁴³. Kelompok masyarakat sipil juga dapat memusatkan diri pada permasalahan tata kelola perusahaan dan transparansi internal koperasi-koperasi.

Mempromosikan pemilik perkebunan di dalam perkembangan lebih lanjut kelapa sawit.

Keuntungan-keuntungan dari perkembangan kelapa sawit, kemungkinan akan lebih besar saat petani-petani mempertahankan tanahnya dan ikut serta didalam penanaman kelapa sawit, dibanding apabila mereka menjual tanah mereka kepada perkebunan. Suatu pilihan untuk mendapatkan partisipasi lebih besar dari para pemilik perkebunan adalah untuk meningkatkan daerah-daerah yang diperintahkan sebagai bagian dari porsi pengembangan baru kelapa sawit bagi pemilik perkebunan. Hal ini akan perlu dikombinasikan dengan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa kemitraan tersebut menguntungkan bagi pemilik perkebunan dan hak-hak dari masyarakat setempat dipertimbangkan dalam kasus-kasus di mana pemilik perkebunan didatangkan dari daerah-daerah lain.

Memperbaiki akses pasar bagi pemilik perkebunan mandiri. Perlu diambil pertimbangan terhadap pilihan-pilihan untuk mempromosikan pabrik minyak kelapa sawit skala kecil dan bagaimana sarana-sarana ini dapat didanai, dimiliki, dikelola dan dipertahankan. Sarana-sarana tersebut perlu memenuhi persyaratan-persyaratan lingkungan hidup dan sosial, yang sering kali sulit untuk dipenuhi bagi operasi-operasi skala kecil tersebut.

Memperkuat jasa perluasan bagi petani untuk memperbaiki hasil panen pemilik perkebunan. Akes yang lebih baik terhadap bibit, pupuk dan kebiasaan manajemen yang lebih baik akan menyebabkan peningkatan keuntungan pemilik perkebunan. Bank Dunia mendukung Pemberdayaan Petani melalui Proyek Teknologi Pertanian dan Informasi (*Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information Project - FEATI*) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam merevitalisasi sektor pertanian dan dapat dipergunakan untuk membidik pemilik perkebunan kelapa sawit. FEATI bekerja pada memberdayakan petani melalui jaringan informasi yang diperbaiki, pengembangan masyarakat agribisnis, dan meningkatkan hubungan antara penelitian dan perluasan.

⁴² Rist et al, akan datang

⁴³ Rist et al, akan datang



Sifat dan tingkat kepedulian sosial dan lingkungan dan tantangan-tantangan ini spesifik bagi masing-masing negara dan sistem produksinya. Mereka telah mendapatkan perhatian pada negara produsen terbesar, Indonesia, di mana aspek-aspek lingkungan hidup dan sosial dari perubahan penggunaan tanah dan permasalahan tata kelola yang berhubungan merupakan inti dari keprihatinan.

Di negara-negara dan daerah-daerah lain terutama Amerika Latin, Papua Nugini, dan Sub Sahara Afrika, tantangan-tantangan yang dihadapi kurang akut, kemungkinan dikarenakan pembangunan sektor yang lebih pelan. Pada Sub Sahara Afrika tantangan terbesar adalah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.



IV. KERANGKA KERJA KELOMPOK BANK DUNIA DAN STRATEGI IFC

Sebagaimana ditunjukkan pada bagian-bagian sebelumnya, minyak kelapa sawit memberikan kesempatan signifikan bagi perkembangan perekonomian, lapangan pekerjaan, dan pengurangan kemiskinan namun juga dapat menyebabkan konsekuensi-konsekuensi lingkungan dan sosial yang merugikan. Melihat terus perkembangan permintaan akan minyak kelapa sawit dan keunggulan-keunggulan komparatifnya dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, terdapat kebutuhan yang mendesak bagi tindakan multipemangku kepentingan secara bersama-sama untuk memperkuat dampak-dampak pembangunan, mengurangi konsekuensi-konsekuensi negatif dan membangun keadaan yang berkelanjutan di seluruh sektor. Masing-masing kelompok pemangku kepentingan memiliki peranan yang penting untuk dimainkan dalam hal ini (lihat Lampiran VI untuk informasi lebih lanjut mengenai pelaku-pelaku sektor Minyak Kelapa Sawit).

Pemerintah dan perusahaan-perusahaan sektor swasta memiliki peran utama. Pemerintah menetapkan kebijakan, , menetapkan kerangka kerja peraturan-peraturan yang pantas dan mekanisme informasi umum yang kuat dan dapat menangani kegagalan-kegagalan pasar. Sektor swasta merupakan sumber utama dari investasi dan lapangan pekerjaan pada sektor tersebut dan, tunduk pada ketentuan-ketentuan peraturan dan kemampuan penegakan, menentukan kebiasaan-kebiasaan industri, termasuk pengangkatan kode etik sukarela. Pembeli besar minyak kelapa sawit dapat secara signifikan memengaruhi kebiasaan-kebiasaan produsen. Organisasi masyarakat umum dapat menyediakan pengetahuan setempat dan keahlian teknis, mendidik masyarakat setempat dan meminta pemerintah dan pelaku-pelaku lainnya bertanggung jawab atas standar-standar nasional dan internasional. Lembaga-lembaga pembangunan bekerjasama dengan mitra-mitra untuk berinvestasi pada program-program sektor publik dan swasta yang dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Forum multipemangku kepentingan termasuk RSPO menawarkan kesempatan-kesempatan bagi peserta-peserta untuk menciptakan suatu tindakan bersama untuk menetapkan standar-standar dan melakukan promosi atas keberlanjutan.

Di negara-negara di mana ada minat keterlibatan, WBG berkomitmen dalam menerapkan Kerangka Kerja ini dan siap sedia untuk mendukung sektor kelapa sawit yang dipimpin oleh Multipemangku kepentingan sektor swasta. WBG mengakui bahwa tindakan-tindakan kolaboratif di antara pemangku kepentingan sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan dan sosial dan beranggapan bahwa hal tersebut dapat ikut serta pada proses tersebut.

A. KERANGKA KERJA KELOMPOK BANK DUNIA

4.1. Pilar-pilar Kerangka Kerja WBG

Sebagai basis dari pengembangan Kerangka Kerja ini, WBG telah mempertimbangkan masukan-masukan yang diterimanya dari berbagai cakupan luas pemangku kepentingan sebagai bagian proses konsultasi global (kebanyakan darinya direfleksikan pada bagian-bagian sebelumnya). Berdasarkan konsultasi-konsultasi ini dan pengalamannya sendiri pada sektor minyak kelapa sawit, WBG telah mengidentifikasi empat pilar yang mana pembangunan yang berhasil pada sektor ini sangat tergantung padanya. Pilar-pilar tersebut adalah:

- Situasi yang kondusif bagi kebijakan dan peraturan yang mempromosikan ekonomi, investasi-investasi lingkungan dan sosial berkelanjutan di dalam sektor;
- Mobilisasi investasi yang berkelanjutan pada sektor swasta pada negara produsen minyak kelapa sawit;
- Pembagian keuntungan dengan para pemilik perkebunan dan masyarakat;
- Aturan-aturan praktik yang berkelanjutan yang dapat diangkat oleh para produsen dan para pembeli minyak kelapa sawit.

Aplikasi dari pilar-pilar ini akan berbeda sesuai dengan negara, sektor dan keadaan proyek begitu juga dengan potensi keterlibatan WBG. Implementasi tindakan-tindakan untuk mendukung pilar-pilar ini adalah kewajiban utama dari pemerintah negara, provinsi, dan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk perusahaan-perusahaan swasta, masyarakat sipil dan masyarakat setempat. Jika diminta, WBG dapat bekerjasama dengan mitra-mitra untuk berkontribusi dalam perencanaan dan penetapan kebijakan-kebijakan yang pantas



dan lingkungan peraturan-peraturan; memberikan pendanaan baik kepada sektor publik maupun sektor swasta untuk mengembangkan sektor tersebut lebih lanjut; memfasilitasi pembagian keuntungan dengan para pemilik perkebunan; dan masyarakat setempat dan mendukung pengembangan kode praktik yang berkelanjutan.

WBG umumnya terlibat melalui pengembangan Bantuan Negara atau Strategi Kemitraan. Strategi-strategi semakin dikembangkan bersama dengan Bank Dunia dan IFC dan ditinjau dan diperbaiki setiap tiga sampai lima tahun. Tunduk pada keinginan pemerintah untuk terlibat dan prioritas pembangunannya, peninjauan dan/atau formulasi baru Bantuan Negara dan Strategi-strategi Kemitraan berfungsi sebagai kesempatan untuk mengembangkan program yang menanggapi keempat pilar dari kerangka kerja minyak kelapa sawit suatu negara.

- **Lingkungan kebijakan dan peraturan.** Mencapai investasi lingkungan dan sosial yang berkelanjutan pada sektor minyak kelapa sawit bisa menantang bila kebijakan memungkinkan dan lingkungan peraturan lemah. Permasalahan mengenai akuisisi tanah, jangka waktu kepemilikan tanah, dan tata kelola hutan, dan hak pekerja, masyarakat dan Penduduk Asli berada pada akar dari kebanyakan permasalahan sosial dan lingkungan di dalam sektor. Di mana kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut ditetapkan, implementasi yang lebih baik atas sistem administrasi tanah, perencanaan penggunaan tanah, penilaian dan peraturan-peraturan dampak lingkungan, peraturan perburuhan, dan penyelesaian konflik dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati, mengurangi perubahan iklim, melindungi hak pekerja dan masyarakat setempat, dan memungkinkan implementasi standar-standar berkelanjutan dan kode praktik-praktik baik (*good practices*). Dalam beberapa peristiwa, membangun kapasitas untuk memperkuat tata kelola yang baik dan mekanisme peraturan dan pertanggungjawaban adalah perlu.
- **Investasi sektor swasta yang berkelanjutan.** Investasi di dalam atau

kerjasama dengan berbagai pelaku sektor swasta sepanjang nilai rantai, dengan menggunakan pendanaan langsung maupun tidak langsung dan layanan konsultasi dapat mendorong keberkelanjutan.

- **Pembagian keuntungan dengan para pemilik perkebunan dan masyarakat.** Minyak kelapa sawit dapat menjadi kontributor yang signifikan terhadap perbaikan penghidupan dan pengurangan kemiskinan pada kebanyakan masyarakat pedesaan dan lebih lanjut mempromosikan model-model lingkungan dan sosial yang berkelanjutan dari pengembangan kelapa sawit yang memperbaiki distribusi keuntungan kepada masyarakat setempat dan para pemilik perkebunan merupakan suatu prioritas. Mengintegrasikan para pemilik perkebunan ke dalam pasar global yang berkembang adalah penting dalam mengatasi kemiskinan. Mengidentifikasi dan menaikan model usaha inklusif, berinvestasi pada infrastruktur yang memungkinkan para pemilik perkebunan untuk mengakses pasar, memperkuat organisasi produsen pemilik perkebunan dan perluasan dan layanan konsultasi, berinvestasi dalam mekanisme inovatif untuk memberikan akses kepada pendanaan adalah penting bagi pembagian keuntungan.
- **Aturan-aturan praktik berkelanjutan.** Pengembangan, penerapan, dan implementasi standar berkelanjutan suka rela dan kode praktik, termasuk sistem sertifikasi, saat didampingi dengan persyaratan peraturan yang melengkapi, adalah cara yang efektif untuk menerapkan perubahan yang menyeluruh pada sektor industri.

Tabel dan paragraf-paragraf berikut ini meringkas peranan dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh WBG dalam mendukung pendekatan multipemangku kepentingan.



Tabel 4: Ringkasan dari kemungkinan Intervensi WBG dibawah Empat Pilar dan hubungannya dengan Masukan dari Konsultasi-konsultasi.

Masukan Pemangku Kepentingan dari konsultasi-konsultasi	Pilar-pilar pengembangan bagi sektor minyak kelapa sawit			
	Kebijakan/peraturan	Investasi Swasta	Pembagian keuntungan	Standar-standar Berkelanjutan
Kebijakan umum /Lingkungan hukum aspek-aspek, termasuk permasalahan tata kelola, permasalahan hak asasi, dan keprihatinan peraturan, khususnya perencanaan penggunaan lahan	Proses perencanaan CAS/CPS Sistem registrasi pertanahan Memperkuat peraturan-peraturan lingkungan Dialog Kebijakan	Menangani kendala-kendala investasi	Dialog Kebijakan Perlindungan hukum dan penegakan pembangunan kapasitas sebagai dukungan atas hak atas tanah dan akses	Dialog Kebijakan Pengembangan dan peningkatan atas akreditasi dan sistem sertifikasi
Keprihatinan lingkungan, termasuk deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, emisi gas rumah kaca, konversi HCV dan lahan gambut	Membangun Penilaian Dampak Lingkungan (<i>Environmental Impact Assessment</i> - EIA) dan kapasitas kelembagaan dan penegakan Membangun basis pengetahuan, laporan GHG, perlindungan hutan dan aset HCV, manajemen pengetahuan	Penerapan Standar-standar Kinerja Kebijakan-kebijakan yang melindungi yang memerlukan sertifikasi Memperkuat kapasitas manajemen lingkungan Bantuan Layanan Konsultasi	Layanan Perluasan termasuk pelatihan manajemen pertanian, RSPO atau sertifikasi yang serupa	Bantuan layanan konsultasi (meningkatkan kapasitas audit setempat)
Permasalahan sosial dan hak asasi mengenai akuisisi tanah dan jangka waktu kepemilikan, hak Penduduk Asli, penyelesaian konflik	Dialog Kebijakan Sistem jangka waktu kepemilikan tanah dan penegakan Mekanisme manajemen konflik Perlindungan Hukum Permasalahan Gender	Program pembangunan masyarakat Bantuan layanan konsultasi Penerapan pencegahan konflik dan resolusi	Program Pembangunan Masyarakat, RSPO, atau sertifikasi yang serupa Dukungan Masyarakat Luas	Bantuan layanan konsultasi yang mendukung keterlibatan masyarakat



Masukan Pemangku Kepentingan dari konsultasi-konsultasi	Pilar-pilar pengembangan bagi sektor minyak kelapa sawit			
	Kebijakan/peraturan	Investasi Swasta	Pembagian keuntungan	Standar-standar Berkelanjutan
		prosedur oleh perusahaan-perusahaan		
Keprihatinan Pemilik perkebunan, termasuk akses kepada pendanaan, pasar-pasar, masukan-masukan, kebutuhan perbaikan pendapatan, akses ke tanah	Dialog Kebijakan, pembentukan plasma atau skema pihak ketiga lainnya	Akses kepada pendanaan melalui perusahaan-perusahaan pengolahan yang lebih besar dan lembaga-lembaga keuangan Asuransi Tanaman Bantuan teknis dan dukungan masukan Penyediaan Infrastruktur Pedesaan	Mempromosikan akses kepada pasar dan harga-harga produsen yang menarik Memperkuat organisasi produsen, skema <i>outgrower</i> pihak ketiga Layanan perluasan dan masukan pertanian Akses ke Pendanaan Mendapatkan perbaikan	Bantuan layanan konsultasi Mendukung para pemilik perkebunan dalam memenuhi standar-standar yang ada (Contoh., sertifikasi kelompok)
Standar-standar dan sertifikasi, termasuk peranan dari RSPO, permintaan akan CSPO	Dialog Kebijakan Pengembangan sistem akreditasi dan sertifikasi dalam mematuhi kerangka kerja yang relevan. Pengembangan standar-standar	Mendukung harmonisasi dan konsistensi dalam penerapan Membantu klien dalam mendapatkan sertifikasi	Mendukung pengembangan standar-standar pemilik perkebunan, sertifikasi kelompok	Keterlibatan Multipemangku Kepentingan Bantuan layanan konsultasi, termasuk dukungan kapasitas kepada RSPO dan standar-standar yang berhubungan

4.1.1. Lingkungan Kebijakan dan Peraturan

Membahas permasalahan kebijakan dan peraturan di dalam kelapa sawit adalah penting. Namun hal tersebut kompleks dan memiliki banyak sisi, yang melibatkan spektrum penuh dari pemangku kepentingan. Dialog, analisis, dan perencanaan bersamaan

dengan pembagian pengetahuan merupakan komponen-komponen kunci. WBG memiliki kapasitas dan pengalaman untuk menangani permasalahan-permasalahan ini dengan memfasilitasi:

Dialog Kebijakan, Analisis, dan Perencanaan Lanjut. Keterlibatan Bank Dunia dengan pemerintah-pemerintah memberikan kesempatan untuk memfasilitasi



dialog mengenai permasalahan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan pada tingkat nasional⁴⁴. Jika pemerintah berusaha untuk menyesuaikan lingkungan kebijakan dan peraturan, Bank dapat membantu melalui kerja analitis dan jasa konsultasi. Atas permintaan mereka, isu-isu sektor kelapa sawit dapat dikaitkan dengan dialog kebijakan dengan pemerintah tuan rumah. Tujuan dari keterlibatan ini dapat mencakup perbaikan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan dan kerangka hukum yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya, dan untuk pekerja, masyarakat, dan hak-hak Masyarakat Adat. pekerjaan analitis tambahan di negara-negara inti juga dapat dimasukkan dalam Bantuan Negara dan siklus perencanaan Kemitraan Strategi, sehingga memberikan rencana awal untuk mengembangkan program yang efektif.

Dialog Umum/Privat. Berkolaborasi dalam area-area tersebut seperti pada diagnosa iklim investasi dan reformasi, Bank Dunia dan IFC dapat mendukung dialog dengan pelaku-pelaku sektor publik dan swasta dan juga mitra lainnya, agar dapat menginformasikan penetapan prioritas strategi pada tingkat nasional. Sebagai tambahan, IFC, dengan koneksi utamanya pada klien-klien di sektor swasta, berada pada posisi yang tepat untuk memberikan masukan kepada pemerintah-pemerintah mengenai kendala-kendala dan insentif-insentif bagi pembangunan sektor swasta.

Pendekatan komprehensif terhadap Permasalahan-permasalahan Hak Properti dan Tanah. Disamping kebijakan yang kuat dan kerangka kerja peraturan, hak properti yang pasti adalah hal yang fundamental untuk meningkatkan insentif setempat akan investasi dan juga melindungi hak-hak dari pengguna yang ada dan meningkatkan produktivitas. Program-program untuk membuat hak atas tanah terjamin, khususnya bagi petani-petani miskin dan masyarakat-masyarakat dan kelompok-kelompok lain yang rentan, telah lama menjadi dorongan utama dari intervensi-intervensi Bank Dunia⁴⁵. Memperbaiki

kejelasan hak-hak akan memperbolehkan orang lebih banyak memberikan pendapat dalam menegosiasikan ketentuan-ketentuan untuk membuat tanah mereka tersedia bagi kelapa sawit dan mengurangi biaya-biaya bagi perusahaan-perusahaan.

Konflik sosial di sekitar perluasan kelapa sawit juga berasal dari tidak jelasnya atau kurang dipahaminya perjanjian kontrak, kurangnya konsultasi, dan terbatasnya pembagian keuntungan dengan masyarakat-masyarakat setempat⁴⁶. Kontrak-kontrak umumnya tidak jelas mengenai ketentuan-ketentuan mengalihkan tanah, remunerasi *outgrower* dan mempekerjakan orang-orang setempat⁴⁷. Mendirikan asosiasi pemilik perkebunan, kejelasan yang lebih besar, dan jalan-jalan bagi penyelesaian konflik dapat menolong untuk menangani masalah-masalah ini.

Tata Kelola Hutan dan Perencanaan Penggunaan Tanah. Tata Kelola Hutan yang lebih baik juga berada pada pusat tantangan untuk mencapai produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. WBG dapat mendukung investasi yang menangani dorongan deforestasi dan degradasi seperti insentif-insentif bagi sertifikasi masyarakat, pengelolaan yang transparan atas lahan hutan publik, memperbaiki tata kelola kehutanan, memperluas kapasitas kelembagaan, dan memfasilitasi alur informasi. Perencanaan penggunaan tanah memerlukan perhatian khusus agar dapat secara jelas menunjuk daerah-daerah HCV yang harus dihindari dalam perluasan produksi kelapa sawit, dan tanah-tanah degradasi yang secara ekonomi pertanian sesuai bagi produksi kelapa sawit dengan infrastruktur yang mencukupi untuk memperbolehkan perluasan yang berkelanjutan. Brazil telah memelopori sistem seperti itu yang dapat dijadikan model bagi negara-negara lain. Sebagai bagian dari kerja sama dengan lembaga pemerintah dalam bidang ini, Bank Dunia dapat menerapkan pengalaman dalam perencanaan penggunaan lahan dan pengembangan kapasitas lokal

menetapkan kebijakan tanah dan reformasi hukum, (2) meningkatkan keamanan dari jangka waktu kepemilikan tanah umum yang ada atau jangka waktu kepemilikan tanah informal, (3) memodernisasikan kebiasaan-kebiasaan administrasi tanah, (4) mencegah atau mengurangi konflik-konflik tanah, dan (5) menangani permasalahan-permasalahan tanah dalam konteks investasi pada pertanian skala besar.

⁴⁶ World Bank 2009

⁴⁷ Colchester dan lain-lain 2006

⁴⁴ Rencana untuk membahas bidang-bidang ini juga dapat membangun analisis yang ada dari Rencana Kegiatan Pertanian WBG 2010–12, inisiatif Doing Business Pertanian, dan program kerja Investasi Pertanian yang Bertanggung Jawab.

⁴⁵ Sebagai bagian Rencana Kegiatan Pertanian, WBG telah mengambil suatu pendekatan komprehensif untuk memperbaiki akses kepada dan keamanan lahan bagi perkembangan pertanian: termasuk (1)



untuk membantu pemerintah dalam mengatur penggunaan lahan untuk memajukan pengetahuan di daerah-daerah kritis.

Komunikasi dan Pembagian Pengetahuan.

Kesulitan-kesulitan dalam berkoordinasi pada sektor kelapa sawit sering kali sebagai akibat dari kurangnya komunikasi dan kurangnya berbagi dan menilai informasi. WBG dapat mengintegrasikan proposal-proposal minyak kelapa sawit menjadi inisiatif-inisiatif pertanahan yang berlangsung pada negara-negara fokus yang terpilih, dan akan bertujuan untuk memperbaiki dialog dan koordinasi antara bagian-bagian yang berbeda-beda (agribisnis, keuangan, tanah, hutan-hutan, lingkungan, hukum, dan sosial) dan di seluruh tingkat pemerintah yang berbeda pada implementasinya. *Assessment tool* Tata kelola hutan WB yang baru-baru saja di kembangkan oleh WB juga dapat diterapkan pada sektor kelapa sawit. Sangat memungkinkan bagi pemangku kepentingan untuk menilai dengan lebih baik atas tata kelola lingkungan dan memformulasikan intervensi-intervensi yang dapat dilakukan dan juga mengawasi kemajuan.

Akhir-akhir ini, berbagai kesulitan terkait sektor kelapa sawit telah timbul, sebagian dikarenakan kurangnya basis pengetahuan yang cukup mengenai permasalahan-permasalahan sektor. WBG akan mencari kesempatan-kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan ini, khususnya di Sub Sahara Afrika, di mana terdapat kekurangan informasi terkini. Pekerjaan analitis yang lebih dalam mengenai permasalahan spesifik seperti tanah dan tata kelola hutan dan hak-hak masyarakat mungkin juga diperlukan.

Penilaian dan Pembangunan Kapasitas.

Penilaian-penilaian dampak sosial dan lingkungan bagi investasi skala besar swasta pada kelapa sawit pada umumnya lemah atau tidak ada. Di mana penilaian diperintahkan dan dilaksanakan, sektor publik biasanya memiliki kapasitas yang sedikit untuk mengevaluasinya atau mengawasi implementasi tersebut. WBG dapat memadukan pembangunan kapasitas bagi lembaga-lembaga publik dan swasta yang beroperasi pada sektor kelapa sawit ke dalam kegiatan-kegiatan WB yang sedang berjalan (contohnya melalui Lembaga Bank Dunia) di mana tepat, dan meningkatkan akses kepada pembagian pengetahuan mengenai sistem pengawasan modern. Program-program perintis yang dirancang secara khusus pada negara-negara produsen kelapa sawit dapat

digali. Juga mungkin terdapat kesempatan-kesempatan bagi IFC dalam mengembangkan usaha ukuran menengah (MSE) bagi persiapan penilaian dampak lingkungan dan untuk jasa penilaian ekosistem keanekaragaman hayati.

4.1.2. Mobilisasi Investasi Sektor Swasta

WBG dapat mendukung pembangunan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan dengan melakukan investasi ke dalam atau kerja sama dengan berbagai klien dan pemangku kepentingan sepanjang nilai rantai, dengan menggunakan pendanaan langsung maupun tidak langsung dan jasa pendamping teknis. Tujuan spesifik akan termasuk kemungkinan investasi produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, pembagian keuntungan dengan masyarakat-masyarakat setempat dan pemilik perkebunan, penerapan kebiasaan-kebiasaan lingkungan dan sosial yang telah diperbaiki seperti yang tercermin pada Pelindung-pelindung dan Standar-standar Kinerja WBG, mempromosikan sertifikasi untuk mendirikan standar-standar berkelanjutan internasional seperti RSPO, dan menambah bagian dari CSPO di pasaran.

Pendanaan langsung dan tidak langsung, bersamaan dengan jasa pendamping teknis yang berhubungan dengan pembangunan sektor swasta, merupakan inti dari kegiatan usaha IFC⁴⁸. Mengacu pada penelitian global dan pengantaran setempat, peranan katalitisnya sebagai pemodal terkemuka, dan pekerjaannya yang diakui sebagai penentu standar lingkungan dan sosial. IFC dapat mempromosikan perubahan dengan cara bekerja dengan perusahaan-perusahaan dari kecil sampai besar pada berbagai segmen ekonomi (produsen, pedagang, pengolah-pengolah dan layanan pendukung) yang berkomitmen pada kebiasaan-kebiasaan berkelanjutan dan memenuhi Standar-standar Kinerja IFC.

⁴⁸ Produk-produk keuangan IFC termasuk pinjaman, saham, pendanaan perdagangan, *intermediated finance*, jaminan dan fasilitas pembagian risiko, kemitraan publik/swasta, dan alat privatisasi dan pendanaan. Hal-hal ini ditingkatkan oleh berbagai macam layanan konsultasi pada area-area seperti *supply chain linkages*, iklim investasi, eko-standar, standar perburuhan, produksi bersih, akses kepada pendanaan dan investasi masyarakat.



4.1.3. Pembagian Keuntungan dengan Pemilik perkebunan dan Komunitas masyarakat

Jika diminta, WBG dapat mendukung identifikasi dan peningkatan model-model bisnis berkelanjutan dan inklusif pada negara-negara yang spesifik yang dapat menguatkan keikutsertaan pemilik perkebunan di dalam sektor minyak kelapa sawit dan memaksimalkan kesempatan-kesempatan dan keuntungan-keuntungan bagi pemilik perkebunan, masyarakat setempat dan penduduk asli. Kebanyakan model-model bisnis tersebut termasuk kemitraan antara perkebunan-perkebunan yang besar dengan pabrik-pabrik dan pemilik perkebunan. Investasi IFC dapat mencakup perusahaan-perusahaan menengah dan besar, sementara WB dapat fokus pada menguatkan organisasi-organisasi pemilik perkebunan. Model-model bisnis dapat tergantung pada struktur-struktur jangka waktu kepemilikan tanah dan lingkungan peraturan, dan juga kebudayaan, pertimbangan lingkungan dan demografik. Dukungan WBG akan berpusat pada model-model bisnis yang mendukung perjanjian-perjanjian kontraktual yang sah dan transparan, pembagian risiko dan keuntungan yang adil, kekayaan gender, dan keberkelanjutan.

Berinvestasi pada infrastruktur. Akses ke pasar yang telah diperbaiki berakibat pada penurunan biaya transaksi dan risiko merupakan hal yang kritis bagi keberhasilan sektor pada kebanyakan area-area. Pada negara-negara kelapa sawit terpilih, WBG dapat mendukung investasi pada fasilitas pelabuhan, telekomunikasi, dan pekerjaan jalan pada daerah-daerah pemilik perkebunan kelapa sawit untuk mendukung akses pada pasar dan mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Dukungan dapat termasuk investasi di dalam infrastruktur baru, peningkatan infrastruktur yang ada dan dukungan mekanisme kelembagaan bagi pemeliharaan infrastruktur.

Memperkuat organisasi-organisasi produsen pemilik perkebunan. WBG memiliki catatan dukungan yang kuat kepada produsen dan organisasi-organisasi masyarakat. Tindakan memperkuat organisasi produsen akan mencakup bantuan teknis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan kekuatan negosiasi, memperkuat kerepresentatifan, dan menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik-konflik. Mendorong untuk mengatur dan

mengembangkan kapasitas mereka setelah mapan merupakan suatu fitur yang menonjol dari program-program yang didukung oleh Bank Dunia, bersama-sama dengan membantu pemerintah untuk mengidentifikasi model-model bisnis yang inklusif yang mendorong peluang untuk pemilik perkebunan. .

Berinvestasi dalam mekanisme pendanaan untuk memberikan akses pendanaan bagi para pemilik perkebunan.

WBG akan menyelidiki kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki akses kepada pendanaan bagi para pemilik perkebunan dan organisasi-organisasi pemilik perkebunan. Pendanaan ini akan bertujuan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian pembagian risiko yang sesuai dalam kolaborasi dengan pemerintah-pemerintah, produsen minyak kelapa sawit besar, pengolah-pengolah, pedagang-pedagang dan lembaga-lembaga keuangan. Fokus dari pendanaan ini adalah untuk membantu pemilik perkebunan, petani-petani dan organisasi-organisasi petani, mengakses baik investasi modal jangka pendek maupun jangka panjang agar mereka dapat meningkatkan kebiasaan-kebiasaan pertanian mereka, meningkatkan pendapatan, dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan lingkungan dan sosial yang baik. Sebagai tambahan, jasa pendamping teknis dapat diberikan kepada lembaga-lembaga keuangan agar memperbaiki proses dan kebiasaan pinjaman mereka, sementara juga mendukung mereka untuk memperkenalkan dan menerapkan penilaian-penilaian risiko lingkungan dan sosial dan mengambil keputusan yang tepat di dalam pemberian pinjaman kepada sektor minyak kelapa sawit.

Memperkuat perluasan pemilik perkebunan dan jasa pendamping teknis.

Pemilik perkebunan perkebunan kelapa sawit memiliki hasil panen yang secara signifikan lebih kecil dibanding perkebunan-perkebunan yang dimiliki oleh negara. Akses lebih baik kepada bibit unggul, pupuk, dan kebiasaan-kebiasaan manajemen akan mengakibatkan meningkatnya pendapatan dan manfaat bagi para pemilik perkebunan. Dukungan WBG dapat fokus kepada memperbaiki relevansi, tanggapan, dan hubungan penelitian dan perluasan. Perluasan dari perpanjangan layanan yang didorong oleh permintaan mempergunakan kapasitas publik dan sektor swasta bersama-sama dengan organisasi-organisasi produsen, perluasan yang menggunakan ICT untuk memberikan para pemilik perkebunan informasi yang lebih baik, dan meningkatkan pemakaian sokongan-



sokongan yang sesuai bagi penerapan teknologi juga memerlukan dukungan.

Mengurangi risiko dan kerentanan. WBG mengembangkan mekanisme inovasi-inovasi seperti *Global Index Reinsurance Facility* IFC, yang mendukung asuransi tanaman panen bagi para pemilik perkebunan di negara-negara berkembang. Bank Dunia juga menawarkan kursus-kursus pelatihan pada pasar-pasar di masa yang akan datang dan melakukan lindung nilai bagi manajemen risiko harga komoditi. Sebagai tambahan dukungan WBG dapat mendukung sistem diversifikasi pertanian di mana kelapa sawit merupakan satu komponen. Sebagai contoh, kebanyakan para pemilik perkebunan di Indonesia menghasilkan baik karet maupun kelapa sawit, sementara para pemilik perkebunan di Afrika Barat menghasilkan kelapa sawit bersamaan dengan tanaman pangan.

Memberikan Intervensi-intervensi yang Berhubungan bagi Keuntungan Para Pemilik perkebunan. Menurut sejarah, konteks utama IFC mengenai dukungan kepada para pemilik perkebunan adalah bahwa mereka terkait pemasok pihak ketiga kepada perkebunan yang lebih besar dan/atau perusahaan pengolah. IFC memiliki kapasitas tambahan melalui jasa pendamping teknisnya yang luas, menawarkan produk-produk yang meningkatkan akses kepada pendanaan (dan mendukung sertifikasi kelompok yang dapat memberikan cara yang lebih terjangkau secara finansial bagi para pemilik perkebunan untuk mendapatkan status bersertifikat).

Memberikan Jasa Pendamping Teknis. Penelitian jasa pendamping teknis lain yang sedang dilakukan oleh IFC dalam mendukung para pemilik perkebunan adalah:

- Meneliti karakter dari para pemilik perkebunan, untuk dapat memahami dengan lebih baik kebutuhan mereka
- Melakukan katalog terhadap kebutuhan masukan dan manajemen kebiasaan-kebiasaan pemilik perkebunan
- Menilai cara-cara potensial untuk meningkatkan akses kepada pendanaan
- Memberikan bahan-bahan instruksi mengenai kebiasaan-kebiasaan manajemen peternakan yang lebih baik, yang akan membantu para pemilik perkebunan menyiapkan diri untuk sertifikasi

Dengan lebih baik memahami sistem produksi pemilik perkebunan dan kebutuhan mereka, IFC akan memiliki informasi lebih baik untuk bekerja dengan sponsor-sponsor untuk merancang proyek-proyek jasa pendamping teknis yang memenuhi kebutuhan dari populasi yang berkembang dari para pemilik perkebunan kelapa sawit. IFC akan menggunakan data-data ini untuk mendirikan suatu *baseline* (dasar) yang lebih akurat bagi sistem pemilik perkebunan yang berbeda agar dapat melacak hasil-hasil pada tingkat pemilik perkebunan. Hal ini dapat termasuk pendapatan dan angka-angka penghasilan yang berhubungan dengan produksi pemilik perkebunan, dan juga kendala-kendala dan pendorong perbaikan pendapatan. *Baseline* dapat dipergunakan untuk mengukur keuntungan-keuntungan yang seharusnya disadari oleh para pemilik perkebunan dari sertifikasi dan mempertimbangkan biaya kepatuhan tambahan. Informasi ini akan membantu menentukan apakah terdapat suatu kasus bisnis bagi penerapan standar-strandar Prinsip-prinsip dan Kriteria RSPO (P&C) atau sertifikasi lainnya oleh para pemilik perkebunan.

4.1.4. Aturan-aturan Untuk Praktik Berkelanjutan

Pengembangan, penerapan dan implementasi standar-standar berkelanjutan dan kode praktik adalah, pada saat diiringi oleh persyaratan-persyaratan peraturan yang melengkapi, suatu cara yang efektif untuk menyebabkan suatu perubahan pada industri secara luas. WBG berkomitmen terhadap produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. WBG akan bekerja dengan mitra-mitranya untuk mendorong perkembangan standar-standar internasional yang tepat dan kode praktik, termasuk sistem sertifikasi berdasarkan standar-standar. Hal ini akan diinformasikan oleh pelajaran dari pengalaman dengan sertifikasi pada sektor-sektor yang berhubungan.

Keprihatinan mengenai dampak-dampak lingkungan dan sosial dari industri minyak kelapa sawit memicu pendirian suatu meja bundar mandiri dari pemangku-pemangku kepentingan yang prihatin untuk menangani permasalahan-permasalahan ini. Selama tujuh tahun pendiriannya, RSPO telah berhasil mengembangkan suatu standar (Prinsip-prinsip dan Kriterianya) dan sistem sertifikasi untuk memastikan bahwa perkebunan-perkebunan minyak kelapa sawit dikelola dengan cara yang berkelanjutan. Jangan berdiri dengan



kemajuan yang telah dibuat, kritikus menunjukkan perlunya untuk RSPO terus memperluas perwakilan pemangku kepentingan dan untuk memperkuat kapasitas audit dan penerapan IFC telah mendukung perkembangan RSPO, terutama melalui Program Keanekaragaman dan Komoditi Pertanian (*Biodiversity and Agricultural Commodities Program* - BACP) yang didanai oleh *Global Environmental Facility*. IFC akan terus terlibat dan memperkuat RSPO melalui keanggotaan, partisipasi pada komite teknis, dan dukungan melalui BACP atau program-program lainnya.

Walaupun sertifikasi independen bagi pengelolaan perkebunan-perkebunan kelapa sawit dapat menjadi jalan yang efektif untuk mempromosikan produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, pada praktiknya persyaratan-persyaratan yang komprehensif pada skema sertifikasi RSPO kemungkinan akan berada jauh di atas kemampuan sebagian besar para pemilik perkebunan, yang karenanya akan dirugikan secara signifikan. Keprihatinan ini ditangani secara aktif oleh RSPO, dan RSPO telah mengajukan penyelesaian-penyelesaian seperti diikutsertakannya para pemilik perkebunan dalam proses sertifikasi bagi perkebunan-perkebunan yang lebih besar atau sertifikasi terpisah bagi kelompok pemilik perkebunan. Revisi standar untuk mengakomodir keprihatinan para pemilik perkebunan saat ini dibahas oleh RSPO.

RSPO telah meminta bantuan kepada IFC dalam mengembangkan suatu mekanisme pendanaan pengembangan pemilik perkebunan dengan menggunakan dana yang diperolehnya dari premium atas sertifikasi premium CSPO minyak kelapa sawit berkelanjutan. IFC menghadapi permintaan ini dengan: (1) mengkatalog kebiasaan-kebiasaan yang ada dan yang ada di masa lampau dari layanan pendanaan yang diberikan kepada para pemilik perkebunan kelapa sawit; (2) menilai cara-cara potensial untuk mendukung layanan keuangan; dan (3) memberikan rekomendasi bagi adanya kemungkinan model-model pendanaan baru, lebih transparan yang relevan bagi Indonesia.

Walaupun RSPO saat ini diakui sebagai satu-satunya sistem sertifikasi yang secara khusus memfokuskan diri pada sektor minyak kelapa sawit, sistem-sistem lain saat ini sedang dikembangkan dan mungkin akan memainkan peranan tambahan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, Jaringan Pertanian

Berkelanjutan (*Sustainable Agriculture Network* - SAN)⁴⁹ telah mengembangkan Standar Pertanian Berkelanjutan (*Sustainable Agriculture Standard*) untuk digunakan dalam sertifikasi berbagai tanaman pertanian di bawah merek dagang "*Rainforest Alliance Certified*", diterapkan sejauh ini kebanyakan di Amerika Latin. SAN baru baru ini menerapkan suatu suplemen untuk mencakup minyak kelapa sawit dan memasukkan suplemen ini ke dalam standar umumnya. Standar SAN berbeda dari RSPO dalam hal SAN lebih rinci di dalam kriterianya dalam berurusan dengan konservasi sumber daya alam dan kesehatan pekerja dan keselamatan, di antara prioritas-prioritas lainnya. Perbandingan informal dari standar ini terhadap RSPO sedang berlangsung, dan diharapkan bahwa sistem-sistem tersebut saling melengkapi.

Dengan meningkatnya minat dalam standar penggunaan biofuel lainnya, seperti *the International Sustainability and Carbon Certification* (ISCC), telah dikembangkan. *Roundtable on Sustainable Biofuels* (RSB) juga saat ini sedang menguji penerapan sistem sertifikasi berdasarkan prinsip-prinsip dan kriteria yang menentukan tingkat tanggung jawab sosial dan lingkungan RSB, bahan bakar nabati bersertifikat harus tercapai.

Selain itu, beberapa negara sedang mengembangkan standar tingkat nasional seperti sistem *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).

IFC akan terus memantau implementasi dari standar dan menentukan apakah mereka memenuhi kriteria 6 Standar Kinerja IFC untuk digunakan dalam keadaan tertentu⁵⁰.

Rantai Suplai. Keprihatinan mengenai rantai suplai hanya dapat ditangani melalui tindakan yang terkonsentrasi untuk memeriksa seluruh rantai suplai untuk mengidentifikasi pada tahap apa permasalahan-permasalahan akan terjadi dan di mana pihak ketiga, seperti WBG, memiliki kekuatan untuk menangani permasalahan-permasalahan ini. Standar Kinerja

⁴⁹ SAN merupakan koalisi dari sembilan organisasi independen konservasi nirlaba: Conservation Desarrollo (Ecuador), Fundacion Interamericana de Investigation Tropical (Guatemala), Fundacion Natura (Colombia), ICADE (Honduras), IMAFLORA (Brazil), Nature Conservation Foundation (India), Pronatura Chiapas (Mexico), SalvaNatura (El Salvador), dan Rainforest Alliance.

⁵⁰ Lihat Lampiran Aneks XIII untuk informasi lebih lanjut akan ketentuan-ketentuan ini.



IFC membutuhkan risiko yang berhubungan dengan rantai pasokan (tenaga kerja biaya rendah, termasuk buruh anak/paksa, dan sumber daya yang sensitif secara ekologis yang dipergunakan oleh proyek) risiko sosial dan lingkungan akan diperiksa dan ditangani sepatutnya. Lampiran XIII menyediakan diskusi lebih lanjut mengenai persyaratan rantai pasokan kunci untuk prosesor dan pedagang.

Walaupun sertifikasi tingkat perkebunan dapat berkontribusi dalam memastikan bahwa minyak kelapa sawit dihasilkan secara berkelanjutan, mekanisme lain dibutuhkan untuk melacak minyak kelapa sawit yang bersertifikat melalui rantai pasokan, kepada pengolah-pengolah dan akhirnya kepada konsumen. Walaupun pada tahap awal, mekanisme dikembangkan untuk dapat melacak minyak kelapa sawit yang tergantung pada kesadaran konsumen/investor (GreenPalm dan Utz Certified sebagai dua contoh).

4.2. Pendekatan Kolaboratif untuk Menerapkan Kerangka Kerja WBG

Sebagaimana dicatat pada bagian-bagian sebelumnya, berbagai strategi negara-negara individu akhirnya ditentukan oleh pemerintah negara tuan rumah. Di mana suatu negara berkeinginan untuk memasukkan minyak kelapa sawit kedalam strategi-strategi nasionalnya, Bank Dunia dan IFC akan berkolaborasi untuk mengimplementasikan suatu pendekatan yang telah direvisi terhadap keterlibatan yang konsisten dengan keempat pilar yang saling berhubungan.

Bentuk dari keterlibatan ini pada masing-masing negara akan tergantung pada negara, kondisi-kondisi sektor dan tingkat proyek, serta prioritas pemerintah tuan rumah.

Seperti pada semua operasi, lingkungan, kebijakan sosial dan perlindungan hukum (lihat Lampiran V mengenai Kebijakan-kebijakan Perlindungan WB), dan diterapkannya proses-proses konsultasi, atau di mana suatu proyek IFC sedang dikembangkan, Standar-standar Kinerja IFC akan berlaku (lihat Lampiran XIII mengenai Standar-standar Kinerja IFC).

Investasi akan konsisten dengan kebijakan nasional yang sesuai, mekanisme hukum, dan peraturan. Di negara-negara di mana kebijakan yang relevan, hukum, dan mekanisme peraturan perlu penguatan, WBG akan berinvestasi dalam perlindungan di bawah kondisi Bank Dunia atau Standar

Kinerja IFC dan persyaratan sertifikasi, yang sesuai, dan dapat dipenuhi. Peningkatan kapasitas untuk memperkuat mekanisme peraturan dan akuntabilitas akan menjadi prioritas dalam keadaan seperti itu dan dalam hubungannya dengan kemauan pemerintah tuan rumah. Pendekatan yang telah direvisi adalah sebagai berikut:

- A. **Penilaian Awal.** Ketika suatu negara ingin mengintegrasikan strategi nasional untuk kelapa sawit, intervensi akan dievaluasi bersama oleh tim dari negara-negara Bank Dunia dan IFC dengan input eksternal yang sesuai untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang disajikan oleh sektor dalam negara yang bersangkutan.
- B. **Pendekatan Terpadu.** WBG berkomitmen dalam memperkuat koordinasi internal dan kolaborasi di tingkat global, regional, dan nasional. Awal penilaian akan membantu mengidentifikasi peluang untuk partisipasi bersama di sektor ini, seperti analisis dari sektor gabungan, analisis situasi negara dalam negara produsen utama atau negara-negara dengan potensi berkembang, serta secara fokus pada inisiatif-inisiatif spesifik analitis pada negara-negara terpilih untuk merintis suatu upaya yang lebih intensif. Dalam merancang pekerjaan sektor bersama ini, WBG akan memperhitungkan permintaan pemerintah, potensi untuk mengantarkan barang-barang publik global, dan produk-produk pengetahuan yang ada dari WBG dan mitra-mitranya. Sebagai tambahan, langkah-langkah gabungan selama siklus proyek bagi standar tugas-tugas WBG akan diperintahkan dan tim kerja gabungan akan didirikan.
- C. **Catatan Praktik yang Baik bagi Staf Pembimbing.** Staf WBG akan dibimbing oleh catatan *best practice* pada seleksi proyek dan rancangan yang menonjolkan keuntungan-keuntungan bagi masyarakat pedesaan, keterlibatan dengan para pemilik perkebunan, pembatasan pengembangan pada habitat-habitat alami dan sistem ketertelusuran dan sertifikasi (bagi investasi pada rantai pasokan).
- D. **Alat Penyaringan Risiko dan Alat Penilaian (bagi IFC).** Di dalam penilaiannya akan investasi baru pada minyak kelapa sawit, IFC akan menggunakan suatu kerangka kerja baru



yang dirancang khusus untuk negara, sektor dan penilaian risiko proyek yang mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang digarisbawahi melalui proses konsultasi.

E. Memperkuat Kolaborasi untuk menggerakkan investasi pada penelitian yang berhubungan dengan minyak kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas, mendorong keberkelanjutan dan pembagian keuntungan.

F. Pengawasan dan Evaluasi untuk dapat melakukan pengukuran dan pelaporan dari prioritas-prioritas di atas.

Intervensi-intervensi khusus di dalam masing-masing daerah ini mengikuti:

4.2.1. Penilaian Awal

A.1 Analisis Situasi Negara bagi Sektor Minyak Kelapa Sawit.

WBG akan melakukan analisis situasi negara yang terfokus pada negara-negara produsen minyak kelapa sawit di mana terlibat permintaan dan kesepakatan.

Terdapat kebutuhan yang jelas akan adanya pendekatan yang lebih strategis dalam menentukan intervensi-intervensi yang pantas dalam dukungan sektor minyak kelapa sawit, khususnya pada tingkat nasional. Oleh karena itu, sebelum melakukan pemberian pinjaman baru terkait minyak kelapa sawit pada negara tersebut (yakni. Proyek-proyek yang belum dipaparkan ke Dewan), IFC dan Bank Dunia akan melakukan Analisis Situasi Negara (*Country Situation Analysis*) (CSA).

Tujuan dari CSA adalah untuk secara cepat dan efisien merangkum pengetahuan terkini dari sektor dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, khususnya mereka yang kemungkinan akan menjadi kendala pembangunan di masa yang akan datang. CSA akan mengambil suatu pandangan holistik pada suatu sektor di dalam negara, pelaku-pelaku yang terlibat, dan peranan mereka di saat ini dan di masa mendatang. Dalam praktiknya, pengetahuan yang cukup tentang sektor minyak sawit dan lingkungan yang kondusif yang ada di banyak kasus, terutama di mana WB sudah memiliki program dan IFC memiliki investasi di kelapa sawit atau sektor lainnya. CSA merupakan alat untuk secara formal menarik semua informasi ini bersama-sama dalam format yang mudah diakses dan praktis.

CSA mungkin merekomendasikan adanya analisis tambahan, dan juga penelitian latar

belakang secara khusus atau penelitian *baseline* yang akan berharga dalam memberikan informasi pekerjaan di masa mendatang. Ini dapat termasuk aplikasi dari Alat Penyaringan Risiko dan Alat Penilaian, yang telah dikembangkan secara khusus untuk tugas ini (dan dibahas secara rinci di dalam bagian Strategi IFC dari laporan ini). Apabila diperlukan dan sesuai di dalam negara tertentu, hal ini juga termasuk penilaian risiko WBG lainnya dan alat manajemen seperti Penilaian Lingkungan Strategis (yang mana WB telah mengembangkan seperangkat alat praktis).

CSA ditujukan untuk menjadi suatu instrumen yang fleksibel dan praktis untuk memberikan suatu ikhtisar dari sektor, mengidentifikasi apa permasalahannya, dan apa yang bisa dilakukan oleh WBG dan mitra lainnya, dan di mana mereka dapat memberikan dampak. Hal ini tidak akan menggantikan perencanaan ketat dan analisis untuk dilakukan sebagai bagian dari proses CAS/CPS, atau bagi penilaian mendalam dari investasi IFC dan proyek-proyek jasa pendamping teknis. Akan berguna untuk menginformasikan proses WB CAS/CPS sehubungan dengan perencanaan bagi program-program untuk menangani kendala-kendala lingkungan, sosial, dan tata kelola yang lebih berjangka panjang mengenai sektor minyak kelapa sawit yang hanya dapat ditangani melalui intervensi-intervensi sektor publik.

4.2.2. Pendekatan Terpadu

B.1 Kolaborasi Sistematis selama Siklus Proyek

Kolaborasi di dalam pekerjaan analitis. Bank Dunia menghasilkan pekerjaan analitis sementara IFC memberikan jasa pendamping teknis bagi klien-klien. Untuk memperbaiki kolaborasi di dalam pelaksanaan program dari tugas-tugas ini, tim kerja Bank Dunia akan mengundang staf IFC sebagai *peer reviewer* pada tahap konsep, dan sebaliknya untuk IFC atas komponen-komponen yang akan dihasilkan (*deliverables*). Hal ini akan mendorong koordinasi hulu dan juga memperbaiki kualitas, berdasarkan pengakuan dari dari perspektif-perspektif yang berbeda yang masing-masing organisasi tawarkan.

Kolaborasi pada operasi investasi. Sementara mengakui adanya pendekatan yang berbeda-beda antara investasi usaha Bank Dunia dan IFC, dan dikarenakan isi spesifik dari usaha-usaha ini akan berbeda dan sangat spesifik secara konteks, baik di dalam kedua usaha investor swasta, produsen pemilih



perkebunan, dan kebijakan serta lingkungan kondusif adalah hal yang penting. Lebih lanjut, pada tahap awal siklus proyek, IFC dan WB akan berhubungan untuk mengidentifikasi kesempatan-kesempatan bagi intervensi yang melengkapi dan membutuhkan peninjauan konsep proyek termasuk staf baik dari IFC maupun WB.

B.2 Inisiatif-inisiatif analitis spesifik pada negara-negara yang dipilih untuk merintis upaya yang lebih intensif.

WBG akan meluncurkan inisiatif gabungan WB-IFC pada negara-negara yang berusaha untuk mempercepat kolaborasi di lapangan. Kandidat-kandidat potensial adalah:

- **Liberia**, di mana IFC telah aktif dalam pekerjaan konsultasi dan dalam peminjaman, dan Bank Dunia memiliki portofolio yang berhubungan dengan pertanian yang semakin luas. Mengikuti CSA sebagaimana dijelaskan di atas, suatu penilaian strategi sub-sektor yang akan dikelola bersama oleh WB dan IFC yang akan memberikan penilaian yang komprehensif mengenai potensi-potensi sektor, minat investor yang ada, kesempatan-kesempatan bagi pengembangan sektor berbasis luas (termasuk skema *outgrower*), risiko lingkungan dan sosial, konflik analisis sensitifitas dan peranan yang diajukan bagi pemberian pinjaman Bank Dunia dan IFC di masa yang akan datang.
- **Ghana**, di mana IFC telah mendukung suatu perkebunan kelapa sawit termasuk ajang *outgrower*. Pada saat yang bersamaan, Bank Dunia menyiapkan usaha baru untuk mendukung pertanian komersil yang akan mengikutsertakan suatu komponen untuk mendukung *outgrower* baru dan yang telah ditingkatkan dan skema kontrak peternakan. Melangkah ke depan, tim proyek akan bekerja sama dengan IFC untuk memeriksa potensi peningkatan baik hubungan usaha yang ada dan usaha baru untuk menambah jejak kaki pembangunan perkebunan yang telah ada.
- Di **Indonesia**, WB saat ini sedang memberikan pendanaan kepada proyek "Pemberdayaan Petani melalui teknologi dan Informasi Pertanian (*Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information - FEATI*)" yang bertujuan mengembangkan suatu permintaan yang terdorong, penelitian

berorientasi pasar, dan sistem perluasan yang menguntungkan petani bagi beberapa tanaman panen. Sebagai tambahan, suatu proyek Penelitian Manajemen Pertanian yang Berkelanjutan dan Penyebaran Teknologi (*Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination - SMART-D*) sedang dipersiapkan dan akan meningkatkan produktivitas penghidupan petani-pemilik perkebunan di Indonesia. Di luar investasi yang sedang berlangsung dan yang direncanakan pada sektor pertanian, WB sedang menggali kesempatan bagi pekerjaan analitis yang dapat meningkatkan hasil-hasil sosial, lingkungan, dan ekonomis dari beberapa tanaman panen termasuk minyak kelapa sawit, kopi, dan cocoa. Pekerjaan ini akan melengkapi program jasa pendamping teknis IFC yang fokus terhadap celah produktivitas para pemilik perkebunan, sertifikasi para pemilik perkebunan yang berkelanjutan dan peningkatan pada kesehatan kerja dan kebiasaan keselamatan pada sektor minyak kelapa sawit.

4.2.3. Catatan Praktik yang Baik bagi Bimbingan Staf

Catatan praktik yang baik bagi investasi (Lampiran VII) akan membimbing staf WBG dalam seleksi proyek dan rancangan. Sebagai tambahan dari merangkum pendekatan yang telah direvisi bagi investasi minyak kelapa sawit, catatan tersebut termasuk kriteria-kriteria berikut ini:

Kriteria 1. Terdapat keuntungan-keuntungan ekonomis yang ditunjukkan bagi populasi-populasi miskin pedesaan: WB akan memberikan prioritas kepada proyek yang menguntungkan para pemilik perkebunan dan terhadap rehabilitasi dari perkebunan-perkebunan tergradasi yang ada (dan perkebunan tergradasi dari pohon-pohon tanaman panen yang dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit) yang menguntungkan para pemilik perkebunan dan petani baru hutan kecil; IFC akan mendukung perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan pada rantai pasokan yang menguntungkan masyarakat pedesaan sementara memberikan prioritas kepada proyek-proyek yang juga menguntungkan para pemilik perkebunan yang menggunakan lahan tergradasi.



Kriteria2. Para pemilik perkebunan dan perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit telah mengakui hak atas penggunaan tanah dan WB mendukung proses-proses dokumentasi dan arbitrase yang dibutuhkan.

Kriteria 3. Dampak langsung dari pembangunan kelapa sawit di habitat alami dan/atau lahan kritis adalah terbatas. Saat hal-hal ini tidak dapat dihindari, langkah-langkah mitigasi diberlakukan. Prioritas akan diberikan untuk merehabilitasi perkebunan-perkebunan yang ada untuk meningkatkan produktivitas mereka. Apabila proyek tersebut mendukung pendirian perkebunan baru, prioritas akan diberikan pada perkebunan-perkebunan yang dikembangkan pada lahan degradasi. Tanaman kelapa sawit yang menghasilkan konversi signifikan atau degradasi stok karbon tinggi atau habitat dengan nilai konservasi tinggi akan dihindari.

Kriteria 4. Sebagai tambahan, di mana kuantitas-kuantitas signifikan minyak kelapa sawit diekspor, sistem-sistem penelusuran dan sertifikasi ditempatkan; apabila tidak ditempatkan, dukungan diberikan bagi pengembangan sistem pertanggungjawaban yang sesuai, dan bagi investasi WB dibatasi pada program-program pemilik perkebunan.

4.2.4. Revisi Penyaringan Risiko dan Alat Penilaian (untuk IFC)

Di dalam penilaiannya mengenai investasi baru minyak kelapa sawit, IFC akan menggunakan seleksi risiko baru yang disesuaikan dan alat penilaian yang mempertimbangkan, negara baru, sektor dan kerangka kerja penilaian risiko proyek yang mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang digarisbawahi melalui proses konsultasi. Rincian lebih lanjut diberikan dalam Lampiran XII.

4.2.5. Kolaborasi yang Diperkuat dengan Pemangku Kepentingan

E.1 Kolaborasi untuk menggerakkan investasi di dalam penelitian

Memastikan bahwa penelitian menanggapi kebutuhan dan keprihatinan dari produsen-produsen kecil dan besar, serta memastikan akses terhadap proyek-proyek penelitian, merupakan peranan penting bagi investasi publik. Melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga penelitian umum termasuk CGIAR, CIRAD, dan EMRAPA, WBG akan mendukung peningkatan investasi pada penelitian yang ditujukan untuk peningkatan produktivitas,

intensifikasi ekologis, dan sistem-sistem peternakan yang efisien serta mendukung penyebaran.

E.2 Kemitraan untuk mendukung keberlanjutan dan pembagian keuntungan

Kemitraan semakin memainkan peranan yang signifikan dalam pengembangan pendanaan dan menawarkan kesempatan-kesempatan yang substansial untuk mendukung sektor ini. Bekerja melalui kemitraan, WBG akan menggerakkan dukungan bagi analisis pengembangan kelapa sawit yang bertanggungjawab secara lingkungan dan sosial dan memperkuat keikutsertaan masyarakat dalam proses-proses perencanaan melalui beberapa program kolaboratif yang berkelanjutan seperti *Forest Investment Program (FIP)* dan *Growing Forest Partnership (GFP)* (Lihat Lampiran IX untuk informasi lebih lanjut).

4.2.6. Pengawasan dan Evaluasi

Tabel 5 merangkum pendekatan pengawasan dan evaluasi yang akan diterapkan oleh WBG untuk mengevaluasi kemajuan dalam mengimplementasikan Kerangka Kerja ini. Tabel ini menjelaskan masing-masing pilar, masukan-masukan dan kegiatan-kegiatan, keluaran-keluaran dan hasil-hasil yang diharapkan, serta bagaimana informasi tersebut akan diungkapkan. Bagi IFC, indikator-indikator level proyek dilacak sebagai sesuatu yang relevan melalui Sistem Pelacakan Hasil Pembangunan (*Development Outcome Tracking System - DOTS*). Indikator-indikator ini menunjukkan bentuk-bentuk yang berbeda dari dukungan yang dapat diberikan IFC dan harus disesuaikan kepada suatu intervensi secara spesifik. Kebanyakan dari indikator-indikator ini secara tegas terpilah secara gender, seperti yang berhubungan dengan lapangan kerja, pelatihan, dan kepemilikan.

Kerangka ini juga akan membantu dalam membimbing tujuan untuk proyek-proyek baru, untuk memastikan bahwa mereka konsisten dalam strategi yang lebih luas. Beberapa indikator dapat diterapkan dalam konteks investasi Bank Dunia dan IFC atau metodologi Penasihat masing-masing dan sistem M&E; kerangka kerja M&E ini menyatukan strategi, namun tidak berarti menyelaraskan indikator-indikator diseluruh WBG karena adanya perbedaan sifat dari kemungkinan intervensi-intervensi tersebut. Kerangka kerja ini mengakui banyak perbedaan dan tingkat intervensi, menyediakan kapasitas yang kuat untuk M&E



dan melaporkan keduanya di tingkat masing-masing proyek dan pada tingkat strategi agregat. Lampiran VIII memberikan penjelasan singkat dari pendekatan WBG untuk pengawasan dan evaluasi.

Tabel 5: Pengawasan dan Evaluasi

Masukan/kegiatan WBG	Masukan dan Pengeluaran	Hasil dan Dampak ⁵¹	Sumber Informasi
Pilar 1: Lingkungan-lingkungan Kebijakan dan Peraturan			
<i>Tingkat Negara WB:</i> Mendukung pemerintah-pemerintah dalam memperkuat lingkungan-lingkungan kebijakan dan peraturan bagi produksi dan penggunaan lahan pada minyak kelapa sawit yang berkelanjutan	Jumlah konsultasi-konsultasi pemangku kepentingan mengenai permasalahan-permasalahan kebijakan dan peraturan pada negara-negara target Jumlah keterlibatan WB dalam mendukung peningkatan peraturan/kebijakan	Jumlah negara-negara target yang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang disetujui seperti penilaian lingkungan dan sosial (E&S) Jumlah peraturan-peraturan yang baru diperbaiki atau ditingkatkan mengenai produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan ⁵² Peningkatan jumlah tanah dengan kejelasan peraturan (contoh., pada penggunaan tanah, hak-hak kepemilikan, dll.)	Dokumen-dokumen CAS/CPS WBG dan Laporan-laporan Penyelesaian
Pilar 2: Mobilisasi Investasi Sektor Swasta yang Berkelanjutan			
<i>Layanan Konsultasi/Investasi IFC:</i> Menggerakkan partisipasi sektor swasta pada produksi minyak kelapa sawit	Jumlah dan volume (\$) investasi IFC pada sektor Jumlah badan hukum yang mendapatkan layanan Konsultasi IFC	Volume pendanaan (\$) yang difasilitasi oleh badan hukum minyak kelapa sawit yang didukung oleh Investasi dan layanan Konsultasi IFC Jumlah produk-produk keuangan uang diluncurkan ⁵³ Jumlah pekerja permanen pada badan hukum minyak kelapa sawit Jumlah MSME pada <i>value chain</i> yang dicapai (hulu dan hilir) Peningkatan nilai dari kontrak SME yang ditandatangani (\$) Jumlah petani-pemilik perkebunan yang dicapai	Laporan Tahunan IFC Ringkasan Informasi Investasi IFC Tingkat Proyek DOTS informasi

⁵¹ Dimana memungkinkan, disagregasi gender akan diteliti untuk hasil dan dampak .

⁵² yang mengatur kepemilikan tanah menggunakan lingkungan risiko termasuk hak adat dll

⁵³ Bagi intervensi melalui FI, secara tematik juga melacak pinjaman yang belum dilunasi dan volume, di mana dapat di terapkan pada penerima manfaat



Masukan/kegiatan WBG	Masukan dan Pengeluaran	Hasil dan Dampak ⁵¹	Sumber Informasi
		(termasuk yang menguasai < 50 Ha) Peningkatan penghasilan petani (\$) Peningkatan pendapatan per Hektar (Metrik Ton /Ha) Pembelian dari Pemasok Setempat (\$)	
Pilar 3: Pembagian Keuntungan dengan Pemilik perkebunan dan Masyarakat-masyarakat			
<i>Proyek Bank Dunia atau IFC:</i> Mendorong pengembangan model-model minyak kelapa sawit yang berkelanjutan untuk meningkatkan distribusi keuntungan kepada masyarakat setempat	Jumlah pemilik perkebunan yang ditargetkan dan kelompok pemilik perkebunan yang dilatih dalam produksi berkelanjutan Jumlah kemitraan strategis dan keterlibatan dengan organisasi masyarakat setempat	Jumlah Pemilik perkebunan yang menerapkan kebiasaan-kebiasaan produksi berkelanjutan ⁵⁴ Peningkatan penghasilan petani (\$) Jumlah penerima manfaat dari Program-program Pengembangan Masyarakat (Bank Dunia and IFC) Jumlah petani-petani yang diuntungkan ⁵⁵ Peningkatan pendapatan per Hektar (Metrik Ton /Ha) dukungan bagi masyarakat-masyarakat setempat (IFC) ⁵⁶	Laporan Penyelesaian Implementasi Bank Dunia Ringkasan Informasi Investasi IFC Tingkat Proyek DOTS informasi
<i>Proyek Bank Dunia:</i> Mengembangkan alat manajemen risiko untuk mengurangi kerugian-kerugian dari volatilitas harga dan cuaca	Jumlah instrumen-instrumen manajemen risiko yang dikembangkan	Jumlah pemilik perkebunan yang menggunakan instrumen-instrumen manajemen risiko yang dikembangkan	Laporan Penyelesaian Implementasi Bank Dunia
<i>Proyek-proyek Bank Dunia dan IFC:</i> Fokus dalam memperkuat organisasi-organisasi produsen pemilik perkebunan	Volume (\$) dari hasil-hasil Pembangunan Masyarakat (IFC) Jumlah target penerima manfaat yang merupakan anggota dari suatu organisasi	Jumlah penerima manfaat dengan akses baru/yang ditingkatkan kepada layanan-layanan dan infrastruktur (IFC) ⁵⁸ Keuntungan bagi para pemilik perkebunan (IFC) ⁵⁹	Laporan Tahunan IFC Ringkasan Informasi Investasi IFC Tingkat Proyek DOTS informasi Laporan Penyelesaian Implementasi Bank

⁵⁴ Penggunaan zat kimia, pupuk yang pantas; perawatan penyangga-penyangga, melindungi hutan-hutan & habitat-habitat, dll

⁵⁵ Jumlah terpisah dari petani-petani yang diuntungkan dari program-program pengembangan masyarakat, dibandingkan dengan indikator Jumlah Penerima Manfaat dari Program-program Pengembangan Masyarakat

⁵⁶ Dihitung dengan angka —dan jenis—dari fasilitas-fasilitas infrastruktur yang dibangun atau di tingkatkan didalam masyarakat setempat, dan dapat dihubungkan kepada volume pembangunan pengeluaran yang berhubungan dengan konstruksi atau pengeluaran terhadap infrastruktur fisik



Masukan/kegiatan WBG	Masukan dan Pengeluaran	Hasil dan Dampak ⁵¹	Sumber Informasi
Mendukung peningkatan akses terhadap pasar-pasar dan infrastruktur	<p>produsen</p> <p>Jumlah teknologi-teknologi baru yang ditunjukkan⁵⁷</p> <p>Pembuatan/penambahan jalan (km) (Bank Dunia)</p>	<p>Peningkatan pendapatan petani (\$)</p> <p>Peningkatan pendapatan per Hektar (Metrik Ton /Ha)</p> <p>Jumlah penerima manfaat yang puas dengan layanan-layanan pertanian (Bank Dunia, IFC)⁶⁰</p>	<p>Dunia</p> <p>Kelompok Evaluasi Independen—Evaluasi Bank Dunia</p>
Pilar 4: Mendukung Penggunaan Kode Praktik yang Berkelanjutan			
<i>Jasa Pendamping Teknis dan Investasi IFC: Mendorong penggunaan Minyak Kelapa Sawit Bersertifikat</i> diantara para klien	<p>Jumlah orang yang dilatih dalam penilaian lingkungan dan sosial</p> <p>Jumlah keterlibatan (sebagai interpretasi nasional) untuk memperkuat atau menerapkan standar-standar yang diakui secara internasional</p> <p>Jumlah <i>workshop</i>, pelatihan, acara-acara, seminar, dll. Termasuk jumlah peserta.</p>	<p>Jumlah klien IFC yang telah diberi sertifikasi atau dalam proses sertifikasi</p> <p>Tanah bersertifikat sesuai standar yang diakui secara internasional (Ha)</p> <p>Langkah-langkah Kinerja Tata Kelola Lingkungan Sosial yang Relevan untuk memastikan sertifikasi atau standar-standar IFC E&S, menggunakan standar indikator-indikator IFC CES⁶¹</p>	<p>Laporan Tahunan IFC</p> <p>Ringkasan Peninjauan Proyek Lingkungan dan Sosial</p>

⁵⁸ Akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan atau pelatihan kejuruan, dan infrastruktur, seperti air, listrik, pembuangan limbah

⁵⁹ Manfaat program pengembangan masyarakat dan peningkatan akses khusus untuk petani kecil

⁵⁷ Dampak-dampak demonstrasi: penggunaan atau pengenalan teknologi baru untuk meningkatkan produksi, keberkelanjutan atau *good practice* dengan objektif untuk mendukung penerapan dan replikasi dari teknologi melalui demonstrasi. Indikator intense target-target replikasi dan observasi pelacakan dari penggunaan diluar kelompok target

⁶⁰ Penerima bantuan, berpartisipasi dalam kursus, lokakarya, dll. Menanggapi survei dan menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dengan pelatihan diterima atau jasa yang diberikan. Pengumpulan data dapat juga mengumpulkan tingkat respons survei jenis kelamin, jika memungkinkan

⁶¹ Termasuk emisi gas rumah kaca, air limbah, pemukiman kembali dan pemulihan mata pencaharian, standar keselamatan dan pekerjaan tangan, klaim tanah dan penyelesaian sengketa, dll



B. Strategi IFC

Keterlibatan IFC dalam sektor minyak kelapa sawit didorong oleh potensinya untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagaimana ditunjukkan di dalam dokumen ini, sektor minyak kelapa sawit dapat memainkan peran yang penting dalam keseluruhan pembangunan ekonomi dari beberapa negara. Mengingat sektor swasta telah dan akan terus menjadi pendorong utama pertumbuhan di sektor kelapa sawit, sebagai badan sektor swasta dari WBG, IFC dapat berperan dalam mendukung dan mengatalisis keterlibatan sektor swasta yang berkelanjutan.

Bagian ini menjelaskan strategi IFC untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari pendekatan WBG secara keseluruhan. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana IFC telah merevisi pendekatan dalam menanggapi rekomendasi yang dibuat oleh Pendampingan teknis Kepatuhannya (*Compliance Advisor/Ombudsman* - CAO) setelah keluhan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil terhadap investasi IFC dalam empat perdagangan minyak sawit pedagang besar dan pengolah (Lampiran X menggarisbawahi rekomendasi CAO dan langkah-langka yang telah diambil oleh IFC). Akhirnya, menanggapi permintaan dari para pemangku kepentingan untuk menjelaskan bagaimana standar dan revisi kinerja lingkungan dan sosial dan praktik IFC melindungi masyarakat yang terkena dampak dan lingkungan.

4.3 Elemen-elemen Utama dari Strategi IFC

Strategi IFC dalam sektor minyak sawit dipandu oleh komitmen WBG yang lebih luas untuk mendukung negara-negara klien dalam meningkatkan kontribusi pertanian terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat miskin, dan kelestarian lingkungan.

Karena IFC merupakan penyedia dana dan konsultasi yang relatif kecil di dalam sektor, IFC akan membuat perbedaan yang terbaik dengan: (1) berinvestasi di daerah yang relatif belum berkembang, seperti di negara-negara miskin atau di daerah perbatasan, di mana proyek memiliki dampak positif yang relatif lebih besar (contoh., melalui pengangkatan kerja langsung atau dengan mendukung pemilik perkebunan) dan di mana akses terhadap modal dibatasi; (2) secara selektif

berpartisipasi dalam mitra kunci dari sektor swasta di seluruh rantai pasokan industri (produsen-produsen, pedagang-pedagang dan pengolah-pengolah) yang mampu memperagakan praktik terbaik dalam kelestarian lingkungan dan sosial masyarakat dan keterlibatan pemilik perkebunan; (3) bekerja dengan inisiatif multi-pemangku kepentingan untuk mengembangkan standar industri sukarela untuk area pembangunan berkelanjutan.

IFC akan menyesuaikan pendekatan menurut konteks negara-negara berikut ini dan akan menggabungkan semua empat elemen dari pendekatan yang lebih luas untuk WBG – penilaian holistik, keterlibatan bersama (jika mungkin), meningkatkan fokus pada pemilik perkebunan, dan risiko prosedur penilaian dan kategorisasi yang direvisi, dalam rangka meningkatkan dampak pembangunan berkelanjutan:

Di negara-negara dengan investasi sektor swasta yang signifikan di kelapa sawit, pendekatan IFC adalah untuk berinvestasi dan memberikan nasihat kepada:

- Pengembangan standar industri-luas untuk investasi berkelanjutan sukarela yang dipimpin oleh multi-pemangku kepentingan (melengkapi kemungkinan keterlibatan Bank Dunia dengan pemerintah untuk memperkuat lingkungan hukum dan peraturan;
- Industri luas dan upaya-upaya tingkat perusahaan untuk membagikan keuntungan-keuntungan ekonomi dari investasi minyak kelapa sawit kepada masyarakat-masyarakat setempat dan para pemilik perkebunan;
- (secara selektif) perusahaan-perusahaan pada nilai rantai minyak kelapa sawit yang berkomitmen untuk menerapkan *best practice* industri bagi kinerja lingkungan dan sosial.

Di negara-negara dengan potensi yang kuat untuk pengembangan sektor kelapa sawit, tetapi dengan investasi swasta terbatas di sektor ini, IFC akan:

- mendukung investasi swasta yang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baik lingkungan internasional, kesehatan dan praktik-praktik keselamatan, yang



memberikan manfaat bagi masyarakat lokal;

- dalam kolaborasi dengan Bank Dunia, bekerja dengan pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang mungkin membatasi investasi swasta di dalam sektor;
- mendukung pengembangan standar industri-luas untuk investasi berkelanjutan sukarela yang dipimpin oleh multi-pemangku kepentingan (melengkapi kemungkinan keterlibatan Bank Dunia dengan pemerintah untuk memperkuat lingkungan hukum dan peraturan);
- mendukung industri-luas dan tingkat upaya perusahaan untuk meningkatkan distribusi manfaat ekonomi dari investasi di kelapa sawit untuk masyarakat lokal dan pemilik perkebunan.

Elemen kunci yang telah membentuk strategi untuk keterlibatan IFC di sektor minyak sawit adalah:

- Dampak potensial pembangunan ditingkatkan melalui keterlibatan yang efektif dengan petani dan masyarakat;
- Meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit dan daya tarik yang terkandung di dalamnya sehubungan dengan potensi alternatif sebagai sarana untuk memenuhi permintaan konsumen dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;
- Konsekuensi dari dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari investasi di sektor ini tanpa adanya kebijakan yang efektif dan lingkungan peraturan;
- Kesadaran dan kemauan perusahaan swasta untuk secara sukarela mengembangkan dan mengikuti standar dan praktik industri E&S yang baik.

4.4. Pendekatan-pendekatan Regional

Bagian ini menggambarkan pendekatan yang akan diambil IFC pada tiga daerah utama penghasil kelapa sawit: Asia Timur dan Kepulauan Pasifik, Afrika Barat, dan Amerika Latin, tunduk kepada minat sektor swasta prioritas pemerintah tuan rumah.

Asia dan Kepulauan Pasifik. Dalam waktu dekat, sektor investasi swasta dalam minyak sawit akan tetap berpusat di Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia, di mana

ada *track record* yang panjang mengenai investasi oleh perusahaan swasta di negara-negara ini, pemerintah mendukung sektor ini, terdapat rantai suplai yang berdiri dengan baik kepada pasar internal dan eksternal, dan ada daerah luas penanaman yang baru yang akan menghasilkan produksi selama beberapa tahun ke depan. Namun demikian, terdapat juga keprihatinan yang dipublikasikan tentang dampak lingkungan dan sosial pada sektor tersebut di negara-negara ini dan pengakuan yang semakin berkembang dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta untuk mengatasi masalah ini. Juga terdapat basis mapan dari para pemilik perkebunan mandiri dan yang didukung di daerah ini, di Indonesia dan Malaysia tapi juga Papua Nugini dan Thailand. Meskipun sejumlah besar pemilik perkebunan telah mendapatkan manfaat dari kesempatan yang diberikan oleh sektor ini, ada peluang yang signifikan untuk meningkatkan produktivitas pemilik perkebunan dan kelestarian lingkungan dan usaha sosialnya. Meskipun pendekatan IFC di setiap negara cenderung bervariasi, prioritas IFC di daerah ini adalah untuk:

- mendukung pengembangan standar industri-luas untuk investasi berkelanjutan sukarela yang dipimpin oleh multi-pemangku kepentingan (melengkapi kemungkinan keterlibatan Bank Dunia dengan pemerintah-pemerintah);
- mendukung industri-luas dan perusahaan-tingkat upaya untuk lebih terlibat dan mendukung pemilik perkebunan;
- secara selektif mendukung perusahaan dalam rantai kelapa sawit yang berkomitmen untuk mengadopsi praktik industri terbaik untuk kinerja lingkungan dan sosial.

Di Indonesia, pendekatan ini konsisten dengan kepentingan yang dinyatakan oleh Pemerintah (yang menginginkan dukungan untuk pemilik perkebunan tetapi tidak melihat kebutuhan pembiayaan dari lembaga pengembangan keuangan untuk perusahaan-perusahaan yang lebih besar) dan oleh beberapa perusahaan sektor swasta. Seperti yang ditunjukkan oleh Kotak 4, IFC telah mengembangkan program Layanan Konsultasi di Indonesia untuk mencari peluang bagi pemilik perkebunan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan, termasuk melalui keterlibatan dengan RSPO dan pemerintah daerah.

Di Papua Nugini, IFC akan menyesuaikan pendekatan untuk mencerminkan tantangan



utama yang dihadapi oleh sektor swasta dalam mengamankan pembiayaan dan oleh pemilik perkebunan untuk pemberdayaan infrastruktur.

Kotak 4: Indonesia: Program Badan Penasihat IFC

Contoh tentang bagaimana strategi IFC dapat diterjemahkan ke dalam program seluruh sektor dapat ditemui di Indonesia di mana IFC sedang melakukan program untuk:

- Mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan produktivitas pemilik perkebunan dibandingkan dengan produksi dan lokasi perkebunan serta mengembangkan solusi ke depan bagi akses pemilik perkebunan terhadap jasa keuangan serta input dan pasar pertanian.
- Melakukan survei tentang prosedur-prosedur terbaik dari pembahasan komoditi para *stakeholder* dan badan-badan lainnya untuk menentukan pendekatan dalam mempercepat penerapan kriteria keberlanjutan bagi pemilik perkebunan sehingga mereka dapat memenuhi syarat sertifikasi.
- Menganalisis kasus bisnis untuk sertifikasi RSPO dengan cara menghitung biaya sertifikasi bagi pemilik perkebunan dan menghitung manfaat ke depan.

Afrika (Sub-Daerah Afrika Barat). Seperti yang tercantum dalam Kerangka Kerja, Afrika memberikan kesempatan besar untuk ekspansi produksi kelapa sawit di masa depan. Pemerintah Afrika seperti Ghana dan Liberia telah menyatakan minatnya untuk mengembangkan sektor ini. Dengan adanya iklim yang sesuai, biaya tenaga kerja rendah, meningkatnya permintaan domestik untuk minyak sawit, dan insentif dari pemerintah, menarik para penanam modal internasional (termasuk perusahaan dari Asia Tenggara). Banyak negara Afrika yang memiliki partisipasi pemilik perkebunan yang signifikan dalam minyak sawit dan ada pula peluang bagi pengembangan model dukungan sektor swasta yang dipimpin oleh para pemilik perkebunan. Ada pula permintaan dan dukungan konsultasi oleh perusahaan swasta yang tertarik untuk berinvestasi dalam sector perkebunan kelapa sawit di banyak negara-negara tersebut. Akibatnya, pendekatan IFC di negara-negara ini kemungkinan akan:

- mendukung investasi swasta yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat (idealnya selaras dengan

dukungan Bank Dunia untuk dukungan kebijakan dan peraturan bagi pemerintah);

- mendukung keseluruhan industri dan upaya di tingkat perusahaan untuk lebih mendukung dan terlibat dengan pemilik perkebunan;
- bekerja untuk mengembangkan interpretasi nasional dari standar sertifikasi yang diakui secara internasional;
- bekerja dengan pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor yang dapat menghambat investasi swasta di sektor ini (menyeimbangkan dengan kemungkinan keterlibatan Bank Dunia dengan pemerintah untuk memperkuat lingkungan hukum dan peraturan);
- mendukung investasi Selatan-Selatan.

Kotak 5: Investasi IFC dan Proyek Layanan Konsultasi di Ghana

Pekerjaan IFC saat ini di Ghana adalah contoh bagaimana investasi IFC dan badan penasihat bekerja sama untuk meningkatkan hasil pembangunan. IFC memiliki sejumlah US\$12.5 juta investasi di Ghana Oil Palm Development Company Ltd. ("GOPDC")

Proyek tersebut membantu GOPDC memperluas daerah operasinya, serta meningkatkan permintaan dari lebih dari 7.000 pemilik perkebunan untuk memasok FFB. Belajar dari pengalaman investasi IFC dan kerjasama dengan GOPDC, Badan Penasihat IFC saat ini sedang mengembangkan suatu proyek yang dapat menyimpulkan interpretasi nasional dari prinsip-prinsip dan kriteria RSPO, menguji prinsip-prinsip ini, dan mengembangkan kapasitas pemilik perkebunan lokal untuk mengimplementasikan prosedur terbaik dan memperoleh sertifikasi. Kerja Badan Penasihat IFC akan menguntungkan pemilik perkebunan yang memasok GOPDC dan pemilik perkebunan di seluruh negeri. Selain itu, proyek ini akan menjadi contoh untuk mengembangkan interpretasi nasional serupa di negara-negara Afrika Barat lainnya.

Amerika Latin dan Karibia (LAC). Seperti negara-negara di Afrika, beberapa negara Amerika Latin yang sedang mengejar pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak nabati menarik perusahaan Asia dan Eropa untuk berinvestasi di sektor ini. Seperti di Afrika, tantangan dan kesempatan sangat bervariasi di tiap negara dan keterlibatan IFC harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Risiko lingkungan dan sosial dapat tinggi di negara-negara seperti Brazil, sementara Guatemala



memiliki lahan luas yang terdegradasi (dulu digunakan untuk menggembalakan ternak). Berbeda dengan banyak negara Afrika, negara-negara di Amerika Latin tidak memiliki tradisi keterlibatan pemilik perkebunan di sektor ini. Perusahaan swasta telah menyatakan perlunya pembiayaan di wilayah tersebut dan juga dukungan terhadap praktik lingkungan dan sosial. Akibatnya, pendekatan keseluruhan dari IFC di daerah tersebut kemungkinan:

- mendukung investasi swasta yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan manfaat bagi masyarakat setempat, termasuk pemilik perkebunan (idealnya selaras dengan dukungan Bank Dunia untuk dukungan kebijakan dan peraturan bagi pemerintah);
- bekerja untuk mengembangkan interpretasi nasional terhadap standar-standar sertifikasi internasional yang dikenal secara internasional;
- bekerja untuk mengembangkan interpretasi nasional standar sertifikasi yang diakui secara internasional;
- bekerja dengan pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor yang dapat menghambat investasi swasta di sektor ini (menyeimbangkan dengan kemungkinan keterlibatan Bank Dunia dengan pemerintah untuk memperkuat undang-undang lingkungan dan peraturan); dan
- mendukung investasi Selatan-selatan

4.5. Dampak Pembangunan

IFC akan berusaha memaksimalkan dampak intervensi dengan mengejar strategi fokus yang mempertimbangkan konteks negara dan kondisi di sektor ini.

Walaupun sumber klien tradisional IFC terdiri dari perusahaan besar dan menengah, sumber tersebut memprioritaskan keterlibatan dengan perusahaan yang mampu mendukung dan berhubungan dengan UKM, termasuk pemilik perkebunan di sektor minyak sawit. IFC telah melakukan studi untuk membantu klien merancang kegiatan di bidang ini (Lampiran XI merupakan rangkuman rekomendasi kunci dari studi ini pada bulan Juli 2010 mengenai apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan swasta untuk meningkatkan taraf hidup pemilik perkebunan kelapa sawit) dan telah mengembangkan berbagai macam produk informasi untuk membantu klien di daerah tersebut. IFC akan menggunakan produk ini

dan layanan konsultasi terkait untuk membantu mewujudkan tujuan pembangunan di tingkat proyek, sector, dan negara sebagai berikut:

Pendampingan teknis tingkat proyek: IFC lebih lanjut mengembangkan kapasitasnya sebagai jasa pendamping teknis untuk mendukung klien yang terlibat dengan pemilik perkebunan di sektor minyak sawit. Bantuan IFC di daerah ini diharapkan dapat mencakup peningkatan produktivitas pemilik perkebunan dengan mengembangkan materi pelatihan dan pendekatan melatih pelatih untuk membantu pemilik perkebunan mengadopsi praktik-praktik pertanian yang lebih baik. Bantuan ini juga dapat mendukung pelatihan bagi pemilik perkebunan dan lainnya dalam rantai pasokan untuk memperbaiki praktik yang terkait dengan lingkungan dan sosial, terutama melalui penyerapan dan penerapan standar yang sesuai (dengan pandangan terhadap ketahanan operasi yang meningkat, memperluas akses terhadap pasar dan/atau pasar premium). IFC juga akan mencari peluang untuk membangun kapasitas institusi keuangan lokal untuk meningkatkan pinjaman mereka kepada pemegang kecil dan meningkatkan praktik manajemen risiko di sektor kelapa sawit, termasuk identifikasi serta pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang lebih baik.

Pendampingan teknis tingkat sektor: Pada tingkat sektor, kerja Badan Penasihat IFC terutama mencakup dukungan terhadap inisiatif multilateral (seperti RSPO) untuk pengembangan atau interpretasi nasional terhadap standar sukarela dalam bidang industri untuk investasi berkelanjutan. Inisiatif *stakeholder* membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berkembang dan mereka memiliki keterbatasan yang hanya dapat diatasi dengan dedikasi dari semua kelompok *stakeholder*. IFC telah menjadi anggota RSPO sejak tahun 2005, dan telah aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja berikut: (i) Komite Teknis Keanekaragaman Hayati; (ii) Penanaman Baru Kelompok Kerja (partisipasi berakhir); (iii) Kelompok Kerja GHG; dan (iv) Satuan Kerja Pemilik perkebunan. IFC juga aktif dalam mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai proyek untuk mendukung RSPO, seperti melalui interpretasi nasional, atau dengan mempercepat akses bagi pemilik perkebunan.

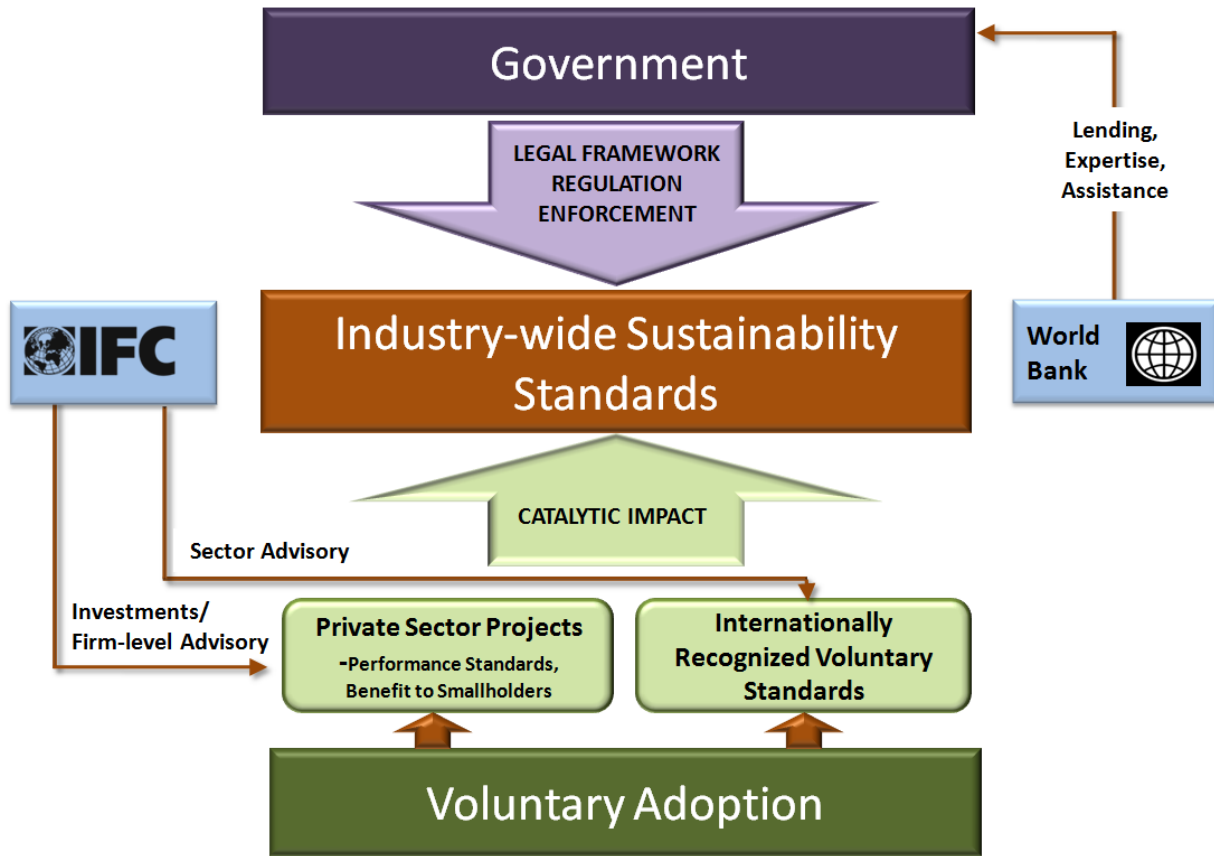
Seperti ditunjukkan dalam Gambar 2 di bawah ini, IFC yakin bahwa pengembangan standar industri sukarela dapat melengkapi standar kinerja IFC sendiri dan perubahan kebijakan



serta peraturan di tingkat pemerintah. Mereka dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang kepedulian kunci lingkungan dan sosial dan mempercepat penerapan pengaman oleh perusahaan-perusahaan terkemuka dalam industri ini.

Pengalaman IFC sendiri adalah bahwa perusahaan-perusahaan yang memilih untuk mendapatkan sertifikasi yang diakui secara internasional lebih mampu mematuhi standar IFC lingkungan dan sosial.

Gambar 2: Dua Pendekatan Terpisah Untuk Meningkatkan Standar



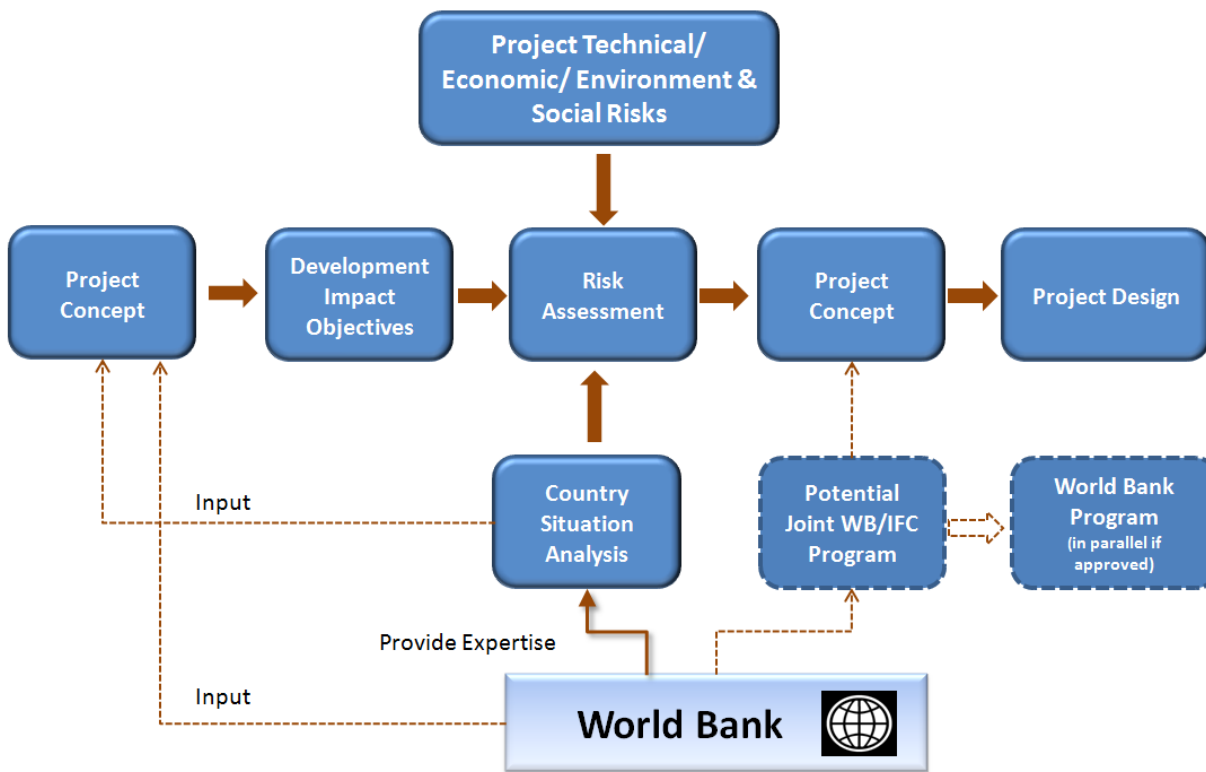
IFC mengukur kemajuannya dalam mencapai tujuan pembangunan di tingkat sektor menggunakan indikator rinci pada Tabel 5 dari bagian Kerangka Kerja. Tujuan pembangunan akan diukur berdasarkan basis proyek dengan proyek. Efek keseluruhan dari program IFC akan tergantung pada jenis pendanaan proyek-proyek IFC dan juga angka-angkanya.

4.6. Investasi dan Pendekatan Pendampingan Teknis IFC yang Diperbarui

Keterlibatan investasi IFC biasanya dipicu oleh kebutuhan dan kepentingan sektor swasta dalam pembiayaan IFC. Gambar 3 merupakan rincian revisi pendekatan IFC setelah menyatakan minatnya. Pendekatan ini mempertimbangkan rekomendasi dari CAO IFC setelah audit tahun 2009 dan masukan dari proses konsultasi.



Gambar 3: Proses Persetujuan Konsep Proyek IFC Sederhana



Analisis Dini Situasi Negara (CSA)

Mengikuti penunjukan minat yang serius dari klien sektor swasta untuk investasi IFC, IFC akan terlibat dengan Bank Dunia untuk melakukan analisis awal bersama kunci peluang dan risiko di tingkat sektor/negara (seperti yang ditunjukkan sebelumnya dalam dokumen, analisis tersebut juga dapat dipicu oleh kepentingan yang potensial dalam membiayai Bank Dunia). Dalam situasi tertentu, kerja Badan Penasihat IFC dapat mendahului investasi IFC dan dapat melibatkan analisis negara dan sektor untuk menentukan bagaimana kerja Badan Penasihat IFC dapat mempromosikan standar pembangunan berkelanjutan dengan baik. Kerja Badan Penasihat IFC yang telah direncanakan di Indonesia merupakan contoh dari hal ini. Untuk potensi investasi IFC, analisis bersama akan mempertimbangkan hal-hal berikut dan membantu WBG dalam mengembangkan keterlibatan yang telah diusulkan sebelumnya dalam sektor:

- kemampuan proyek untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di dalam negeri di tengah kondisi industri dan

negara-negara/sektor di lapangan (termasuk dampak dari rantai persediaan);

- faktor peraturan/kebijakan, jika ada, yang dapat membatasi kemampuan proyek untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan di sektor ini;
- kesempatan bagi proyek untuk memberikan manfaat lebih kepada masyarakat lokal dan pemilik perkebunan; dan
- kesempatan akan adanya dukungan WBG terpadu di tingkat negara/sektor/proyek dalam rangka memperluas manfaat pembangunan dan/atau memperkuat kinerja lingkungan dan sosial.

Berdasarkan hasil dari proses penilaian, WBG akan membuat keputusan berikut sehubungan dengan proyek dan sektor:

- kondisi di mana IFC dapat memilih untuk berpartisipasi dalam proyek; dan
- penawaran oleh WBG kepada klien atau pemerintah lokal/nasional untuk meningkatkan proyek/sektor dalam memberikan kontribusi terhadap



pembangunan berkelanjutan (dalam kasus-kasus tertentu, kelayakan proyek WBG paralel akan mempengaruhi apakah Konsep Proyek disetujui atau tidak).

Berdasarkan kajian awal ini, IFC dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pembiayaan proyek hingga keterbatasan kebijakan regulasi yang dijumpai telah dicari solusinya atau telah dikemukakan.

Memastikan Kelestarian Lingkungan dan Sosial

CSA awal akan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa IFC memiliki pemahaman penuh tentang dampak lingkungan dan sosial yang mungkin ditimbulkan oleh proyek. IFC akan menggunakan Pemindai Risiko dan Alat Pengukuran (lihat Lampiran XII) untuk membantu dalam proses ini. Alat ini dikembangkan oleh IFC untuk mempertimbangkan masukan dari badan penasihat pengusaha minyak sawit global dan rekomendasi dari CAO. Alat ini menggunakan pendekatan baru untuk memastikan bahwa penelaahan terhadap proyek IFC yang diusulkan untuk mempertimbangkan konteks negara dan sektor serta isu-isu lingkungan dan sosial yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari proses konsultasi, termasuk: (1) hak pakai tanah, alokasi, dan manajemen, (2) masalah lingkungan (penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, pemanfaatan gambut, gas rumah kaca, tanah HCV), (3) isu sosial dan hak asasi manusia (pembebasan lahan dan kepemilikan, Masyarakat Adat, resolusi konflik, masalah ketenagakerjaan, dan pengurangan kemiskinan); (4) keprihatinan pemilik perkebunan, dan (5) manajemen rantai pasokan, terutama di bidang ketertelusuran dan sertifikasi. Selain mengandalkan pengetahuan internal Bank Dunia dan IFC tentang kondisi negara dan sektor, alat ini dapat mengambil informasi dari sumber-sumber luar yang sama pantas untuk menginformasikan penilaian IFC tentang proyek, sektor, dan negara.

Penilaian Risiko E&S Dini

Untuk dapat disetujui, semua proyek harus memenuhi kriteria konsep standar IFC yg berhubungan dengan nilai retur finansial dan ekonomi, kelayakan teknis, integritas sponsor, tata kelola perusahaan, dan pengungkapan isu-isu E&S serta indikator dampak pembangunan. Selain menilai risiko keuangan, ekonomi, teknis, kriteria integritas, dan kepemimpinan proyek, proyek ini juga akan

diberi penilaian risiko rendah, sedang dan tinggi dalam kaitannya dengan isu E&S tergantung pada penilaian risiko awal. Penilaian akan menggunakan pendekatan sebagai berikut. Sistem Penilaian akan tergantung pada kemungkinan suatu peristiwa buruk terjadi dan tingkat persepsi isu E&S. Hanya proyek-proyek dengan probabilitas rendah dari setiap kejadian buruk yang signifikan dari E & S yang diklasifikasikan rendah. Klasifikasi risiko ini pada gilirannya merupakan kontribusi besar untuk proyek kategorisasi lingkungan IFC. Tergantung pada kondisi negara, sektor, dan proyek, proyek-proyek dalam rantai pasokan minyak sawit cenderung dikategorikan sebagai Kategori A atau kategori B yang akan membuat proyek tersebut tunduk pada *due diligence* yang lebih tinggi dan kondisi lingkungan dan sosial di mana risiko dijumpai.

Untuk proyek risiko menengah dan tinggi, hal ini akan 'memicu' prosedur tambahan dan tindakan yang nantinya akan dilakukan staf IFC. Langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan adalah sebagai berikut:

- **Langkah 1:** Menentukan Tingkat Risiko: Proyek ini akan dinilai berisiko rendah, sedang, atau tinggi.
- **Langkah 2:** Pemicu Tingkat Risiko: Tergantung pada tingkat risiko, proyek harus menjalani langkah tertentu sebelum konsep persetujuan formal, yang mungkin termasuk pra-penilaian, konsultasi dengan pemerintah, dalam konsultasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat, dan kolaborasi antara Layanan Badan Penasihat IFC dan staf Investasi.
- **Langkah 3:** Kriteria keputusan untuk meneruskan: Konsep proyek akan disetujui berdasarkan kriteria yang ditetapkan, yang akan mencakup dampak dari proyek-proyek pembangunan, kemampuan proyek untuk memenuhi Standar Kinerja IFC, dukungan dari pemerintah, dan dukungan dari pemangku kepentingan terkait.
- **Langkah 4:** Desain Proyek: IFC akan bekerja dengan klien untuk memastikan bahwa dampak pengembangan proyek meningkat (khususnya sehubungan dengan manfaat bagi pekerja, masyarakat, dan pemilik perkebunan), risiko lingkungan dan sosial berkurang, sistem pemantauan berjalan seimbang, dan ada keterlibatan efektif dengan para pemangku kepentingan.



Pelatihan Staf. Untuk memastikan bahwa strategi tersebut diikuti, semua investasi dan staf E & S yang mungkin terlibat dalam sektor minyak sawit akan menjalani kursus pelatihan meliputi (1) Kerangka Kerja WBG Dalam Sektor Minyak Sawit dan Strategi IFC, (2) tujuan pengembangan IFC di sektor minyak sawit, (3) Catatan Panduan Prosedur Terbaik untuk staf WBG, (4) Analisis Situasi Negara, (5) alasan penggunaan Alat Penyaringan Risiko dan Penilaian (*Risk Screening and Assessment Tool*), dan (6) prosedur yang harus diikuti dalam investasi sektor pengolahan minyak sawit.

4.7. Menangani Masalah Lingkungan dan Sosial

IFC yakin bahwa pendekatan penilaian dan penyaringan risiko sektor minyak sawit di tingkat negara/sektor di satu sisi, dan Standar Kinerja perusahaan di tingkat investasi di sisi lain memberikan perlindungan yang memadai dalam kaitannya dengan masalah lingkungan dan sosial penting yang muncul selama proses konsultasi. Jika kepatuhan pada persyaratan ini tidak dipenuhi, IFC tidak akan melakukan investasi. Ringkasan singkat dari pendekatan IFC tercantum di bawah ini dan rincian Standar Kinerja lebih lanjut dari yang bersangkutan akan dicantumkan dalam Lampiran XIII. Berkas lengkap Standar Kinerja dapat diakses di <http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvSocStandars>

Kategorisasi E&S IFC: Selain merevisi pendekatan kategorisasi setelah adanya audit CAO⁶², IFC mengadopsi penyaringan risiko dan alat penilaian baru untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko E&S. Hal ini akan menginformasikan kategorisasi awal, dan *due diligence* lain berikutnya, dan pada akhirnya tindakan perlindungan atau mitigasi yang dapat dilakukan oleh klien IFC di sektor ini. Dalam praktiknya, proyek dalam rantai pasokan minyak sawit cenderung harus diklasifikasikan sebagai Kategori A atau B yang akan membuatnya tunduk pada tingkat *due diligence* yang lebih tinggi.

⁶² Hal ini melibatkan perubahan dalam proses kategorisasi untuk perdagangan atau fasilitas modal kerja yang melibatkan satu komoditas, satu-transaksi perusahaan. Akibatnya, investasi mungkin akan dikategorikan sebagai Kategori A atau B.

Sebagai bagian dari tinjauan berkelanjutan dari PS, IFC mengusulkan untuk memperkenalkan sistem kategorisasi risiko untuk perantara keuangan berdasarkan risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan pinjaman mereka. Tergantung pada situasi negara dan sektor, kontribusi pembiayaan IFC untuk pelanggan di bidang kelapa sawit melalui perantara keuangan mungkin akan diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi atau menengah bawah pendekatan ini.

Kecukupan Sistem E&S Klien: Melalui Standar Kinerja 1-nya, IFC mengharuskan klien untuk mengevaluasi proyek-proyek mereka untuk melihat dampak aktual dan potensial E&S menggunakan persyaratan Standar Kinerja IFC yang relevan⁶³. Lebih lanjut, IFC mengharuskan klien untuk mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen sosial dan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk menghindari, menghadapi, atau mengkompensasi dampak E&S yang relevan.

Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Nilai Konservasi Hutan Tinggi: Standar Kinerja 6, Konservasi, Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, meliputi persyaratan klien yang terkait dengan keanekaragaman hayati. Salah satu persyaratan adalah untuk mengukur keanekaragaman hayati dan merancang sebagai habitat yang telah diubah, habitat alami, atau habitat kritis. Selain itu, nilai-nilai keanekaragaman hayati, seperti spesies yang hampir punah dan terancam punah, spesies endemik, dan spesies jangkauan terbatas dan spesies yang berpindah-pindah dievaluasi sebagai bagian dari penilaian ini. Penting bagi spesialis keanekaragaman hayati yang kompeten dari berbagai disiplin ilmu teknis terkait untuk terlibat. PS6 mengintegrasikan konsep kawasan HCV, dan persyaratan klien untuk HCV tersebar di dalam daftar persyaratan untuk habitat alami, habitat kritis, dan layanan ekosistem.

Pada proyek di dalam habitat kritis, IFC menggunakan analisis berbasis risiko yang berakibat adanya keputusan go atau no-go. Analisis ini akan mempertimbangkan tingkat

⁶³ Standar Kinerja 2 sampai 8 mencakup tenaga kerja dan kondisi kerja, pencegahan dan pemberantasan polusi kesehatan masyarakat, keselamatan dan keamanan, pembebasan tanah dan pemindahan paksa; konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, Penduduk Asli, dan warisan budaya.



kekritisannya, sejauh mana dampak dapat merugikan, dan kemampuan klien untuk mengurangi dan menghadapi masalah. Portofolio investasi IFC bersifat luas, dan dampak yang berhubungan dengan industri bervariasi secara signifikan. Sebagai contoh, IFC tidak akan mendukung setiap proyek perkebunan kelapa sawit yang akan mengkonversi karbon lahan gambut bernilai tinggi⁶⁴, karena nilai jasa lingkungan mereka (komponen habitat kritis). pertimbangan serupa akan berlaku untuk nilai karbon tinggi, hutan tropis primer yang belum pernah terjamah.

Masyarakat dan Penduduk Asli yang terkena Dampak: IFC memiliki kebutuhan dan perlindungan spesifik dalam hubungannya dengan masyarakat dan Penduduk Asli yang terkena dampak. Jika proyek menimbulkan dampak lingkungan atau sosial yang signifikan bagi para korban, atau mungkin menimbulkan dampak negatif pada komunitas Masyarakat Adat yang terpengaruh, proyek harus menerapkan bentuk konsultasi yang lebih baik yang digambarkan sebagai *Free, Prior, and Informed Consultation* (FPIConsultation)⁶⁵. Selain itu, berkenaan dengan masyarakat adat, jika klien ingin mencari proyek mengembangkan sumber daya alam atau komersial di lokasi perkebunan dengan memanfaatkan adat atau tradisi oleh Penduduk Asli, jika proyek konstruksi memerlukan relokasi Penduduk Asli, atau jika proyek komersial memanfaatkan sumber daya budaya asli, klien diminta untuk mengimplementasikan beberapa bentuk konsultasi yang lebih baik, yang disebut *Good Faith Negotiation*, selain FPIConsultation. Ketika klien perlu terlibat dalam proses FPIConsultation, sebagai bagian dari *due diligence* IFC akan melakukan proses

⁶⁴

Kelompok kerja IEG RSPO telah merekomendasikan bahwa sertifikasi RSPO hanya akan mungkin untuk konversi lahan baru untuk kelapa sawit, ketika ada cadangan karbon adalah 35 ton atau kurang per hektar. anggota voting Maret 2011 RSPO belum menyetujui untuk memodifikasi prinsip-prinsip dan kriteria untuk membuat pernyataan ini. Kami akan melanjutkan diskusi dengan RSPO dan pekerjaan lain untuk mengukur apa yang merupakan "karbon-nilai-tinggi."

⁶⁵ IFC sedang mempertimbangkan untuk menurunkan jumlah menjadi 25,000 ton CO₂ ekuivalen per tahun dan meminta klien untuk menunjukkan bahwa rancangan proyek dilakukan seefisien mungkin melalui penentuan standar, jika ada, sebagai bagian dari pemeriksaan standar kinerja yang terus berlangsung.

penentuan *Broad Community Support*. IFC meninjau dokumentasi untuk klien dan melibatkan pemangku kepentingan yang terkena dampak, menjamin bahwa proses keterlibatan klien masyarakat adalah salah satu yang melibatkan *Free, Prior, and Informed Consultation* dan memungkinkan partisipasi masyarakat dan mengarah pada dukungan masyarakat luas sebelum menyajikan rancangan persetujuan kepada Dewan IFC. Menindaklanjuti persetujuan proyek, IFC akan terus mengawasi proses keterlibatan klien masyarakat sebagai bagian dari proyek pengawasan.

Rantai Pasokan: Standar Kinerja 1 menyatakan bahwa dampak yang terkait dengan rantai pasokan akan dipertimbangkan jika sumber daya yang digunakan untuk proyek sama sensitifnya secara ekologis atau di mana biaya buruh yang rendah merupakan faktor dalam daya saing pasokan yang tersedia. Kebijakan Keberlanjutan menyatakan bahwa kadang klien tidak memiliki kontrol atas pihak ketiga, yang dapat merupakan pemasok, dan bahwa keduanya harus bekerja sama, jika memungkinkan. Bagi pemasok utama yang menyediakan sumber daya hayati, barang atau materi penting untuk fungsi bisnis inti, klien harus memastikan bahwa habitat alami dan/atau habitat kritis tidak terpengaruh secara signifikan dan klien harus memberikan preferensi sistem pembelian dari pemasok yang paling sedikit menunjukkan konversi signifikan. Praktik ini berguna bagi klien untuk melakukan latihan pemetaan untuk menentukan rantai pasokan. Untuk pasokan yang tumbuh di daerah sensitif secara ekologis, klien harus meminta pemasok untuk menghindari/meminimalkan dampak negatif terhadap habitat alam dan habitat kritis. Jika klien IFC tidak dapat memenuhi persyaratan karena kurangnya pengaruh, klien diharapkan dapat mengganti pemasok, bilamana memungkinkan.

Jika klien IFC bersumber dari perkebunannya sendiri, IFC membutuhkan klien untuk melaksanakan Standar Kinerja 6 (Keanekaragaman Hayati) di dalam fasilitas tersebut. Jika klien adalah pembeli dari mayoritas pemasok rantai pasokan, IFC harus menggunakan pengaruh untuk menciptakan efek hasil yang positif. Kompleksitas muncul ketika klien tidak memiliki kontrol atas rantai pasokan – atau jika klien diposisikan dalam rantai nilai setelah komoditas digabungkan, sehingga mustahil untuk mengidentifikasi pemasok. Dalam kasus seperti di atas, jika risiko dianggap tinggi dan tidak dapat



diminimalisir, IFC mungkin tidak berani berinvestasi. IFC akan memerlukan klien untuk menangani masalah anak dan kerja paksa dalam rantai pasokan seperti yang disyaratkan dalam Standar Kinerja 2.

Box 6: Terbuka terlebih dahulu dan Kesepakatan yang Berdasarkan informasi

Selama pemeriksaan berjalan untuk Standar Kinerja IFC, IFC telah mengusulkan mengadopsi persetujuan terbuka, didahulukan dan diinformasikan dalam draft Versi 2 dari 7 Standar Kinerja pada Masyarakat Adat. Keputusan akhir tentang hal ini tunduk pada persetujuan dari Dewan. Bahasa proyek membutuhkan *FPIC Consent* dalam keadaan khusus ketika proyek: (i) terletak pada atau memanfaatkan sumber daya alam komersial pada subjek lahan untuk properti tradisional dan / atau di bawah penggunaan adat masyarakat adat, (ii) memerlukan pemukiman kembali masyarakat adat dari tanah tradisional atau adat, atau (iii) melibatkan penggunaan komersial sumber daya budaya masyarakat adat. IFC telah berusaha untuk mengklarifikasi definisi persetujuan yang menyatakan bahwa *FPIC Consent* ditetapkan melalui negosiasi dengan itikad baik antara klien dan lembaga sesuai dengan budaya yang mewakili masyarakat adat. Klien akan mendokumentasikan proses disepakati bersama antara klien dan masyarakat adat dan bukti perjanjian antara para pihak sebagai hasil dari negosiasi.

Emisi Gas Rumah Kaca (GHG):

IFC akan meninjau emisi gas rumah kaca yang berhubungan dengan proyek minyak sawit terkait. Untuk proyek-proyek yang diharapkan atau sedang memproduksi CO₂ lebih dari 100.000⁶⁶ ton per tahun, IFC mengharuskan klien untuk menerapkan pilihan yang hemat biaya dan layak secara teknis dan finansial untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berhubungan dengan proyek dalam proses desain dan operasi proyek. Langkah-langkah ini akan mengintegrasikan prinsip-prinsip produksi yang lebih higienis ke dalam desain

⁶⁶ IFC sedang mempertimbangkan untuk menurunkan jumlah menjadi 25,000 ton CO₂ ekuivalen per tahun dan meminta klien untuk menunjukkan bahwa rancangan proyek dilakukan seefisien mungkin melalui penentuan standar, jika ada, sebagai bagian dari pemeriksaan standar kinerja yang terus berlangsung.

produk dan proses produksi dengan tujuan konservasi bahan baku, energi, dan air.

Ada peluang khusus dalam perawatan kelapa sawit dan penyimpanan seperti pengumpulan metan dari kolam pengolahan air limbah. Selain itu, IFC meminta klien untuk melaporkan emisi proyek setiap tahunnya, serta emisi tidak langsung yang digunakan oleh proyek yang berhubungan dengan produksi energi di luar lokasi. IFC tidak akan mendukung perkebunan kelapa sawit yang mengkonversi lahan gambut bernilai karbon tinggi atau hutan tropis primer⁶⁷.

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan metodologi yang telah disetujui untuk mengevaluasi dan mengukur cadangan karbon dan menetapkan batas.

Persyaratan Sertifikasi: Untuk klien yang terlibat dalam produksi primer dan industri pertanian terkait, IFC akan memerlukan komitmen lebih lanjut dengan klien tersebut untuk mendapatkan sertifikasi independen dengan standar yang sesuai bagi praktik kelangsungan proyek, di mana standar tersebut dipakai. Standar Kinerja IFC 6 dan Catatan Panduan 6 memberikan panduan tambahan pada elemen yang menentukan sistem sertifikasi yang sesuai (dalam hal ini lebih dari satu sistem sertifikasi yang dapat diterima oleh IFC). Persyaratan ini diringkas dalam Lampiran XIII.

4.8. Keterlibatan IFC dengan Perusahaan Swasta dalam Rantai Nilai Minyak Sawit

Sektor swasta adalah pemain dominan dalam industri kelapa sawit. Sektor ini meliputi perusahaan perkebunan besar, pemilik perkebunan, pengolah, pedagang, dan pembeli/pengguna minyak kelapa sawit, selain beragam perusahaan pendukung dalam penyediaan input dan jasa. Menilik dari berbagai kemungkinan, manfaat pembangunan sektor kelapa sawit di masa depan akan terus datang dari investasi swasta di sektor ini. Jika dilakukan dalam lingkungan dan investasi sosial yang berkelanjutan, investasi tersebut

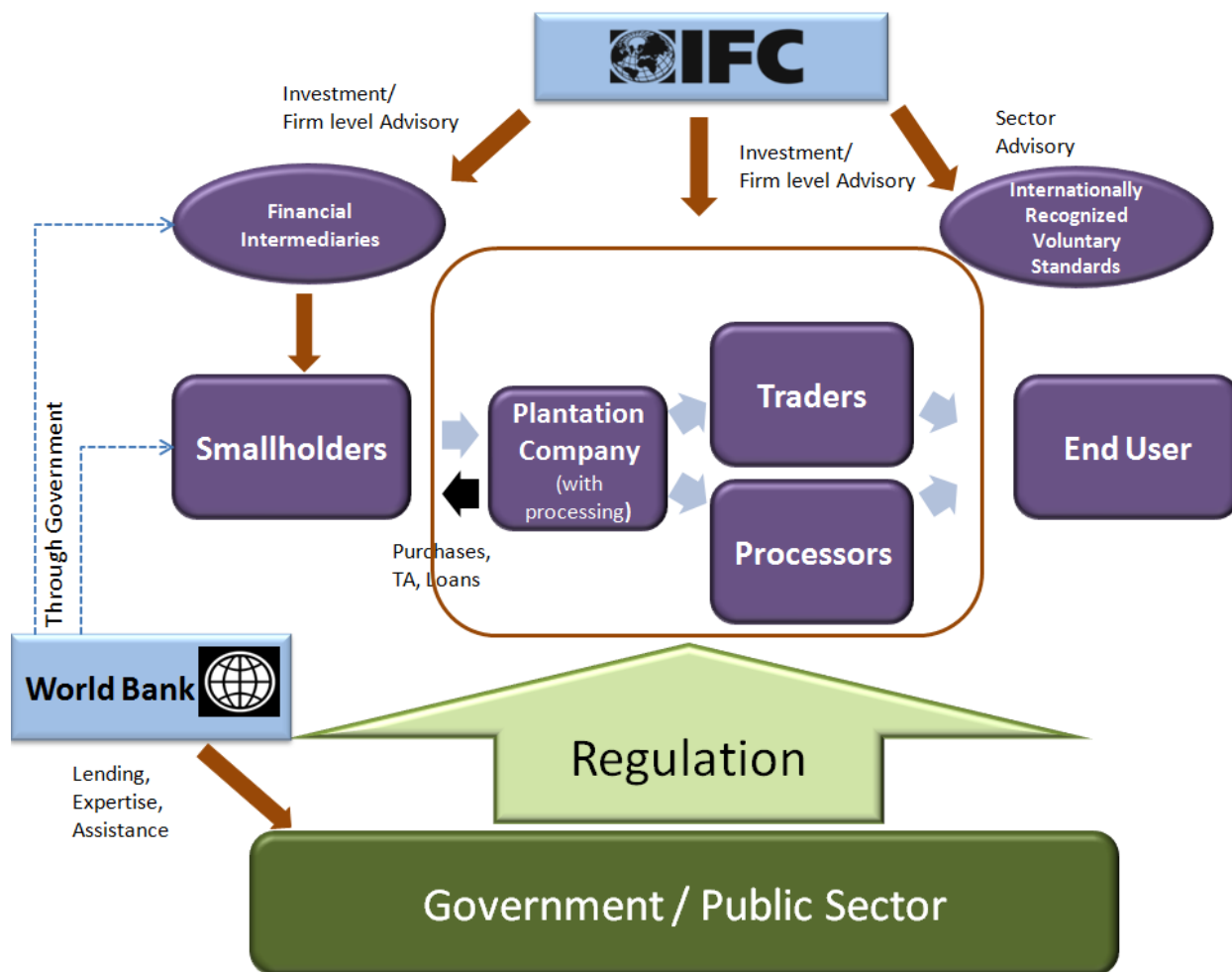
⁶⁷ Perubahan yang diusulkan untuk PS3 akan membutuhkan klien untuk membuat perhitungan gas rumah kaca dari proyek mereka, tidak peduli apa ukuran itu dan akan mencakup proyek-perubahan yang terjadi dalam konten tanah karbon atau biomassa di atas tanah dengan menggunakan metodologi yang diakui secara internasional dan praktek-praktek yang baik (metodologi tersebut disediakan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim).



dapat memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan

pengurangan kemiskinan di sejumlah negara berkembang.

Gambar 4: Target Investasi IFC dalam Rantai Nilai Kelapa Sawit Sederhana



IFC bisa terlibat langsung dengan perkebunan atau kilang atau pengolah minyak sawit, dan pedagang. Sesekali, IFC juga dapat mendukung perusahaan kelapa sawit melalui perantara keuangan. IFC biasanya member pengaruh pada pemilik perkebunan melalui investasi dalam badan hukum dan menawarkan insentif serta dukungan bagi klien untuk melibatkan pemilik perkebunan dan masyarakat lokal. Perkebunan dan pemilik perkebunan adalah 'hulu' dari rantai pasokan, sementara kilang, pengolah, dan pedagang umum adalah bagian 'hilir'.

Perusahaan Hulu dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan investasi bisnis yang menciptakan lapangan kerja, infrastruktur lokal, memperbaiki praktik pertanian, dan manfaat bagi pekerja

perkebunan dan masyarakat lokal serta meningkatnya praktik lingkungan dan sosial. Perusahaan Hilir dan perantara keuangan dapat memberikan manfaat bagi pemilik perkebunan yang tidak terkait dengan manfaat perusahaan hulu dan juga dapat membantu dalam meningkatkan praktik-praktik pertanian, lingkungan, dan sosial.

IFC akan berusaha untuk mendukung perusahaan sektor swasta dalam rantai nilai kelapa sawit:

- Melakukan investasi produktif yang berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- Mendukung pemilik perkebunan dan masyarakat lokal sebatasnya;



- Melakukan investasi pada lahan terdegradasi atau lahan di mana risiko E&S dapat dihindari atau dikurangi;
- Berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan daerah dan mematuhi Standar Kinerja IFC;
- Berkaitan dengan perusahaan-perusahaan hulu, berkomitmen untuk mendapatkan sertifikasi yang diakui oleh dunia bisnis internasional;
- Berkaitan dengan perusahaan hilir, memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menilai risiko lingkungan dan sosial dalam rantai pasokan mereka dan bahwa mereka berkomitmen untuk memenuhi Standar Kinerja IFC;
- Berkaitan dengan Perantara Keuangan, memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menilai risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan investasi mereka dan bahwa mereka berkomitmen untuk mematuhi Standar Kinerja IFC bagi Perantara Keuangan.
- Mengadopsi praktik industri terbaik untuk terlibat dengan pemilik perkebunan;
- Mendukung penyediaan bantuan teknis kepada pemasok perkebunan;
- Membantu untuk memperluas basis pemilik perkebunan;
- Mendukung pengembangan strategi perusahaan untuk meningkatkan keberlanjutan operasi, termasuk penilaian risiko dan perencanaan serta pelaksanaan rantai pasokan;
- Membantu merancang proyek-proyek pengembangan masyarakat berbasis perusahaan (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain)
- Membantu klien dalam mengidentifikasi peluang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam desain dan operasi proyek mereka.
- Membantu klien dalam mengidentifikasi dan mengintegrasikan REDD + kegiatan dalam desain proyek

Tambahan IFC: Selain menyediakan pembiayaan untuk berbagai jenis perusahaan, IFC akan berusaha untuk membantu mereka dalam bidang-bidang berikut yang sesuai:



LAMPIRAN

- Lampiran I: Strategi Negara dan Siklus Proyek Bank Dunia
- Lampiran II: Tinjauan tentang keterlibatan stakeholder dan proses konsultasi
- Lampiran III: Produksi dan Perdagangan Minyak Nabati Utama
- Lampiran IV: Pengalaman Grup Bank Dunia di Sektor Kelapa Sawit
- Lampiran V: Pelaku Sektor Minyak Kelapa Sawit
- Lampiran VI: Kebijakan Pengamanan Bank Dunia
- Lampiran VII: Menerapkan Pengamanan Bank Dunia dan Standar Kinerja IFC:
Sebuah Catatan *Best Practice* bagi Staf WBG
- Lampiran VIII: Pendekatan WBG dalam Pengawasan dan Evaluasi
- Lampiran IX: Contoh Kemitraan yang Sedang Berjalan dalam Mendukung Kelangsungan Proyek
- Lampiran X: Rekomendasi Penasihat Kepatuhan dan Tanggapan IFC
- Lampiran XI: Meningkatkan Taraf Hidup Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit: Peranan Sektor Swasta
- Lampiran XII: Alat Pemeriksaan dan Penilaian Risiko IFC
- Lampiran XIII: Kerangka Kerja Kelangsungan IFC: Aplikasi Masalah Lingkungan dan Sosial dalam Proyek Kelapa Sawit



Lampiran I: Strategi Negara dan Siklus Proyek Bank Dunia

1. STRATEGI BANK DUNIA

Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Strategi Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan visi jangka panjang suatu negara. Laporan ini disusun oleh pemerintah negara yang berpendapatan rendah dengan berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat madani dan sektor swasta. Ulasan ini mengetengahkan tujuan kebijakan makroekonomi, struktural, dan sosial.

Ulasan ini juga mengemukakan kebutuhan pembiayaan eksternal negara guna memenuhi tujuan tersebut, seperti pinjaman dan hibah dari Bank Dunia dan donor lainnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan. Bank Dunia dan lembaga donor lainnya menunggu untuk membantu dengan memprioritaskan dan menargetkan negara-negara ini.

Beberapa negara telah menggunakan Strategi Penanggulangan Kemiskinan guna menghadapi iklim investasi mereka dan menetapkan tindakan pembinaan atas pengembangan sektor swasta, atau mengadakan rencana memperbaiki tata kelola dan menurunkan tingkat korupsi. Banyak negara memusatkan pada masalah dengan menghadapi sektor pertanian dan kawasan pedesaan, dan menekankan kebutuhan investasi dalam bidang jasa utama, khususnya implementasi strategi kesehatan dan pendidikan.

Bank Dunia memberikan pelatihan dan bantuan teknis serta keuangan untuk menunjang rancangan dan strategi penanggulangan kemiskinan nasional. Misalnya, Bank Dunia membantu negara-negara untuk meningkatkan analisis kemiskinan, manajemen belanja umum, dan evaluasi jasa. Bank Dunia juga menawarkan Kredit Strategi Penanggulangan Kemiskinan, pinjaman berprogram tahunan, untuk menunjang implementasi strategi ini.

Baik *International Development Association* (IDA) dan *International Monetary Fund* (IMF) dari Bank Dunia mewajibkan dibuatnya Laporan Strategi Penanggulangan Kemiskinan bagi negara-negara berpendapatan rendah untuk menerima bantuan keuangan dengan

biaya rendah dari Bank Dunia (melalui IDA) dan IMF (melalui Pengentasan Kemiskinan dan Fasilitas Pertumbuhan).

Strategi Pendampingan Negara. Strategi Pendampingan Negara – dalam beberapa hal juga disebut Strategi Kemitraan Negara atau Strategi Bantuan Bersama – mengetengahkan program selektif mengenai dukungan Grup Bank Dunia untuk negara tertentu. Strategi ini dikembangkan oleh staf Bank Dunia dalam beberapa pertemuan dengan pejabat pemerintah, berkonsultasi dengan pihak berwenang negara, organisasi masyarakat madani, mitra pembangunan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Hal ini merupakan titik awal visi pembangunan jangka panjang negara itu sendiri dengan mempertimbangkan keuntungan komparatif Grup Bank Dunia dalam lingkup aktivitas donor lainnya. Strategi ini didesain untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi di antara mitra pembangunan di suatu negara.

Strategi Pendampingan Negara mencakup diagnosis komprehensif –yang ditarik dari kerja analisis Bank Dunia, pemerintah, dan/atau mitra pembangunan lainnya mengenai tantangan pembangunan yang dihadapi negara itu, termasuk jumlah, tren, dan penyebab kemiskinan. Strategi Pendampingan Negara mengidentifikasi bidang utama di mana bantuan Grup Bank Dunia dapat menimbulkan dampak terbesar terhadap penanggulangan kemiskinan. Dalam diagnosisnya, Strategi Pendampingan Negara mempertimbangkan kinerja portofolio Bank Dunia di negara tersebut, kelayakan pinjaman negara tersebut, keadaan pembangunan kelembagaan, kapasitas implementasi, tata kelola, dan masalah sektoral dan mendasar lainnya. Dari penilaian ini, tingkat dan komposisi dukungan keuangan, konsultasi, dan/atau teknis Bank Dunia terhadap suatu negara akan ditentukan.

Untuk melihat jejak implementasi program Strategi Pendampingan Negara, Strategi Pendampingan Negara memfokuskan diri pada peningkatan hasil. Ini mencakup kerangka target dan indikator yang jelas guna mengawasi WBG dan kinerja negara dalam mencapai hasil yang ditetapkan.



2. SIKLUS PROYEK BANK DUNIA

Bagaimana Kerja Siklus Proyek

1. Strategi Pendampingan Negara

Bank Dunia mengusulkan layanan keuangan, konsultasi, dan teknis untuk membantu negara-negara mengidentifikasi prioritasnya dan mencapai tujuan pembangunan utamanya.

6. Evaluasi

Setelah Peminjam menyelesaikan proyek, *Independent Evaluation Group* (IEG) dari Bank Dunia mengukur hasil atas sasaran awal dan menilai apakah hasil proyek dapat dipelihara secara jangka panjang atau tidak. Selanjutnya sejumlah proyek diteliti secara intensif dalam laporan evaluasi dampak secara rinci.

5. Implementasi dan Penyelesaian

Pada akhir periode pinjaman atau pencairan kredit (antara 1-10 tahun), laporan penyelesaian yang mengidentifikasi hasil proyek, masalah dan pelajaran yang didapat disampaikan oleh staf operasional kepada Dewan Direksi Bank Dunia sebagai informasi.

2. Identifikasi

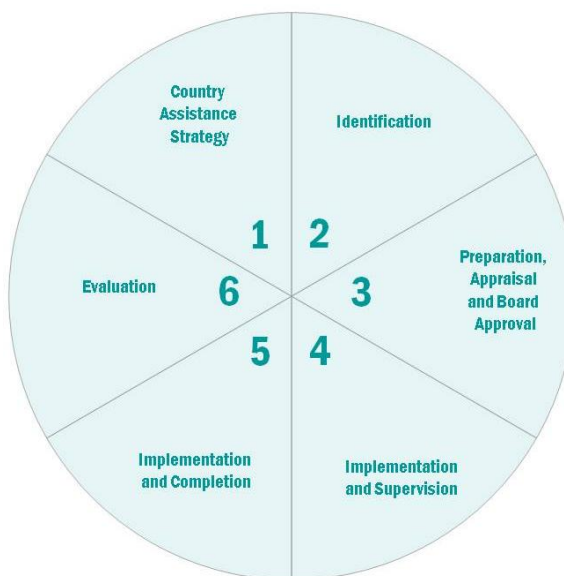
Gagasan untuk menciptakan perubahan yang berarti dibahas di tahap ini. Peminjam dan wakil Bank Dunia mempertimbangkan sasaran pembangunan dan dampak proyek, risiko, alternatif, dan agenda.

3. Persiapan, Penilaian dan Persetujuan Dewan

Dengan nasihat dan bantuan keuangan dari Bank Dunia, Peminjam melakukan kajian dan menyusun rincian dokumentasi proyek. Bank Dunia akan menilai aspek ekonomi, teknis, kelembagaan, keuangan, lingkungan dan sosial dari proyek tersebut. Apabila Bank Dunia dan Peminjam sepakat atas ketentuan pinjaman atau kredit, proyek tersebut disajikan kepada Direksi Bank Dunia untuk disetujui.

4. Implementasi dan Pengawasan

Peminjam mengimplementasikan proyek, mengadakan kontrak melalui proses lelang umum dengan mengikuti petunjuk pengadaan Bank Dunia. Staf Bank Dunia secara berkala mengawasi proyek guna memastikan bahwa hasil pinjaman digunakan untuk tujuan yang dimaksud dan dengan memperhatikan ekonomi, efisiensi, dan efektifitas tujuan tersebut.



Lampiran II: Gambaran Proses Konsultasi



Berkonsultasi dengan pakar dari luar guna menciptakan proses yang terpercaya, memasukkan kapasitas teknis eksternal ke dalam proses tersebut; memeriksa pelajaran yang diperoleh dari proses konsultasi lintas Grup Bank Dunia dan di tempat lain.

Menyusun **database pemangku kepentingan yang memiliki sekitar 2.500 nomor kontak.**

Membuat situs web interaktif khusus www.ifc.org/palmoils strategy.

Makalah diskusi oleh pakar dari luar menentukan lingkup masalah yang luas dan spesifik yang dihadapi sektor kelapa sawit secara global dan merumuskan masalah utama untuk dibahas dengan pemangku kepentingan mengenai kesepakatan di kemudian hari bagi Grup Bank Dunia.

Mengadakan pertemuan dengan **Grup Penasihat Luar** yang mewakili berbagai pemangku kepentingan, untuk memberikan sumber lain dari masukan pakar untuk proses tersebut.

Memasang susunan organisasi Grup dan Kerangka Acuan di situs web.

Mengadakan konsultasi pemangku kepentingan mengenai masalah utama dalam sektor kelapa sawit di **Washington DC, Medan, Pontianak, Jakarta, San Jose, Accra, dan Amsterdam**

Sekitar **350 pemangku kepentingan dari 30 negara** ikut serta mewakili dalam sektor swasta, pemerintah, organisasi masyarakat madani, komunitas terkait, Masyarakat Adat, perkebunan rakyat, bank-bank, peneliti, dan donor.

Pengembangan konsep Kerangka Kerja berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan. Bidang utama yang diidentifikasi dalam konsultasi sebelumnya - **kebijakan dan lingkungan peraturan; investasi sektor swasta; bagi hasil perkebunan serta komunitas; dan tata cara praktik berkelanjutan-** mendukung pendekatan usulan.

Mengadakan **konsultasi elektronik** dengan **282 peserta dari 51 negara** dan *multi-stakeholder* global yang bertemu di **Frankfurt dengan 59 peserta dari 14 negara** mengenai rancangan kerangka tersebut.

Tim merevisi konsep Kerangka Kerja untuk menanggapi dan memasukkan komentar dan masukan pemangku kepentingan dan diungkapkan untuk periode komentar hari terakhir

Tim mengumpulkan komentar akhir pemangku kepentingan dalam dokumen final dan disajikan kepada kelompok manajemen Bank Dunia .



Lampiran III: Produksi dan Perdagangan Utama Minyak Nabati

Per Negara ('000 ton)

	Production			Disappearance			Net Exports ¹		
	2008/09	2009/10	2010/11	2008/09	2009/10	2010/11	2008/09	2009/10	2010/11
Soybean Oil									
Argentina	5,914	6,445	7,525	1,425	1,912	2,242	4,704	4,400	5,355
Brazil	6,120	6,440	6,350	4,274	5,050	5,220	1,905	1,394	1,195
China	7,314	8,703	10,420	9,486	10,435	12,130	-2,411	-1,520	-1,930
EU	2,314	2,250	2,268	2,779	2,380	2,543	-394	-150	-250
India	1,287	1,265	1,415	2,300	2,710	2,720	-1,058	-1,498	-1,198
USA	8,503	8,870	8,609	7,378	7,235	7,773	954	1,492	1,082
Total	35,695	38,671	41,544	35,869	38,087	41,306	9,122	9,082	9,377
Rapeseed Oil									
Canada	1,679	1,868	2,104	395	400	425	1,416	1,609	1,760
China	4,700	5,158	5,219	4,853	5,478	5,909	-444	-715	-590
EU	8,472	9,370	9,090	8,679	9,665	9,565	-312	-330	-350
India	2,058	2,230	2,325	2,095	2,252	2,347	-41	-22	-22
USA	497	475	531	1,280	1,293	1,491	-801	-816	-970
Total	20,463	22,311	22,283	20,125	22,088	22,592	2,416	2,660	2,679
Sunflower Oil									
Argentina	1,342	1,035	1,450	378	387	392	853	760	1,050
EU	2,335	2,435	2,360	3,158	3,234	3,303	-864	-830	-900
India	319	255	283	731	852	730	-583	-550	-450
Russia	2,565	2,505	2,193	1,918	1,991	1,926	765	530	280
Ukraine	2,632	2,603	2,632	395	219	259	2,098	2,600	2,370
Total	11,872	11,462	11,531	10,673	11,134	10,964	4,588	4,678	4,583
Palm Oil									
China	0	0	0	5,618	6,320	6,977	-6,117	-6,349	-6,949
EU	0	0	0	4,993	5,024	5,388	-5,247	-4,990	-5,250
India	50	50	50	6,475	6,750	7,350	-6,867	-6,400	-7,200
Indonesia	20,500	21,275	23,450	4,677	4,685	4,935	15,949	16,685	18,060
Malaysia	17,259	17,764	18,297	3,229	3,697	3,800	14,438	14,280	14,850
Thailand	1,345	1,720	1,750	1,250	1,485	1,650	148	118	118
Total	43,702	45,416	48,234	42,440	45,065	47,987	34,573	35,487	37,520
COMBINED	111,732	117,860	123,592	109,107	116,374	122,849	50,699	51,907	54,159

Note: 1. Exports minus imports (except for world totals, which are exports). A negative number means a country is a net importer.

Sources: LMC estimates; Malaysian Palm Oil Board; Oil World; Solvent Extractors' Association; USDA.



Lampiran IV: Pengalaman Kelompok Bank Dunia di Sektor Minyak Kelapa Sawit

Negara	Jumlah Total Yang Dilaksanakan (juta, \$)*
Benin	4.6
Burundi	35
Kamerun	118.4
Kongo, Republik Demokrasi	9
Pantai Gading	53.1
Ghana	43.6
Indonesia	618.8
Liberia	12
Malaysia	383.2
Nigeria	451.5
Panama	19
Papua Nugini	100.6
Total	1848.8

*Sebagian besar proyek benar-benar memfokuskan pada perkebunan kelapa sawit, namun ada beberapa yang mencakup hasil panen lainnya seperti kelapa, karet dan kopi. Selain itu, terdapat beberapa proyek yang dalam jumlah kecil berkontribusi terhadap sektor minyak sawit.

Gambaran Investasi Bank Dunia

Sejak 1965, Bank Dunia (IBRD/IDA) telah melaksanakan sekitar US\$2 milyar untuk 45 proyek di sektor kelapa sawit di 12 negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia Tenggara. Banyak proyek yang berdiri sendiri memfokuskan pada perkebunan kelapa sawit, sementara proyek lainnya mencakup hasil panen seperti karet, kelapa, kopi dsb. Sebagian besar proyek kelapa sawit dilaksanakan pada tahun 1970an dan 1980an. Banyak dari proyek tersebut dilakukan lagi dan ditindaklanjuti di negara-negara tersebut. Dilihat dari segi wilayah, proyek tersebut banyak dilakukan di Afrika Barat dan Asia Timur dengan hanya satu proyek dilaksanakan di Amerika Latin selama periode ini. Tiga

proyek tersebut sekarang ini sedang berjalan, sedangkan sisanya telah selesai dan ditutup/berakhir.

Pada umumnya, sasaran proyek ini adalah untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas di sektor kelapa sawit melalui investasi dalam penanaman dan penanaman kembali perkebunan kelapa sawit di sekitar ribuan hektar lahan. Bank Dunia mendukung proyek umum termasuk pembangunan pabrik pengolahan dan penggilingan kelapa sawit dan termasuk fasilitas terkait seperti pengelompokan jalan, gedung, dan infrastruktur lainnya (rumah, bangunan medis dan administratif, gudang penyimpanan, kendaraan, peralatan dan sebagainya) Proyek banyak mendukung pendirian dan pelaksanaan perkebunan inti, memberikan pendanaan untuk layanan yang lebih luas serta fasilitas kredit untuk mengembangkan perkebunan, dan dalam beberapa hal meningkatkan pola kemitraan bapak angkat. Sebagian proyek generasi ketiga dan keempat memperluas lingkup dan menempatkan keluarga yang tidak mempunyai lahan di lahan siap pakai dan menciptakan pekerjaan yang produktif di perkebunan dan di pabrik kelapa sawit guna meningkatkan penghasilan pemilik perkebunan dan karyawan.

Pengalaman Negara Tertentu

Indonesia

Indonesia telah menjadi fokus utama pinjaman Bank Dunia untuk proyek pengembangan perkebunan kelapa sawit, dengan lebih dari sepertiga dari seluruh peminjaman untuk sektor tersebut. Selama periode 1969 sampai 1983, delapan proyek dibiayai oleh Bank Dunia. Ini merupakan periode penggalakan oleh pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sektor pertanian, dan pemerintah mendirikan banyak perusahaan yang dibiayai oleh pemerintah (sektor umum) di sektor kelapa sawit dan lainnya. Delapan proyek Bank Dunia di Indonesia tersebut pada umumnya dianggap berhasil dalam mendirikan perkebunan baru dan memperkenalkan pemilik perkebunan pada budidaya kelapa sawit. Hasil yang dicapai meliputi:

- Sekitar 100.00 hektar perkebunan kelapa sawit ditanami dan ditanami kembali (total)



- Sekitar 12.000 keluarga pemilik perkebunan rakyat (karet dan kelapa sawit) mendapat keuntungan dan 24.000 pekerjaan baru dihasilkan di perkebunan inti dan perkebunan kecil (*Sumatra Utara I*)
- 2,59 juta ton produksi kelapa sawit (*Sumatra Utara II*)
- Komponen karet dan kelapa sawit menguntungkan sekitar 10.000 keluarga pemilik perkebunan rakyat miskin dan melahirkan sekitar 6.000 pekerjaan baru di perkebunan inti dan perkebunan kecil (*NES V*)
- 900 km jalan diperbaiki/dibangun (*NES V*)

Proyek ini dinilai oleh IEG, yang mendapati enam proyek pertama memuaskan sesuai skema peringkat internal mereka, sementara dua proyek terakhir, yang lebih besar dan lebih kompleks, tidak memuaskan karena kurangnya kinerja dari instansi yang bertanggung jawab, dan kesulitan logistik serta manajemen. Hak atas tanah diidentifikasi sebagai hal yang mengalami penundaan. Dicatatkan bahwa dalam satu kasus di Jawa Barat ada kesulitan dengan persaingan penuntutan atas tanah dari masyarakat setempat yang tidak mau berpartisipasi dalam proyek. Berdasarkan kinerja yang mengecewakan dari lembaga publik, Pemerintah Indonesia mendorong berkembangnya sektor swasta dalam perkebunan minyak kelapa sawit.

Nigeria

Nigeria merupakan penerima pendanaan sektor kelapa sawit dari Bank Dunia terbesar kedua dengan enam proyek selama periode 1975 sampai 2009. Satu proyek sedang berjalan. Hasil yang dicapai meliputi:

- 42.658 hektar perkebunan kelapa sawit yang ditanami (total)
- 384 km jalan diperbaiki (*bagian Tengah Timur dan Inti*)
- Dua mesin giling dengan kapasitas 1 ton dan 3 ton buah segar/jam direhabilitasi (*Panen Pohon Kelapa Sawit*)
- Kapasitas penggilingan sebanyak 30 ton/jam didirikan (*bagian Tengah Timur dan Inti*)

Dalam tinjauannya terhadap proyek ini, *Independent Evaluation Group* menilai hanya dua dari lima yang memuaskan. Masalah yang

diidentifikasi termasuk kurangnya manajemen, biaya buruh tinggi, dan masalah hak guna tanah bagi perkebunan kecil.

Kamerun

Dari 1967 sampai 1982 Bank Dunia mendanai enam proyek kelapa sawit di Kamerun. Tujuan utama proyek ini adalah untuk meningkatkan produksi kelapa sawit di wilayah barat dan meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan negara. Hasil yang dicapai meliputi:

- 10.464 hektar perkebunan kelapa sawit ditanami dan 4.682 ditebang dan ditanami kembali yang menghasilkan peningkatan bersih 5.782 hektar (*Camdev I*)
- Berhasilnya pembangunan lembaga perusahaan Camdev
- 8.280 hektar perkebunan kelapa sawit ditanami (*Socapalm I*)
- 2.031 hektar perkebunan kelapa sawit ditanami (281 hektar perkebunan besar dan 1750 hektar perkebunan kecil) (*Camdev II dan Socapalm II*)

Dari enam proyek, empat dinilai memuaskan oleh IEG. Dua proyek pertama (*Camdev 1 dan Socapalm*) memuaskan dan tujuannya untuk meningkatkan produksi minyak kelapa sawit sangat terpenuhi. *Socapalm* merupakan perusahaan baru dan manajemennya dilakukan cukup baik. Walaupun berhasil, kedua proyek menghadapi kesulitan keuangan. Proyek selanjutnya (*Camdev II dan Socapalm II*) yang dibiayai oleh Bank Dunia tidak dapat mengatasi kesulitan keuangan namun memperkenalkan pola kemitraan bapak angkat di perkebunan kecil. Komponen tambahan baru ini juga tidak berjalan baik dan situasi keuangan kedua perusahaan jauh lebih memburuk. Akhirnya, Bank Dunia memutuskan untuk menghentikan sementara investasi selanjutnya di sektor ini karena masalah profitabilitas dan kompetisi dari produksi minyak kelapa sawit di Kamerun.

Papua Nugini

Bank Dunia telah mengadakan enam proyek di Papua Nugini selama periode 1969 sampai 2008 yang terutama menangani kelapa sawit. Lima proyek sudah berakhir sementara satu proyek (*Smallholder Agriculture Development Project*) masih berjalan. Hasil dari dua proyek yang pertama mencakup:

- 50.000 ton minyak kelapa sawit dihasilkan pada 5.583 hektar lahan yang



menguntungkan 1517 pemilik perkebunan (*Popondetta Smallholder Oil Palm*)

- 8.230 ha perkebunan kelapa sawit ditanami di blok baru (8.230 ha) (*Oro Smallholder Oil Palm*)
- Jalan akses sepanjang 345 km dibangun (*Oro Smallholder Oil Palm*)

Evaluasi IEG mengenai empat proyek pertama yang ditutup dinilai memuaskan, sementara proyek terakhir cukup memuaskan. Keberhasilan disebabkan karena kecocokan area budidaya kelapa sawit dengan memperhatikan tanah dan iklim, serta manajemen yang baik oleh staf proyek tersebut. Ada kesulitan dalam memberikan masukan (pupuk) budidaya yang mengurangi produktivitas.

Malaysia

Malaysia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia dan mendapat pendanaan dari Bank Dunia. Dari periode 1968 sampai 1994, tujuh proyek disetujui dan semua dinilai memuaskan oleh IEG. Proyek ini tidak dibahas dalam peninjauan karena pada saat riset, proyek tersebut hilang dari tempat penyimpanan Informasi Bank Dunia (Business Warehouse) disebabkan karena masalah pada sistem kode sektor internal.

Manfaat yang Diambil

Manfaat yang diambil⁶⁸ dari pengalaman Bank Dunia dalam sektor ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pengalaman dengan proyek perkebunan inti dan pemilik perkebunan (NES) menunjukkan bahwa prospek keberhasilan meningkat jika instansi sektor publik mengembangkan kapasitas pengawasan manajemen teknis dan aspek sosial dan keuangan pembangunan proyek (seperti yang terjadi pada proyek yang didukung FELDA sebelumnya di Malaysia). Perkebunan inti berdasarkan manajemen sektor swasta (misalnya, seperti di Papua Nugini) kemungkinan besar berhasil jika mekanisme kelembagaan dijalankan dengan memastikan bahwa komunitas lokal yang ikut serta dan kemitraan bapak angkat pemilik perkebunan mendapat bagian pendapatan proyek yang sama.

Masalah hak penguasaan tanah harus ditangani pada awal proyek: Di beberapa negara, masalah hak penguasaan tanah

⁶⁸ Lihat contoh pelajaran yang diambil lainnya di bagian akhir lampiran ini.

menimbulkan sengketa sehingga mempengaruhi pelaksanaan proyek. Pada awal proyek, lahan untuk pengembangan tanaman harus diperoleh secara sah serta melalui konsultasi mendalam dengan penerima proyek.

Kapasitas manajemen perusahaan perkebunan sektor publik mempengaruhi kinerja proyek: Sebagaimana dijelaskan di atas, di beberapa negara, perusahaan sektor publik seperti FELDA (Malaysia) berjalan sangat efisien, baik dari sudut teknis maupun keuangan. Sebagai hasilnya, Proyek yang didanai Bank Dunia dikategorikan berhasil. Secara alternatif, di negara di mana perusahaan perkebunan sektor publik memiliki masalah manajemen keuangan dan besar pasak daripada tiang, perusahaan perkebunan tersebut tidak mampu mengelola investasi komersial yang besar dengan baik.

Komponen infrastruktur (yaitu jalan) perlu dipadukan dengan proyek: Dalam proyek yang meliputi jalan akses, dan yang kurang diperhatikan, terjadi keterlambatan dalam konstruksi dan pemeliharannya. Proyek yang menangani semua komponen yang seimbang dapat menghindari pembengkakan biaya dan molornya tanggal penutupan. Jalan juga ikut menunjang tercapainya keberhasilan menyeluruh proyek.

Berbagai pendekatan terhadap keterlibatan kemitraan bapak angkat/pemilik perkebunan mencapai keberhasilan beragam: Berbagai pendekatan dicoba dengan mencapai berbagai keberhasilan. Analisis tambahan diperlukan untuk menilai model keterlibatan pemilik perkebunan yang memberikan pendekatan terbaik dan ini mungkin beragam tergantung pada negara dan keterlibatan manajemen publik/swasta.

Gambaran Investasi IFC

IFC telah terlibat secara luas di sepanjang rantai suplai sektor kelapa sawit, dengan investasi pada perkebunan (Indonesia, Thailand, Ghana, dan Nikaragua), pengolahan (Indonesia dan Ukraina), dan perdagangan kelapa sawit (Indonesia dan Singapura). Sejak 1976, IFC telah menginvestasikan 311 milyar dolar Amerika di 26 proyek terkait kelapa sawit. Ini sebanding dengan komitmen bersih 5.5 milyar dolar Amerika di sektor agribisnis dalam periode yang sama, dan 80.1 milyar dolar Amerika yang diinvestasikan seluruhnya oleh IFC. Ringkasan investasi ini disajikan dalam tabel di bawah.



Investasi awal IFC (1970-an dan 1980-an) menitikberatkan pada pengolahan skala kecil dan budidaya perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar investasi di Afrika dilakukan melalui the *Africa Enterprise Fund* yang berfokus pada investasi skala kecil dan menengah. Investasi ini dan juga proyek di Brazil, mencakup investasi dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit serta perluasan atau perbaikan mutu pabrik minyak sawit mentah, peremukan cangkang kelapa sawit, dan fasilitas terkait (penyimpanan curah, pengolahan limbah). Peninjauan

Negara	Tahun	Jumlah Dilakukant (juta \$)*	Status
Brazil	1980	4.7	tutup
	1982	6.1	tutup
	1993	0.6	tutup
Kamerun	1976	0.8	tutup
	1978	0.4	tutup
	1981	0.2	tutup
	1985	1.9	tutup
Pantai Gading	1987	2.0	tutup
	1993	4.7	tutup
	1996	3.8	tutup
Ghana	2007	12.5	aktif
Honduras	2009	30.0	aktif
Indonesia	1990	12.7	tutup
	1996	35.0	tutup
	2002	11.5	tutup
	2003	14.0	tutup
	2003	12.0	tutup
	2004	33.3	tutup
	2007	50.0	tutup
Meksiko	2006	1.0	tutup
Nicaragua	2009	25.0	aktif
Filipina	1982	11.0	tutup
Thailand	1987	4.7	tutup
Ukraina	2006	17.5	aktif
	2008	45.0	aktif

lingkungan dan sosial dari investasi ini sangat minim, karena mendahului persyaratan formal baik oleh IFC maupun Bank Dunia.

Investasi selanjutnya sejak 1990 tertuju pada perusahaan perkebunan besar di Indonesia, dengan investasi pada perusahaan di Bengkulu, Kalimantan Barat dan Selatan, serta Sumatra Utara dan Selatan. Investasi ini berlokasi di lahan pertanian yang ada (proyek transmigrasi) atau lahan terdegradasi (alangan).

Investasi IFC di Sektor Kelapa Sawit

Investasi perkebunan lain yang terbaru berada di Nikaragua dan Ghana, dan investasi selanjutnya di Afrika dan Amerika Latin diperkirakan akan dilakukan di masa mendatang.

Sejak 2004, IFC lebih aktif menggerakkan rantai pasokan minyak kelapa sawit ke bawah dengan investasi berjumlah besar dalam bidang perdagangan (bantuan keuangan perdagangan jangka pendek Perdagangan Wilmar) dan di bidang pemrosesan (Ukraina). Investasi ini menuai kritik dari IFC karena kurangnya perhatian terhadap masalah rantai pasokan berkenaan dengan kelangsungan dalam pelaksanaan perdagangan dan pengolahan, yang sebaliknya mendorong pelaksanaan strategi dewasa ini untuk sektor minyak kelapa sawit.

Perusahaan yang dibiayai IFC umumnya berjalan baik dan dapat meningkatkan usahanya dari waktu ke waktu walaupun terdapat kesulitan selama perjalanan dengan investasi (Brazil), gagal setelah mengalami masalah penyakit, kemudian menghentikan usahanya. Tantangan utama untuk melaksanakan proyek (perkebunan kelapa sawit) dan mencapai hasil yang diharapkan adalah: (i) masa persiapan yang panjang perkebunan kelapa sawit dan komitmen modal yang berat yang dipersyaratkan di muka; (ii) banyaknya tuntutan terhadap tanah yang disengketakan; dan (iii) krisis keuangan dan ekonomi di negara penyelenggara. Walaupun tuntutan tanah pada umumnya diselesaikan melalui mekanisme lokal, ini sering menyebabkan keterlambatan penanaman dan produksi. Krisis ekonomi memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan perkebunan disebabkan karena dampak devaluasi langsung, kebijakan yang menurunkan pendapatan (misalnya, pajak ekspor), namun juga menyebabkan pemerintah tidak mampu menyampaikan komitmen anggaran (misalnya,



membantu keuangan pengembangan penanaman pemilik perkebunan); dengan keadaan ini, perusahaan sektor swasta harus bertindak dan menutup kekosongan keuangan dengan biaya tambahan yang sangat tinggi.

Proyek minyak kelapa sawit telah memiliki dampak ekonomi yang kuat terhadap negara yang terlibat. Di Indonesia, proyek ini membantu munculnya perusahaan swasta dan pemilik perkebunan yang mengambil alih pengembangan produksi kelapa sawit disebabkan karena berbagai kinerja perusahaan perkebunan negara (lihat pengalaman Bank Dunia di atas). Minyak kelapa sawit juga memiliki dampak ekonomi terhadap mata pencaharian komunitas lokal dengan perkiraan industri bahwa satu pekerjaan diciptakan untuk setiap perkebunan seluas 5 hektar yang dikembangkan. Perlengkapan umum untuk pekerja tetap mencakup rumah, pemeliharaan medis, transpor, air, dan listrik.

Komponen utama beberapa proyek, terutama di Indonesia, adalah pengalihan tanah untuk mengembangkan kepemilikan kecil proyek kelapa sawit. Walaupun implementasi pola ini adakalanya terlambat, dan perekonomian sangat terpengaruh oleh krisis ekonomi, ini akhirnya menyebabkan kemapanan sektor pemilik perkebunan yang memperoleh mata pencaharian yang layak dari produksinya, sementara mendapat keuntungan dengan memperoleh infrastruktur inti dan bantuan teknis.

Akhirnya, keikutsertaan IFC dalam investasi memastikan bahwa semua investor menyesuaikan kebijakan serta proses lingkungan dan sosialnya dengan petunjuk Bank Dunia, dan sejak 2006 dengan Standar Kinerja IFC.

Manfaat yang Diambil

Meskipun sejumlah manfaat generik bagi semua investasi IFC dapat diterapkan, proyek yang terkait kelapa sawit berbeda terutama mengenai hal sebagai berikut:

Perlunya memilih klien secara cermat. Pengalaman investasi IFC menunjukkan bahwa klien sangat beragam dalam kapasitasnya memahami dan menanggapi masalah lingkungan dan sosial. Pada sektor seperti kelapa sawit, di mana terdapat sejumlah masalah yang harus diperhatikan bagi pemangku kepentingan, klien perlu memiliki kapasitas untuk menangani masalah ini sesuai kebutuhan, atau mereka perlu memiliki

kemampuan untuk memperoleh atau mengembangkan kapasitas tersebut dengan cepat. Penting untuk tidak berasumsi bahwa nama dan reputasi perusahaan yang membiayai akan menjamin manajemen yang baik dalam hal tertentu—pengawasan yang cermat dan terjadwal diperlukan dalam setiap kasus untuk menjamin bahwa produktivitas dan manajemen terus menjadi tolok ukur.

Perlunya memperhatikan masalah perolehan tanah dan hak penguasaan tanah. Masalah berkaitan dengan penggunaan tanah dan kepemilikan tanah dapat timbul di semua negara di mana IFC bekerja, bahkan di daerah di mana kepemilikan tanah dapat secara relatif padat dan dikodifikasi. Berkaitan dengan hak penggunaan tanah yang dialihkan dari komunitas lokal ke perusahaan sektor swasta atas perintah pemerintah, ada kebutuhan tertentu untuk diperhatikan dengan memastikan bahwa prosedur telah memenuhi peraturan perundang-undangan setempat dan tidak merugikan masyarakat setempat.

Perlunya memperhatikan masalah keanekaragaman hayati. Walaupun perkebunan kelapa sawit dewasa ini tidak mencakup seluruh area sebesar komoditas lain, area yang sesuai untuk budidaya kelapa sawit di dunia juga merupakan terkaya dalam hal keanekaragaman hayati. Keprihatinan akan hilangnya keanekaragaman hayati sangat dikenal. Konversi hutan tropis utama untuk pertanian tampak mengakibatkan hilangnya keanekaragaman utama. Lahan yang direncanakan untuk diubah menjadi perkebunan kelapa sawit (atau tanaman lainnya) harus dianalisis mengenai keanekaragaman dan nilai konservasinya, dan area yang ditunjuk sebagai habitat yang kritis (sesuai PS6 IFC) atau HCV (atau penunjukan yang sama) perlu dilindungi.

Pentingnya bekerja secara efektif dengan komunitas lokal guna memastikan bahwa keuntungan dibagi secara tepat dan masalah ditangani dengan benar. Khususnya dalam hal di mana lahan milik bersama telah dialihkan menjadi dikuasai swasta, ada kebutuhan bagi perusahaan untuk bekerja dengan komunitas lokal untuk membangun bantuan untuk usahanya serta menunjukkan bahwa keuntungan pengembangan yang positif dapat menjadi hak komunitas.

Nilai pengembangan kemitraan yang tepat dengan pemangku kepentingan, seperti diskusi untuk menyampaikan masalah di seluruh sektor. Memperkuat sektor swasta secara lebih luas, tanpa membiayai perusahaan



tertentu, dapat dicapai melalui mekanisme seperti diskusi, yang membawa bersama berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah. Diskusi memberikan tindakan tata kelola internal untuk sektor swasta, dan berupaya membentuk pasar melalui pengembangan standar yang disepakati bersama untuk kelanjutan sektor tersebut.

Nilai kerja dalam strategi yang disepakati dan ditentukan untuk sebuah sektor. IFC mengetahui kurangnya terlibat dalam transaksi per transaksi tanpa adanya strategi penting. Menargetkan secara efektif intervensi investasi dapat diselesaikan dengan baik melalui pemahaman sektor dan strategi yang komprehensif untuk pengembangannya. Strategi tersebut harus menyetengahkan bagaimana produk investasi dan jasa penasihatannya berbeda⁶⁹ dapat ditargetkan untuk menyampaikan kondisi lokal — terutama kondisi yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan sosial. Strategi tersebut perlu menjelaskan bagaimana IFC akan bekerja, baik melalui layanan investasinya maupun pendampingan teknis, dengan semua komponen dari sektor swasta, sekaligus dalam menanggapi beberapa permasalahan peraturan.

Perlunya memperhatikan secara memadai rantai pasokan. Keprihatinan terhadap rantai pasokan terutama untuk komoditas pertanian banyak dibicarakan dalam tahun-tahun terakhir. Keprihatinan konsumen terhadap masalah lingkungan dan sosial dalam produksi, perdagangan dan pengolahan komoditas kini merupakan risiko penting yang perlu diperhatikan.

Relevansi kebijakan dan peraturan lingkungan. Investasi dalam hubungan lingkungan dan sosial yang berkelanjutan di sektor minyak sawit dapat menjadi masalah jika kebijakan dan lingkungan peraturan lemah. Hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan tanah, pengelolaan hutan dan penguasaan tanah dan hak-hak pekerja, masyarakat adat berada di akar banyak masalah sosial dan lingkungan di sektor ini.

⁶⁹ *Badan Penasihat IFC dirancang untuk melengkapi investasi simpan pinjam tradisional. Keterangan lain tersedia di*
<http://www.ifc.org/ifcext/about.nsf/Content/TAAS>.



Lampiran V: Para Pelaku dalam Sektor Minyak Kelapa Sawit

Rantai Pasokan Minyak Kelapa Sawit

Sektor minyak kelapa sawit dapat dipandang sebagai jaringan usaha yang terlibat dalam berbagai segmen rantai pasokan, semua bekerja dalam kerangka kebijaksanaan pemerintah, hukum, dan peraturan.

Negara, melalui peningkatan kapasitas dan melalui bentuk pemerintahan yang baru, menanggapi kegagalan-kegagalan pasar, mengatur persaingan, dan bergerak secara strategis dalam kemitraan publik dan swasta untuk meningkatkan daya saing di sektor agro industri, dan selanjutnya bagi masuknya pemilik perkebunan dan pekerja pedesaan.

Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam rantai pasokan utama, meliputi produsen kecil (termasuk pemilik perkebunan) sampai perusahaan-perusahaan perkebunan besar yang bersifat multinasional, pengolahan minyak sawit mentah, dan produsen produk-produk konsumen dan produk industri yang menggunakan minyak sawit semua dihubungkan oleh pedagang dan perusahaan transportasi. Sektor ini juga mencakup . Sektor ini juga mencakup kegiatan penunjangnya yang menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh industri (misalnya. Input pertanian, layanan bisnis dan jasa keuangan), serta asosiasi industri dan perwakilan lainnya yang mewakili kepentingan kelompok pemangku kepentingan. Penguatan sektor secara keseluruhan, dan memastikan bahwa semua bagian-bagian ini bekerja secara efektif bersama-sama, dapat mewujudkan dampak perkembangan yang signifikan. Melalui tindakan kolektif dan kemitraan antara berbagai pelaku pembangunan sektor ini dapat ditingkatkan dan manfaatnya dapat diperluas untuk menjangkau masyarakat miskin dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Sektor Swasta

Sektor swasta adalah pemain dominan dalam industri minyak sawit, baik dari perspektif produsen maupun dari perspektif pembeli/konsumen. Ini meliputi perusahaan perkebunan besar, pemilik perkebunan, pengolah, pedagang, dan pembeli/pengguna minyak kelapa sawit, selain mendukung upaya dalam transportasi, penyediaan input, dan bidang jasa lainnya. WBG mendukung

perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan berkelanjutan dalam industri mereka. Sektor swasta dapat memainkan peran berikut dalam mendukung perubahan positif di sektor ini:

- Pelaksanaan praktik pertanian yang baik, di tingkat perusahaan dan di tingkat perkebunan
- Dalam kasus perusahaan produksi yang besar, (1) harus bisa mendefinisikan dan membentuk suatu hubungan yang adil dan merata dengan masyarakat lokal, dan (2) bisa memastikan integrasi dan perlakuan yang sama terhadap pemilik perkebunan sebagai pemasok
- Terlibat dengan masyarakat sipil (termasuk kemitraan langsung) dalam mendukung kinerja lingkungan dan sosial yang lebih baik
- Berkomitmen untuk sumber-sumber yang berkelanjutan dan kemudian Pengawasan rantai pasokan yang berberkelanjutan
- Membentuk kebijakan yang kuat dan efektif pada tenaga kerja lingkungan, sosial, para pelaku praktisi kebijaksanaan, dan meningkatkan kapasitas manajemen dan dapat mencapai status bersertifikat
- Membangun dan menerapkan kode etik bidang tertentu atau protokoler yang berkelanjutan (misalnya, RSPO)

Sektor swasta telah menjadi kekuatan pendorong utama di belakang pertumbuhan eksponensial sektor kelapa sawit di negara-negara penghasil utama sejak 1960-an. Saat ini, 10 perusahaan perkebunan besar memiliki kapitalisasi pasar gabungan sebesar 79.1 milyar dolar Amerika (31 Maret 2010) dan memiliki sekitar 2,3 juta hektar perkebunan untuk memproduksi 9,7 juta ton⁷⁰. Ini setara dengan sekitar 22 persen dari produksi dunia kelapa sawit. Merger dan akuisisi baru-baru ini telah menyebabkan munculnya beberapa perkebunan mega-besar, seperti *Sime Darby Berhad* dan *Wilmar International Ltd.* Mereka merupakan sebuah perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, yang terlibat dalam produksi hulu, pengolahan, dan manufaktur

⁷⁰ Bloomberg, 31 Maret 2010.



hilir di negara-negara konsumen di Eropa dan Cina, dan tempat lain.

Sehubungan dengan keberlanjutan, sektor swasta, bekerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil, berperan penting dalam pembentukan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) pada tahun 2004 (dibahas lebih lanjut di bawah). Di antara para pemilik perkebunan, dikarenakan oleh pelaksanaan Prinsip & Kriteria RSPO dan implementasi sistem sertifikasi RSPO, banyak perusahaan mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dan proaktif terhadap manajemen untuk keberlanjutan. Beberapa perusahaan telah menempatkan departemen atau unit dipimpin oleh manajemen tingkat senior untuk mendorong inisiatif dalam keberlanjutan. Beberapa perusahaan, seperti *Wilmar International Ltd* dan *Sime Darby Berhad*⁷¹, telah menempatkan keberlanjutan dalam konteks yang lebih luas dari komitmen perusahaan untuk tanggung jawab sosial. Namun, praktik-praktik sangat beragam macamnya dalam suatu industri dan untuk mengatasi isu-isu yang disorot, praktik tersebut harus mengambil tindakan sukarela oleh sektor swasta dan menggabungkannya dengan peraturan pemerintah serta penegak hukum yang lebih baik.

Pemerintah

Negara memiliki peran dalam mengatasi kegagalan pasar dan pengembangan pasar yang menyediakan barang-barang dasar kebutuhan umum, memperkuat mekanisme peraturan dan transparansi, dan memperbaiki iklim investasi untuk sektor swasta dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dengan memperkenalkan insentif dan menetapkan hak milik. Pemerintah mempunyai tanggung jawab utama untuk membangun konteks strategis, hukum, dan peraturan untuk pengembangan sektor kelapa sawit. Secara khusus, fungsi pemerintah adalah:

Pemerintah mempunyai tanggung jawab utama untuk membangun hukum dan konteks peraturan yang strategis untuk pengembangan sektor kelapa sawit. Fungsi pemerintah dalam hal ini adalah:

- Menetapkan kebijakan pembangunan dan tujuan yang relevan dengan sektor kelapa sawit
- Menetapkan kerangka hukum dan peraturan yang relevan untuk mendukung produksi minyak sawit yang berberkelanjutan
- Menjamin penegakan non-diskriminatif terhadap berlangsungnya kerangka hukum dan peraturan
- Mengidentifikasi dan melindungi aset jasa dan lingkungan yang bernilai tinggi
- Melindungi hak dan akses bagi kehidupan Masyarakat Adat dan komunitas lokal
- Menciptakan tatanan pemerintahan yang baik

Organisasi Masyarakat Sipil

- Organisasi masyarakat sipil adalah pemain kunci dalam meningkatkan kelangsungan hidup industri minyak sawit. Kontribusi organisasi masyarakat sipil dalam proyek-proyek pembangunan, termasuk memberikan pengetahuan lokal dan keahlian teknis, dan membangun modal sosial. Beberapa contoh adalah:
 - Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas sektor publik dan memberikan kontribusi terhadap lingkungan yang kondusif bagi tata pemerintahan yang baik
 - Mempromosikan dan kepemilikan lokal konsensus publik untuk mendukung reformasi, pengurangan kemiskinan nasional dan strategi pembangunan dengan membangun landasan bersama untuk memahami dan mendorong kemitraan publik-swasta
 - Membawa gagasan inovatif dan solusi, dan pendekatan inklusif untuk memecahkan masalah lokal
 - Memperkuat dan meningkatkan pengembangan program dengan menyediakan pengetahuan lokal, penargetan bantuan, dan menghasilkan modal sosial di masyarakat
 - Memberikan keahlian profesional dan peningkatan kapasitas untuk penyediaan layanan yang efektif, khususnya pada lingkungan dengan lemah kapasitas sektor publik atau dalam konteks pasca-konflik

Masyarakat, produsen dan organisasi-organisasi lain yang berkepentingan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat meningkatkan representasi dari pedesaan miskin dan dengan demikian mencapai

⁷¹ Teoh, C. H. 2009.

"Perusahaan Malaysia sebagai pemain strategis di Industri Minyak Sawit di Asia Tenggara." Presentasi pada Institut Lokakarya Studi Asia Tenggara pada Kontroversi Palm Oil dalam Perspektif Transnasional, Institut Studi Asia Tenggara, Maret



pemerintahan yang lebih baik. Organisasi produsen dapat memberikan suara politik untuk pemilik perkebunan dan mempersalahkan pembuat kebijakan yang dan lembaga pelaksana dalam pengembangan kebijakan pertanian, anggaran pengawasan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagai contoh, di Senegal, *Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux* sebuah badan organisasi yang menaungi produsen-produsen, aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pertanian nasional dan strategi. Kebebasan berserikat, kebebasan pers dan investasi dalam modal organisasi sosial pedesaan, termasuk organisasi perempuan, sangat penting untuk strategi permintaan tersebut untuk meningkatkan tata kelola pemerintah⁷².

Pengembangan Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan Internasional, termasuk WBG, memainkan peran pendukung dalam mempromosikan sektor berkelanjutan melalui dialog kebijakan, penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan kritis, memproduksi dan mendistribusikan riset dan analisis, kredit investasi, kemitraan ini mendukung pembiayaan pembangunan dan mendukung proses *multi-stakeholder*.

Forum Multi-Stakeholder

Hasil diskusi telah menemukan adanya peningkatan penggunaan di bidang kehutanan dan komoditas pertanian. Mereka menyediakan struktur formal di mana berbagai pemangku kepentingan dapat bertemu dan bekerja mengatasi isu-isu umum dan apa yang menjadi keprihatinan lalu menemukan cara untuk bersama-sama menghadapi dan membahas pandangan yang berbeda. Sebagian besar komoditas mejabundar adalah global dan termasuk aktor-aktor kunci yang mencakup seluruh rantai pasokan dari suatu sektor tertentu, dari produsen dan prosesor kepada konsumen, serta dana, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai lembaga pendukung lainnya. Pemerintah per se umumnya tidak disertakan; yang mejabundar dilihat sebagai mekanisme bagi peraturan-diri dari sektor swasta, diluar peraturan formal dari pejabat pemerintah.

Sebagian besar forum komoditas telah terbentuk karena terdapat kekhawatiran lingkungan, sosial, dan isu-isu tata kelola di sektor ini, dan ada keinginan oleh peserta untuk bergerak ke arah kelanjutan industri melalui tindakan kolektif. Hal ini biasanya dilakukan melalui tindakan pengembangan standar sukarela yang membahas syarat-syarat pasar bagi kelangsungan lingkungan dan sosial. Seringkali standar-standar ini tumpang tindih dengan standar non-sektoral lainnya seperti kualitas, manajemen lingkungan, kesehatan, keamanan dan keselamatan pangan dan jika relevan, panel akan menggunakan standar dan menunjuk lainnya standar yang ada.

Keberhasilan forum komoditas dapat ditentukan melalui bagian dari volume perdagangan global yang telah disertifikasi di bawah standar kesepakatan dan dengan bukti tambahan bahwa penggunaan standar ini memberikan pengaruh yang diinginkan: untuk meningkatkan baik kesejahteraan kelompok yang rentan, meningkatkan konservasi habitat yang rentan, mengurangi deforestasi, dan sebagainya. Keberhasilannya tergantung pada cara menjaga keseimbangan keanggotaan antara produsen, pembeli, penyedia dana, dan kepentingan lingkungan dan sosial, yang semuanya berkomitmen menggunakan forum untuk menyelesaikan masalah mereka. Hal penting lainnya adalah memastikan kapasitas produksi untuk menyesuaikan atau melampaui permintaan pembeli, dalam rangka mendorong penyerapan produk bersertifikat di masa yang akan datang.

Harus ada mekanisme yang tepat untuk kepemimpinan dan pengetahuan, biaya, serta pembagian risiko, sehingga anggota diskusi dapat:

- Memutuskan secara demokratis apa yang menjadi isu-isu kunci yang perlu ditanggapi
- Menetapkan standar audit dan menciptakan sistem yang bisa dilacak yang dapat bermanfaat bagi semua pihak
- Menyetujui dan mengidentifikasi cara untuk memastikan integritas dan sistem mutu
- Yakin dengan sistem dan standar akhir mereka

Forum komoditas mendorong adanya tindakan kolektif dan sinergis dan menghasilkan hasil yang tidak bisa dicapai oleh anggota bila hanya sendirian. Forum tersebut berbeda dari inisiatif standar lain di mana mereka berusaha untuk

⁷² Laporan Pembangunan Dunia 2008: Pertanian untuk Pembangunan, Gambaran umum Bank Dunia, hal. 23.



menentukan dasar bagi semua, langkah demi langkah, dan bukan memihak atau memilih segmen, subset pemain dalam produksi tertentu, atau pemrosesan karakter (atau set karakter). Meskipun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa beberapa sistem sertifikasi yang saling terkait diperlukan: satu sistem untuk menetapkan dasar dan sistem lain untuk memenuhi kebutuhan dan selera yang berbeda-beda. Pada akhirnya, mereka dapat saling mengatur perjanjian pengakuan atau mendorong satu sama lain untuk saling memperbaiki.

The Roundtable Sustainable on Palm Oil (RSPO)

Sejumlah peserta komersial dalam rantai nilai global minyak sawit dengan *World Wildlife Fund* (WWF) pada tahun 2004 untuk membentuk RSPO, forum bagi *global stakeholder*. Tujuan RSPO adalah untuk meningkatkan kelangsungan bisnis minyak terkait, sebagian sebagai tanggapan terhadap tekanan pasar dengan lingkungan yang sensitif. Sejauh ini, keanggotaan telah berkembang dengan pesat. RSPO mengalami tarikan paling banyak di pusat produksi dan konsumsi, Asia, dan Amerika Utara serta Eropa.

RSPO, dengan kesekretariatan di Kuala Lumpur, membawa para pemangku kepentingan dari tujuh sektor dalam industri minyak kelapa sawit: produsen minyak, pengolah atau pedagang, barang-barang konsumen produsen, pengecer, WB dan investor, lingkungan atau LSM konservasi alam dan LSM sosial atau pembangunan. Tujuan RSPO adalah untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan berkelanjutan dari produk minyak sawit melalui pengembangan standar global yang kredibel dan Kode Tata Laku (yang dikenal sebagai Prinsip dan Kriteria) dan keterlibatan para pemangku kepentingan.

Prinsip dan Kriteria (P & C) mencakup aspek dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan, terutama di hulu. Pada bulan November 2008, RSPO telah menerapkan sistem sertifikasi yang dapat diaudit berdasarkan P & C, yang menyediakan

sertifikasi independen bahwa produksi dikelola secara berkelanjutan. Sekitar 7,5 persen (sekitar 3,4 juta ton) dari pasokan minyak sawit global saat ini disertifikasi sebagai CSPO (minyak sawit lestari bersertifikat). Hal ini melibatkan audit dan sertifikasi oleh badan sertifikasi independen yang terakreditasi dari 22 pemilik perkebunan dan 60 rantai perusahaan pemasok.

RSPO memainkan peranan penting dalam menentukan standar yang memiliki dampak luar daerah yang dikelola oleh anggotanya, dan saat ini sedang memperluas sertifikasi untuk pemilik perkebunan. Meskipun RSPO adalah sebuah inisiatif secara sukarela yang digerakkan oleh pasar, ia memainkan peranan penting dalam menentukan sifat dan ruang lingkup intervensi regulasi diperlukan. kekuatan RSPO, visibilitas, dan prestasinya selama ini telah meningkatkan kesadaran pemerintah akan isu-isu kunci. Forum ini menekankan pada otoritas publik untuk melengkapi kegiatan RSPO dengan peningkatan kebijakan. Permintaan pasar akan minyak sawit yang tahan lama masih terbatas dan hal ini mengurangi insentif bagi beberapa perusahaan untuk bergabung, tetapi ada indikasi bahwa permintaan untuk minyak sawit tahan lama datang melalui sejumlah instrumen pasar.

IFC merupakan anggota aktif RSPO, mendukung beberapa komite teknis, peningkatan keanekaragaman hayati, dan pengembangan interpretasi nasional atas P & C di Afrika. RSPO diakui oleh berbagai pemangku kepentingan, cara yang paling efektif di mana peningkatan produksi yang berkelanjutan dapat dilakukan. Pada saat ini RSPO masih lemah secara kelembagaan dan harus di untuk memenuhi berbagai tuntutan.

RSPO diakui oleh berbagai pemangku kepentingan, cara yang paling efektif di mana perbaikan dapat dilakukan produksi yang berkelanjutan. Pada saat itu adalah lemah, kelembagaan dan peregangannya untuk memenuhi berbagai tuntutan.



Lampiran VI: Kebijakan Pengamanan Bank Dunia

Bank Dunia memiliki beberapa kebijakan lingkungan, sosial, dan hukum yang diterapkan dalam proyek minyak kelapa sawit. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk mengurangi kerugian masyarakat dan lingkungan dalam proses pengembangan melalui proses pengambilan keputusan yang telah disempurnakan, memastikan bahwa pilihan proyek yang sedang dipertimbangkan aman dan berkelanjutan, sehingga masyarakat yang berpotensi untuk terkena dampak diberi tahu sebelumnya, dan bahwa dokumen kebijakan tersebut diungkapkan. Kebijakan pengamanan tersebut memberikan landasan bagi partisipasi pemegang saham dalam rancangan proyek dan telah menjadi instrumen penting untuk membangun kepemilikan di antara populasi lokal. Kebijakan yang sering diterapkan pada minyak kelapa sawit dijelaskan di bawah ini. Daftar lengkap kebijakan dapat dilihat di: www.worldbank.org/safeguards

Penilaian Lingkungan

Proyek-proyek yang menyangkut minyak kelapa sawit harus siap untuk menghadapi kebijakan Bank Dunia dalam hal penilaian lingkungan. Bank Dunia menyaring semua proyek yang diajukan untuk menentukan potensi akibat dan risikonya terhadap lingkungan. Berdasarkan dari tipe, lokasi, sensitivitas, skala, dan derajat potensi pengaruhnya terhadap lingkungan, suatu proyek digolongkan ke dalam 4 kategori. Proyek minyak kelapa sawit biasanya digolongkan ke dalam kategori A. ini menandakan bahwa proyek-proyek tersebut kemungkinan "mempunyai efek merugikan yang signifikan terhadap lingkungan yang peka, beragam, dan tidak ada pendahulunya" dan "dapat mempengaruhi area yang lebih luas dari wilayah atau fasilitas-fasilitas yang akan dikaryakan"; secara singkat efeknya melampaui batasan ruang dan waktu proyek itu sendiri. Penilaian lingkungan diambil untuk melakukan perbandingan dengan alternatif-alternatif lain, termasuk skenario "tanpa proyek" untuk membandingkan apakah proyek tersebut justru lebih mendatangkan kerugian daripada keuntungan. Alternatif-alternatif "dengan proyek" termasuk kesempatan untuk

mencegah, mengurangi, menghilangkan, atau mengkompensasi dampak merugikan juga dipertimbangkan. Kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan kinerja lingkungan hidup dari aset-aset dan sumber daya yang berhubungan dengan proyek juga diamati dengan seksama.

Hutan-Hutan

Kebijakan operasional mengenai hutan berlaku bagi proyek-proyek yang (a) memiliki pengaruh terhadap kesehatan dan kualitas hutan, (b) mempengaruhi hal dan kemakmuran masyarakat dan tingkat ketergantungan mereka terhadap hutan, atau (c) bertujuan untuk membawa perubahan terhadap manajemen, perlindungan, penggunaan hutan alam atau perkebunan, baik secara umum, pribadi, ataupun komunitas. Manajemen, konservasi, dan pengembangan hutan secara berkelanjutan sangat penting untuk pengurangan kemiskinan dan pembangunan secara berkelanjutan, di negara-negara yang memiliki hutan yang berlimpah atau di negara-negara sumber daya hutannya telah habis (*depleted*) atau terbatas secara alami. Kebijakan ini dimaksudkan untuk membantu peminjam dalam menggerakkan potensi hutan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara yang berkelanjutan, untuk mengintegrasikan hutan ke dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan untuk melindungi fungsi lingkungan hidup yang disediakan oleh hutan baik secara lokal maupun global. Bank Dunia mempunyai niat yang jelas untuk mendorong penanaman kelapa sawit menjauh dari hutan dan menuju lahan-lahan gambut yang terdegradasi. Perkiraan ini menunjukkan bahwa area yang tersedia di lahan-lahan terdegradasi ini setidaknya dua kali lebih luas dari area yang dibutuhkan dunia untuk memenuhi permintaan selama dekade berikutnya. Tersedia beberapa pilihan dan insentif ekonomi yang menarik untuk menggunakan area-area tersebut, di mana yang terpenting adalah penggunaan pembayaran untuk layanan yang memperhatikan lingkungan hidup dan pengurangan emisi yang terjadi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang. Namun penerapan



mekanisme ini secara sukses membutuhkan pengakuan hak dan kompensasi dari pemilik lahan-lahan tersebut.

Habitat Alam

Bank Dunia mendukung konservasi habitat alam dan peningkatan penggunaan tanah melalui pendanaan proyek-proyek yang di desain untuk ber integrasi dengan pembangunan nasional & regional, konservasi habitat alam, dan perawatan fungsi-fungsi ekologi. Lebih lanjut, Bank Dunia juga mendorong rehabilitasi habitat alam yang telah terdegradasi. Bank Dunia tidak mendukung proyek-proyek yang dianggapnya mengakibatkan konversi atau degradasi dari habitat alami secara kritis. Sedapat mungkin proyek-proyek tersebut berlokasi di lahan yang telah terkonversi (tidak termasuk lahan yang dikonversikan untuk mengantisipasi proyek tersebut). Bank Dunia tidak mendukung proyek-proyek yang menyangkut konversi habitat alam yang signifikan kecuali tidak ada alternatif yang layak, dan bahwa analisis keuntungan menyeluruh dan dari proyek tersebut jauh melampaui kerugian yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup. Bila dalam penilaian masalah lingkungan sebuah proyek menunjukkan niat konversi atau degradasi habitat alam secara signifikan, maka proyek tersebut harus mengadopsi langkah-langkah mitigasi yang dapat diterima oleh Bank Dunia. Langkah-langkah mitigasi tersebut meliputi restorasi habitat yang strategis dan restorasi pasca-pembangunan. Langkah-langkah tersebut juga dapat mencakup pembangunan dan pemeliharaan wilayah terlindungi yang memiliki ekologi yang serupa. Bank Dunia dapat mentolerir bentuk lain dari langkah-langkah mitigasi ini hanya bila secara teknis langkah tersebut dapat dibenarkan.

Penduduk Asli

Dalam wilayah di mana penduduk asli setempat kemungkinan besar terkena dampak, Bank Dunia akan melakukan proses penyaringan. Apabila berdasarkan penyaringan ditemukan bahwa ada penduduk asli yang bertempat di daerah proyek atau memiliki keterkaitan kolektif dengan daerah tersebut, maka peminjam wajib melakukan penilaian sosial untuk mengevaluasi potensi positif dan pengaruh negatifnya terhadap kelompok-kelompok yang bersangkutan. Di mana

dampak merugikan dapat ditingkatkan yang signifikan, maka alternatif terhadap proyek atau di dalam proyek akan diselidiki. Peminjam akan bekerjasama dengan para pakar ilmuwan sosial yang di akui oleh Bank Dunia untuk melakukan penilaian sosial tersebut. Peminjam akan terlibat dalam "*free, prior, and informed consultation*" dengan para penduduk asli dalam semua tahapan mulai dari persiapan dan implementasi proyek. Agar suatu proyek dapat dilanjutkan, harus dipastikan bahwa ada dukungan secara luas oleh penduduk asli. Pertimbangan khusus dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan para wanita, pemuda, dan anak-anak dan untuk memastikan akses mereka terhadap kesempatan pembangunan dan semua keuntungan yang didapat sebagai hasil dari proyek. Semua informasi yang relevan tentang potential efek negatif di informasikan ke komunitas yang bersangkutan.

Sumber Daya Budaya Fisik.

Kebijakan operasional dari Bank Dunia tentang sumber daya budaya fisik diterapkan dalam banyak hal yang memiliki keadaan yang serupa, walaupun potensi dampak dari proyek yang diusulkan pada aset-aset budaya ini dinilai dalam proses pelaksanaan penilainan lingkungan hidup dari proyek. Sumber daya budaya fisik didefinisikan sebagai benda bergerak atau tidak bergerak, wilayah, struktur, sekelompok struktur, dan fitur alami dan lentur lahan yang memiliki nilai arkeologi, paleontologi, historis, arsitektur, religius, estetik, atau nilai-nilai budaya lainnya yang signifikan. Sumber daya ini dapat ditemui di lingkungan perkotaan atau pedesaan, dapat berada di atas atau di bawah tanah atau air. Kepentingan budaya mereka dapat terletak di tingkatan lokal, propinsi, nasional, atau di komunitas internasional.

Penghunian kembali secara paksa.

Kebijakan operasional Bank Dunia tentang penghunian kembali secara paksa dipicu oleh situasi-situasi yang menyangkut pengambilan lahan secara paksa dan pelarangan akses secara paksa terhadap taman atau area yang telah dilindungi secara hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pemukiman kembali secara paksa atau untuk mengurangi dan mitigasi terhadap dampak kerugian sosial dan ekonominya. Kebijakan ini mendorong



partisipasi orang-orang yang terdusur dalam rencana dan implementasi pemukiman kembali, and tujuan ekonomi kuncinya adalah untuk membantu mereka yang terdusur untuk memulihkan pendapatan dan taraf hidup mereka. Kebijakan ini menyarankan kompensasi dan langkah-langkah pemukiman kembali dan mengharuskan peminjam untuk mempersiapkan instrumen perencanaan pemukiman kembali yang cukup sebelum penilaian Bank Dunia terhadap proyek yang diajukan.

Manajemen Hama

Dalam membantu peminjam untuk mengatasi hama yang mempengaruhi kesehatan pertanian atau publik, Bank Dunia

mempromosikan penggunaan metode kontrol biologis atau alami dan mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia sintetis. Dalam proyek-proyek yang didanai oleh Bank dunia, peminjam harus menanggapi masalah manajemen hama dalam konteks penilaian lingkungan hidup proyek tersebut. WB akan menilai kapasitas dari perundang-undangan dan institusi-institusi negara untuk mempromosikan dan mendukung manajemen hama yang aman, efektif, dan bersahabat terhadap lingkungan. Apabila dibutuhkan, Bank Dunia dan peminjam akan menyertakan hal-hal tersebut ke dalam komponen proyek untuk meningkatkan kapasitas tersebut.



Lampiran VII: Menerapkan Pengamanan Bank Dunia dan Standar Kinerja IFC: Sebuah Catatan Praktik Terbaik Untuk Staf WBG

Di tahun 2011 Grup Bank Dunia melaksanakan peninjauan terhadap sektor minyak kelapa sawit dan pelajaran dari investasi-investasi Grup Bank Dunia terhadap minyak kelapa sawit. Peninjauan tersebut dikatalisasi oleh keprihatinan pemangku kepentingan sehubungan dengan dampak negatifnya terhadap sektor lingkungan dan sosial dengan diketahuinya ekspansi yang sangat pesat di dalam sektor dan potensi untuk manfaat pembangunan, khususnya bagi rakyat miskin.

Para pemangku kepentingan menyoroti kekhawatiran terhadap tata pemerintahan yang baik, pemilikan tanah, penggundulan hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati, partisipasi pemilik perkebunan, perbedaan produktivitas; tetapi juga menyorot kemampuan sektor untuk mendorong ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Meskipun perspektif mengenai prakondisi keterlibatan kembali berbeda, terdapat pandangan jelas bahwa Kelompok Bank Dunia dapat dan harus memainkan peran positif dalam mempromosikan keberlanjutan dalam sektor ini.

Sebagai hasil, dan respon terhadap permintaan rekan-rekan, Kelompok Bank Dunia telah menetapkan bahwa keterlibatan kembali dalam sektor akan memungkinkan WB mendukung budidaya minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, yang menguntungkan rakyat miskin, dan tidak merusak lingkungan.

Catatan ini memberikan saran bagi staf mengenai aplikasi standar kinerja dan pengamanan lingkungan dan sosial yang sudah ada dalam sektor minyak kelapa sawit. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengambilan keputusan dan mendorong dilakukannya prosedur terbaik.

Pendekatan: Semua proyek akan menjalani: (i) penilaian awal dari Gabungan Bank Dunia – IFC untuk mengenal sejumlah peluang dan tantangan dalam sektor (Analisis Situasi Negara); (ii) pengenalan peluang bagi perjanjian gabungan Bank Dunia - IFC; dan (iii) untuk proyek-proyek IFC, aplikasi penggunaan Alat Penilaian dan Penyaringan Risiko.

Kebijakan yang berlaku: Sama seperti operasi Bank Dunia lainnya, kebijakan pengamanan, dan proses konsultasi lingkungan, sosial, dan hukum Bank Dunia, berlaku, atau jika sebuah proyek IFC sedang dalam tahap pengembangan, Standar Kinerja IFC berlaku. Kriteria berikut ditujukan untuk membantu staf dalam menerapkan kebijakan yang sudah ada pada proyek minyak kelapa sawit.

Semua proyek harus konsisten dengan kebijakan nasional, mekanisme hukum, dan peraturan yang berlaku. Seperti seharusnya, pengembangan kapasitas untuk memperkuat mekanisme pertanggung jawaban akan diprioritaskan.

Kriteria 1. Terdapat manfaat ekonomi bagi penduduk miskin pedesaan: Bank Dunia akan memberikan prioritas pada proyek-proyek yang bermanfaat bagi pemilik perkebunan dan merehabilitasi perkebunan terdegradasi yang ada (dan perkebunan terdegradasi dari pohon lain yang telah dikonversi menjadi perkebunan minyak kelapa sawit) yang bermanfaat bagi para pemilik perkebunan dan pemilik perkebunan baru di hutan kecil; IFC akan mendukung perkebunan dan perusahaan-perusahaan dalam mata rantai pasokan yang bermanfaat bagi masyarakat pedesaan sambil memberikan prioritas pada proyek-proyek yang juga memberikan manfaat pada pemilik perkebunan-pemilik perkebunan yang menggunakan lahan yang terdegradasi.

Dampak: peningkatan penghasilan dari produksi, pemasaran, atau pengolahan minyak kelapa sawit, menguatnya organisasi pemilik perkebunan.

Petunjuk-petunjuk pemantauan: peningkatan pekerjaan; peningkatan penghasilan; peningkatan nilai tambah; peningkatan produktivitas; manfaat bagi masyarakat setempat; bukti pemberdayaan pemilik perkebunan.

Kriteria 2. Para pemilik perkebunan dan perusahaan minyak kelapa sawit mengakui hak guna lahan minyak kelapa sawit dan Bank Dunia mendukung dokumentasi dan proses penyelesaian bilamana perlu.

Dampak: peningkatan hak guna tanah yang transparan memungkinkan terciptanya



lingkungan untuk investasi, akses ke pelayanan keuangan, dan peningkatan mata pencaharian lebih jauh.

Petunjuk-petunjuk pemantauan: hak atas tanah atau hak dokumentasi pengguna; investasi berkelanjutan; peningkatan akses terhadap pelayanan keuangan; proses penyelesaian masalah berhasil dilalui.

Kriteria 3. Dampak dari perkembangan minyak kelapa sawit pada habitat alami sangat terbatas. Bila dampak ini tidak dapat dihindari, langkah-langkah pengurangan akan dilakukan. Prioritas akan diberikan untuk rehabilitasi perkebunan yang sudah ada untuk meningkatkan produktivitas. Berkaitan dengan dukungan proyek terhadap terciptanya perkebunan baru, prioritas akan diberikan pada perkebunan-perkebunan yang dikembangkan pada lahan terdegradasi. Perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan konversi signifikan atau degradasi stok karbon tinggi atau habitat dengan nilai konservasi tinggi akan dihindari.

Petunjuk-petunjuk pemantauan: pemetaan dan survei tanah dan tumbuh-tumbuhan, data produktivitas.

Kriteria 4. Selain itu, di mana sejumlah signifikan minyak kelapa sawit diekspor, sistem ketertelusuran dan sertifikasi siap digunakan; bilamana tidak, dukungan akan diberikan bagi pengembangan sistem pertanggungjawaban yang tepat, dan bagi Bank Dunia, investasi terbatas hanya untuk program pemilik perkebunan.

Dampak: Sistem sudah seimbang (atau masih dalam pengembangan) dan dipantau secara independen; produk dapat dibeli pembelian oleh organisasi dengan syarat memiliki ketahanan.

Petunjuk-petunjuk pemantauan: sistem sudah seimbang (atau masih dalam pengembangan) dan dipantau secara independen.



Lampiran VIII: Pendekatan WBG terhadap Pemantauan dan Evaluasi

Proyek IFC sekarang ini berada di bawah pengawasan, pemantauan, dan evaluasi rutin, seperti dijelaskan dalam prosedur operasional; fungsinya berdasarkan pada standar praktik dan dokumentasi yang ada yang dibuat oleh DFIs untuk diterapkan dan dilaporkan sesuai praktik yang sedang berlaku. Proses ini telah berlangsung selama lima tahun, yang cukup untuk memungkinkan pemantauan antar-tempo dari kemajuan hasil perkembangan. Proses ini diaudit setiap tahun secara independen oleh penyedia jaminan luar, dan tunduk pada pengawasan dan audit oleh *Development Impact Department* dari IFC dan Grup Bank Dunia – Grup Evaluasi Independen.

Bank Dunia bergantung pada kombinasi dari pemantauan dan evaluasi diri serta evaluasi independen. Kebijakan Operasional 13.60 mengemukakan masalah Pemantauan dan Evaluasi.

Rencana kegiatan operasional Bank Dunia menggabungkan kerangka kerja untuk M & E. Bank Dunia memantau dan mengevaluasi kontribusinya sendiri terhadap hasil menggunakan kerangka ini, didasarkan pada sistem M & E peminjam seluas mungkin, dan jika sistem ini tidak mampu menopang, bank akan membantu upaya untuk memperkuat peminjam. Untuk strategi CAS dan sektor /tematik, Bank Dunia mengawasi dan mengevaluasi kemajuan menuju pencapaian hasil yang diidentifikasi di dalam strategi. Berkaitan dengan operasi simpan-pinjam peminjam memantau kemajuan terhadap hasil saat implementasi dan mengevaluasi pencapaian hasil menjelang akhir implementasi; Bank Dunia wajib meninjau laporan M & E peminjam. Untuk layanan

analitis dan pendampingan teknis, Bank Dunia mengawasi dan mengevaluasi hasil di akhir implementasi.

Selain bekerja dengan peminjam, Bank Dunia bekerja sama dengan mitra pembangunan lainnya untuk menyepakati hasil yang diharapkan dari kegiatan pembangunan dan harmonisasi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

Evaluasi independen memberi validasi terhadap kegiatan evaluasi diri, mengesahkan hasil dan/atau melakukan penilaian terpisah terhadap relevansi, efektivitas, dan efisiensi proses dan kegiatan operasional Bank Dunia. Sebuah evaluasi independen dilakukan oleh Grup Evaluasi Independen (IEG) di bawah pengawasan Direktur Jenderal, Evaluasi (DGE), yang melapor langsung kepada Dewan Direksi, yang menyetujui mandat DG ES dan ketentuan referensi IEGs.

Baik di IFC maupun Bank Dunia, proses ini membutuhkan target kuantitatif yang akan ditetapkan untuk setiap pengembangan indikator kinerja pada awal proyek, dengan hasil yang dipantau setiap tahun atau setiap kuartal. Indikator IFC merupakan indikator yang terstandarisasi setepat mungkin, namun kerangka kerja ini dapat diubah dari waktu ke waktu jika proyek dan pemangku kepentingan menemukan persyaratan baru atau kebutuhan untuk memilih dari sekian standar indikator yang diperluas. Proses M&E yang ada memberikan fleksibilitas untuk menambah atau membuat indikator sistematis jika diperlukan. Dokumen proyek Bank Dunia menetapkan indikator yang terpilih di akhir implementasi berdasarkan tujuan pembangunan proyek.



Lampiran IX: Contoh Kemitraan WBG yang Sedang Berlangsung Guna Membantu Proses Berkelanjutan

Kemitraan memainkan peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan

PROFOR (Program mengenai Hutan). PROFOR adalah kemitraan multi-donor mengejar tujuan bersama untuk meningkatkan kontribusi hutan untuk menghilangkan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan proteksi layanan-lingkungan hidup. PROFOR telah melakukan beberapa studi-studi analisis yang relevan dengan implementasi dan pengawasan investasi sector privat di proyek-proyek agribisnis dan hutan. PROFOR dapat berperan dalam memunculkan kesempatan investasi untuk pengembangan minyak kelapa sawit ke perusahaan klien IFC, agensi donor, institusi financial, termasuk Bank Dunia dan IFC.

Forest Carbon Finance Unit dan Forest Carbon Partnership Facility. Carbon Finance Unit (CFU) menggunakan uang yang disediakan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara-negara OECD untuk membeli kredit reduksi pengurangan gas rumah kaca dari negara-negara berkembang dan dalam transisi. Pembelian tersebut dilakukan melalui salah satu dari CFU Carbon Funds (seperti Bio Carbon Fund atau Forest Carbon Partnership Facility) atas nama contributor dan di dalam kerangka kerja protocol Kyoto Clean Development Mechanism (CDM) atau persetujuan implementasi bersama. Bank Dunia bertindak sebagai wali dan sekretariat untuk Forest Carbon Partnership Facility, sebuah kemitraan global berfokus untuk mengurangi emisi dari penggundulan hutan dan degradasi (REDD+), konservasi persediaan karbon hutan, manajemen berkelanjutan hutan dan peningkatan stok karbon. Program-program karbon tersebut dapat berkontribusi ke pembangunan minyak kelapa sawit – sebagai contoh—sebagai bagian dari dukungan WBG ke pemerintah, seperti Indonesia yang telah berkomitmen untuk menghindari konversi hutan dan mulai bergerak menuju penanaman di lahan-lahan non-hutan dan non-gambut.

Forest Investment Program (FIP). Program adalah dari Strategic Climate Fund (SCF) yang didanai oleh banyak donor dan di implementasi oleh bank-bank pembangunan lainnya berkolaborasi dengan agensi-agensi lain. Diciptakan untuk mendukung usaha-usaha mengurangi emisi dari penebangan hutan dan degradasi hutan (REDD+) melalui

investasi pendanaan yang dialokasikan ke penggerak-penggerak penebangan dan degradasi hutan. Bertujuan mempromosikan investasi yang diarahkan ke perubahan di sector perhutanan atau sector-sektor yang mempengaruhi perhutanan. Investasi FIP berkontribusi terhadap banyak manfaat seperti konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan hak-hak masyarakat pribumi dan komunitas local, pengurangan kemiskinan melalui peningkatan taraf hidup di desa.

Melalui inisiatif dedikasi terhadap Penduduk Asli dan Masyarakat setempat, FIP berpotensi untuk menyediakan pendanaan dan peningkatan kapasitas untuk memungkinkan masyarakat local ikut andil dalam diskusi strategi REDD+ nasional di mana strategi investasi tanah, termasuk pembangunan minyak kelapa sawit mungkin dibicarakan. FIP juga dapat memberikan pendanaan untuk membantu komunitas lokal untuk menanam kelapa sawit di lahan terdegradasi untuk mengurangi tekanan terhadap hutan. FIP didisain untuk mengimplementasi sejumlah kecil proyek-proyek yang dipimpin oleh Negara untuk mendukung perubahan di beberapa area, termasuk investasi diluar sector perhutanan.

Negara-negara target FIP sejak Oktober 2010 yang memiliki potensial untuk berkontribusi ke analisis dan pendanaan parsial proyek-proyek kelapa sawit yang didukung oleh WB/IFC termasuk Indonesia Brazil, Ghana, Democratic Republic of Congo, dan Lao People's Democratic Republic.

Growing Forest Partnership (GFP). Sebuah inisiatif yang didanai oleh Bank Dunia dan saat ini mengikutsertakan International Union for the Conservation of Nature (IUCN), International Institute for Environment and Development (IIED), dan Food and Agricultural Organization (FAO) sebagai partner implementasi. GFP bertujuan untuk membentuk aliansi dari komunitas local, para pribumi di tingkatan local, regional, dan international untuk memastikan diskusi global mengenai perhutanan menyertakan tantangan-tantangan yang nyata dan kini yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan para manajer hutan lokal dengan membawa suara-suara dari para komunitas local untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.



Para penduduk lokal yang tergantung kepada hutan dapat menggunakan sumber daya GFP untuk membuat suara mereka terdengar saat dialog-dialog investasi dan konsultasi nasional. Mereka dapat menggunakan dana GFP untuk memobilisasi dan berpartisipasi di ajang debat kelapa sawit baik di tingkat lokal, nasional, ataupun internasional bila dianggap relevan.

GFP aktif di Liberia, Ghana, Mozambique, Guatemala, dan Nepal. Pengalaman yang didapat dari Ghana secara khusus sangat relevan dengan perjanjian-perjanjian keterlibatan WBG di masa depan menyangkut minyak kelapa sawit.

The World Wildlife Fund. Melalui GFP, Bank Dunia dapat membantu memobilisasi masukkan ke pengembangan kelapa sawit dengan berinteraksi dengan dengan perusahaan-perusahaan yang merupakan anggota dari Global Forest and Trade Network (GFTN) milik WWF. Badan ini mendukung inisiatif sector privat yang merangkul prinsip-prinsip konservasi dan manajemen yang bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan hidup yang telah di sertifikasi menurut standar Forest Stewardship Council. Sejak September 2010 GFTN memiliki 272 anggota dan mengatur sekitar 250 juta hektar hutan. Di Indonesia, WWF memiliki kesempatan untuk mempengaruhi pengembangan kelapa sawit dunia melalui program konversi hutannya. WWF is an adalah anggota yang sangat berpengaruh di RSPO.

The Global Partnership for Forest Landscape Restoration. GLP adalah sebuah konsorsium antara WB/IUCN, World Resources

Institute, PROFOR, University of South Dakota, dan UK Forestry Commission; objektifnya adalah untuk memobilisasi pendanaan dan asistensi teknis untuk restorasi lebih dari 800,000 ha lahan hunta terdegradasi di daerah tropis. Fokusnya sampai hari ini adalah penanaman pohon tebang dan kayu untuk bubur kertas. Mobilisasi dukungan GLP untuk hasil hutan seperti kelapa sawit, karet, coklat, kopi, teh, dan kelapa adalah kemungkinan yang dapat ditelusuri.

Kemitraan Perusahaan-Komunitas. Melalui kolaborasi Institute for Environment and Development (IIED) yang berbasis di London, Bank Dunia mempunyai kemungkinan untuk membantu klien potensial IFC dan komunitas lokal untuk membuat sebuah rincian penghargaan dan pembagian keuntungan dengan para penanam kelapa sawit. IIED mengalami pengalaman di Negara-negara seperti Ghana, Kenya, dan Africa Selatan untuk memberikan pelajaran-pelajaran positif. IIED didukung oleh PROFOR melalui program Forest Connect.

Mengawasi Tata Kelola Hutan. Melalui program Forest Law Enforcement Governance and Trade Programme (FLEGT) yang dibiayai oleh EU, WB dapat membantu IFC membawa pengalamannya untuk mengawasi dan mengevaluasi dampak dari proyek-proyek perhutanan dan agrikultur yang didanai oleh WBG. Evaluasi seperti itu sudah berjalan di Uganda dan akan diuji dengan dukungan bantuan Finlandia di 5 negara latin.



Lampiran X: Rekomendasi Penasihat Kepatuhan/Ombudsman dan Tanggapan IFC

Pada bulan Juli 2007, sekelompok LSM mengajukan keluhan kepada CAO yang menitikberatkan pada masalah-masalah lingkungan hidup dan sosial terkait dengan sektor minyak kelapa sawit di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa investasi IFC dalam Grup Wilmar merupakan pelanggaran terhadap sejumlah kebijakan dan tata laksana IFC sendiri.

Keluhan ini kemudian diperiksa oleh kantor kepatuhan CAO. CAO mengeluarkan temuan-temuan hasil pemeriksaannya pada tanggal 19 Juni 2009. Temuan-temuan pokok pemeriksaan tersebut adalah:

1. IFC tidak memiliki strategi spesifik yang memberikan petunjuk untuk investasi-investasinya dalam sektor minyak kelapa sawit untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola yang sudah diketahui.
2. IFC melakukan pengelompokan yang tepat atas fasilitas perdagangan sehingga tidak menerapkan Standar-Standar Kinerjanya dengan benar.
3. IFC gagal dalam menilai secara memadai rantai-rantai pasokan untuk investasi

hilirnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar-Standar Kinerjanya.

Pemeriksaan hanya fokus pada kepatuhan IFC terhadap kebijakan, standar, dan tata laksana IFC sendiri. Pemeriksaan ini tidak membahas tuduhan LSM terhadap Wilmar, karena hal tersebut di luar mandat CAO.

Manajemen IFC menerima dengan baik kontribusi CAO sebagai landasan untuk mendukung IFC dalam memperkokoh dampak-dampak pembangunan investasi-investasinya di lapangan serta juga menggarisbawahi pentingnya untuk menilai dan mengelola risiko dan masalah secara sistematis di sektor-sektor yang memiliki risiko lebih tinggi dan dalam konteks negara.

Manajemen IFC mengakui perlu adanya peningkatan dalam kebijakan dan tata laksananya. IFC, dalam konsultasi dengan CAO, mengembangkan sebuah Rencana Tindak untuk menangani temuan-temuan CAO. Hal-hal pokok dalam Rencana Tindak ini serta status terkini pelaksanaannya disajikan dalam Tabel X-1.

Tabel X-1 Rencana Tindak IFC—Tanggapan terhadap Pemeriksaan CAO

Komitmen IFC	Tindakan Yang Direncanakan	Status Terkini
1. Mengembangkan sebuah strategi yang komprehensif untuk sektor minyak kelapa sawit	Pengembangan strategi dalam berkoordinasi dengan Kelompok Bank Dunia termasuk konsultasi global dengan para pemegang kepentingan	Dokumen akhir akan mencakup sebuah Kerangka Kerja menyeluruh untuk Kelompok Bank Dunia, yang memaparkan sebuah pendekatan bersama bagi kedua lembaga, serta sebuah Strategi untuk keterlibatan IFC dalam sektor minyak kelapa sawit. Pendekatan-pendekatan baru yang tercakup dalam Kerangka Kerja/Strategi ini termasuk sebuah mekanisme untuk sebuah Analisis Situasi Negara, untuk pencakupan bersama oleh IFC dan WB, serta penerapan sebuah alat pengelolaan risiko yang baru-baru ini dikembangkan untuk membantu staf investasi IFC dalam mengenali risiko spesifik negara dalam sektor minyak kelapa sawit. Persiapan masih berlangsung, dengan target penyelesaian pada bulan Maret 2011.
2. Membantu memperkuat Minyak Kelapa Sawit yang Berkelanjutan (RSPO)	Dukungan langsung dari Komite Teknis Keanekaragaman Hidup/ Biodiversity Technical Committee RSPO, dukungan dari proyek-proyek percobaan melalui Program Komoditas Pertanian dan Keanekaragaman Hidup IFC/ Biodiversity and Agricultural	Pembentukan Komite Teknis Keanekaragaman Hidup/ <i>Biodiversity Technical Committee</i> dan perekrutan Koordinator Keanekaragaman Hidup/ <i>Biodiversity Coordinator</i> . Nota Kesepakatan/MOU dalam tahap negosiasi dengan Program <i>Business and Biodiversity Offset</i> (BBOP) untuk penelitian terhadap mekanisme konservasi keanekaragaman hidup.



	Commodities Program (BACP), keterlibatan staf IFC dalam kelompok kerja RSPO, persyaratan kepatuhan klien terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO, dukungan dari rapat wilayah RSPO, dukungan melalui program Layanan Pendampingan teknis, serta dukungan lainnya yang akan dikembangkan melalui pembahasan dengan RSPO sewaktu diperlukan.	Staf IFC yang terlibat dengan Komite Teknis Keanekaragaman Hidup/ <i>Biodiversity Technical Committee (BTC)</i> , Gugus Tugas Pemilik Perkebunan / <i>Smallholder Taskforce (STF)</i> , dan Kelompok Kerja Staf IFC Penanaman Baru/ <i>New Plantings Working Group</i> dalam rapat-rapat Interpretasi Nasional di Ghana dan Brazil. Dukungan masih berlangsung (2009-2011) untuk 3 proyek percobaan dengan <i>PanEco Foundation, Flora and Fauna International and Zoological Society of London</i> untuk program-program keanekaragaman hidup. Proyek-proyek lain yang sedang diteliti oleh Draft IFC Strategy termasuk persyaratan-persyaratan klien-klien produsen untuk mencapai sertifikasi RSPO dalam pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan, atau setaranya.
3. Pengembangan dan pelaksanaan sebuah program Layanan Pendampingan teknis untuk menangani masalah-masalah sektor secara menyeluruh	Pengembangan program-program Pendampingan teknis, termasuk program-program pemilik perkebunan/ <i>smallholder</i> , pengujian kriteria sertifikasi, pengembangan program lingkungan hidup yang memungkinkan adanya usaha serta program kesehatan dan keselamatan kerja (pada awalnya dengan fokus di Indonesia, namun dapat diulang di wilayah-wilayah lainnya).	Pengembangan Program Layanan Nasihat Sektor Minyak Kelapa Sawit di Indonesia/ <i>Indonesia Palm Oil Sector Advisory Services Program</i> (termasuk kelompok pemilik perkebunan, pengembangan program peningkatan, uji lapangan kriteria sertifikasi pemilik perkebunan RSPO, dll.) sedang berlangsung. Program Lingkungan Hidup yang Memungkinkan Usaha Pertanian Indonesia/ <i>Indonesia Agricultural Business Enabling Environment Program</i> (pengenalan hambatan regulatoris, pengembangan solusi) sedang berlangsung, dengan persetujuan pada tanggal 10/3/09. Pengaturan di daerah sedang dalam proses. Pengembangan Program Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja/ <i>Improving Occupational Health & Safety (OH&S) Program</i> untuk Industri Minyak Kelapa Sawit sudah dalam tahap rancangan akhir, termasuk pengumpulan data OH&S di lokasi produsen, pengenalan daerah-daerah prioritas untuk peningkatan dan penciptaan sebuah alat pemeriksaan/audit OH&S yang relevan bagi sektor minyak kelapa sawit.
4. Pertimbangan atas masalah-masalah pengelompokan dalam Kebijakan Keberlangsungan dan Tinjauan Kembali Standar-Standar Kinerja dan Proses Pengkinian	Tinjauan Kembali pengelompokan dan proses penentuan pengelompokan	Tata Laksana Tinjauan Kembali Lingkungan Hidup dan Sosial sudah diperbarui (15 Agustus 2009) untuk merevisi pengelompokan investasi pembiayaan perdagangan komoditas tunggal dan perusahaan tunggal. Pembaruan Konsep Kebijakan Keberlangsungan termasuk tambahan kategori F1, Penyelesaian Kebijakan Keberlangsungan, dan Tinjauan Kembali Standar-Standar Kinerja serta Proses Pembaruan diharapkan pada bulan Mei 2011 dapat selesai.
5. Pertimbangan atas masalah-masalah rantai pasokan dalam Kebijakan Keberlangsungan dan Tinjauan Kembali Standar-Standar Kinerja serta Proses Pengkinian	Pertimbangan mengenai aspek-aspek rantai pasokan yang perlu perhatian khusus, bagaimana caranya menangani spesifik persyaratan-persyaratan ini dalam Standar-Standar Kinerja dan Nota Petunjuk serta mungkin dalam garis-garis petunjuk sektoral Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Hidup. Persiapan untuk berbagai alat	Templat pemetaan rantai pasokan dirancang dan saat ini digunakan untuk penerapan terhadap proyek-proyek usaha agribisnis, tidak hanya untuk proyek minyak kelapa sawit. Daftar contong lapangan berdasarkan standar-standar kinerja IFC telah dikembangkan untuk penggunaan spesifik bagi proyek-proyek minyak kelapa sawit. Sebuah analisis komparatif mengenai Standar-Standar Kinerja IFC dibandingkan dengan RSPO P&C dan <i>SANnya Rainforest Alliance</i> telah diselesaikan pada bulan November 2010. Program pelatihan bagi petugas-petugas investasi



	termasuk: (i) daftar contreg penilaian tingkat lapangan; (ii) templat pemetaan rantai pasokan, dan; (iii) analisis komparatif standar RSPO P&C dan standar <i>Sustainable Agriculture Network (SAN)</i> .	sedang dalam persiapan dan dijadwalkan pada musim semi tahun 2011. Program ini akan mencakup persyaratan-persyaratan standar-standar kinerja, pelaksanaan kerangka kerja matriks risiko, praktik-praktik terbaik dalam penilaian risiko rantai pasokan. Penyelesaian kebijakan keberlangsungan dan tinjauan kembali standar-standar kinerja serta proses pengkinian diharapkan selesai pada bulan Mei 2011.
6. Tinjauan kembali atas perkebunan-perkebunan Wilmar di Indonesia untuk mengenali masalah-masalah Lingkungan Hidup & Sosial yang masih tersisa dan memerlukan perhatian, serta tindak lanjut atas masalah-masalah yang masih berlangsung mengenai hubungan masyarakat	Pemeriksaan/audit terhadap operasional perkebunan-perkebunan Wilmar di Indonesia	Pemeriksaan/audit terhadap percontohan dari perkebunan-perkebunan dilakukan oleh ProForest, dengan laporan akhir diperkirakan pada bulan Januari 2011
7. Resolusi tentang masalah-masalah pengelompokan dan pemrosesan	Mengembangkan mekanisme untuk memastikan bahwa tekanan komersial tidak mendahului persyaratan-persyaratan lingkungan hidup dan sosial	Pembahasan antara Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Pertanian (tanggal 21 September 2009) menghasilkan sebuah perjanjian mengenai tata laksana internal yang disepakati untuk alokasi proyek dan uji tuntas lingkungan hidup dan sosial.
8. Perbaikan-perbaikan dalam uji tuntas berkaitan dengan laporan-laporan LSM	Mempersiapkan tanggapan kepada CAO mengenai perbaikan/peningkatan atas mekanisme-mekanisme uji tuntas	Tanggapan resmi disiapkan untuk CAO, mencakup mekanisme-mekanisme guna memastikan bahwa informasi latar belakang yang berkaitan telah sepenuhnya dipertimbangkan selama keseluruhan proses penilaian proyek.



Lampiran XI: Meningkatkan Kehidupan Para Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit: Peran Sektor Swasta

Sebuah Ringkasan Eksekutif oleh FSG

"Meningkatkan Mata Pencaharian Para Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit: Peran Sektor Swasta" (diselenggarakan oleh IFC guna menyampaikan perkembangan kerangka kerja WBG dalam sektor minyak kelapa sawit)

Tujuan Laporan

Laporan ini menyajikan sebuah penilaian atas upaya-upaya sektor swasta untuk meningkatkan mata pencaharian para pemilik perkebunan dalam produksi minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling banyak diperdagangkan di dunia dan industrinya mempekerjakan jutaan orang di dunia yang berkembang. Pada waktu yang bersamaan, produksi minyak kelapa sawit telah membuahkan kontroversi yang cukup berarti dikarenakan potensi dampaknya terhadap lingkungan hidup, serta juga pelbagai tantangan sosial. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para petani pemilik perkebunan – yang mengendalikan sekitar 50 hektar tanah yang digarap – khususnya sangat berat.

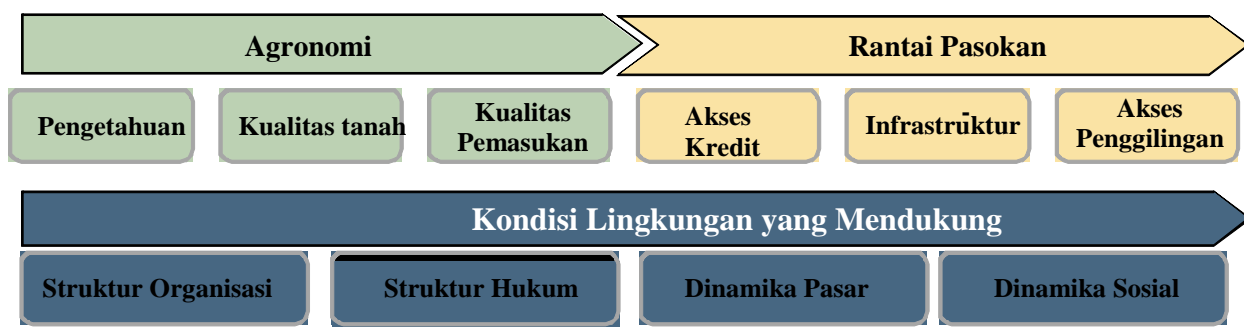
Menanggapi tantangan-tantangan ini memerlukan partisipasi dari keseluruhan sektor, termasuk para donor, masyarakat sipil, pemerintah, dan korporasi. Kami yakin bahwa korporasi-korporasi dalam rantai pasokan minyak kelapa sawit dapat memainkan peran penting untuk meningkatkan mata pencaharian pemilik perkebunan, dengan sumber daya dan keahlian yang dimiliki. Upaya-upaya demikian dapat memberi dampak penghidupan bagi para pemilik perkebunan serta juga memberi manfaat kepada perusahaan-perusahaan melalui imbal balik yang lebih besar dan

kualitas yang meningkat – sebuah peluang yang berarti untuk menciptakan nilai berbagi untuk sektor swasta.

Laporan ini diciptakan untuk memberitahukan mengenai perkembangan kerangka kerja WBG untuk minyak kelapa sawit. Dikarenakan tekanan kerangka kerja WBG terhadap penangan kebutuhan pemilik perkebunan, temuan-temuan dalam laporan ini dapat digunakan sebagai garis petunjuk yang penting untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa mendatang. Penelitian kami dilakukan melalui tahapan 28 wawancara dengan serangkaian pemegang kepentingan, termasuk perwakilan dari perusahaan, lembaga sosial masyarakat, asosiasi-asosiasi industri, dan badan-badan multilateral, serta juga penelitian sekunder.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mata Pencaharian Pemilik Perkebunan

Meskipun kondisi dan struktur pemilik perkebunan bervariasi antardaerah, tiga faktor kategori utama mempengaruhi mata pencaharian pemilik perkebunan: agronomi, rantai pasokan, dan lingkungan yang mendukung. Dalam masing-masing faktor ini, terdapat kebutuhan-kebutuhan signifikan untuk meningkatkan mata pencaharian pemilik perkebunan.



Profil Upaya-Upaya Sektor Swasta

Perusahaan-perusahaan produsen minyak kelapa sawit mempunyai kepentingan usaha yang substansial dalam meningkatkan produktivitas dan mata pencaharian, pemilik

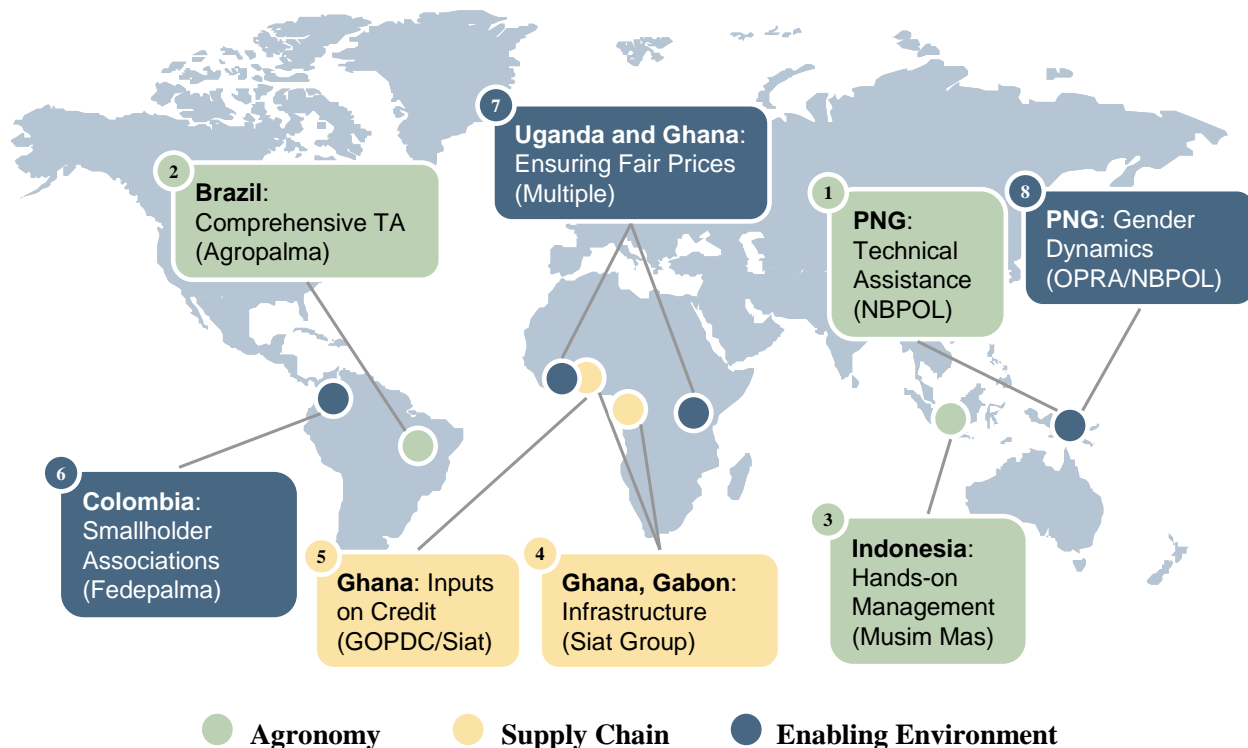
perkebunan. Penelitian kami mengenali beberapa contoh upaya-upaya yang diadakan oleh sektor swasta tersebut. Dalam banyak hal, perusahaan-perusahaan fokus kepada pemberian dukungan atas berbagai masalah



agronomi melalui bantuan teknis. Sebagai contoh, New Britain Palm Oil mendukung penyediaan layanan-layanan perpanjangan kepada pemilik perkebunan di Papua Nugini untuk meningkatkan produktivitas. Perusahaan-perusahaan lainnya, seperti Siat Group terlibat dalam memperkuat kondisi rantai pasokan dengan peningkatan mekanisme-mekanisme bagi pemilik perkebunan untuk mengakses kredit dari penggilingan-penggilingan minyak kelapa sawit. Beberapa perusahaan berupaya untuk menangani elemen-elemen lingkungan yang memungkinkan bagi mata pencaharian pemilik

perkebunan: di Uganda, Bidco bermitra dengan IFAD dan pemerintah Uganda untuk mengembangkan sebuah kebijakan harga yang memastikan sebuah mekanisme pemberian harga yang wajar dan transparan bagi pemilik perkebunan.

Tulisan ini memuat upaya-upaya perkembangan pemilik perkebunan, sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.



Tren Upaya-Upaya Sektor Swasta

Selain berbagai macam contoh kasus spesifik proyek-proyek yang ada, penelitian kami mengidentifikasi beberapa tema mengenai peran sektor swasta dalam mempromosikan pengembangan pemilik perkebunan:

- **Lebih Banyak Yang Dibutuhkan:** Meskipun ada upaya-upaya penting yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, ada kebutuhan untuk keterlibatan yang lebih signifikan oleh sektor swasta dalam menangani tantangan-tantangan mata pencaharian pemilik perkebunan. Ada kesenjangan substansial yang terus-menerus antara pemilik perkebunan dengan tanah yang sempit dan pemilik perkebunan dengan tanah yang luas.

Namun, upaya yang dilakukan menitikberatkan kebutuhan dan tetap fokus terhadap perkembangan para petani pemilik perkebunan.

- **Kekosongan Kepemimpinan:** Para pemegang kepentingan tidak dapat mengidentifikasi perusahaan-perusahaan spesifik yang merupakan pemimpin dalam meningkatkan mata pencaharian pemilik perkebunan minyak kelapa sawit. Beberapa sektor korporasi lainnya, seperti industri farmasi, sejumlah besar perusahaan terdepan menerapkan pendekatan-pendekatan praktik terbaik dalam mengupayakan tanggung jawab sosial korporasi. Sektor minyak kelapa sawit tidak memiliki pemimpin-pemimpin yang telah diterima secara luas dalam tanggung jawab



sosial korporasi sehubungan dengan pemilik perkebunan.

- **Perihal Sistem:** Beberapa perusahaan sedang bekerja dalam menangani masalah-masalah lingkungan yang memiliki dampak berskala besar dan melampaui pemilik perkebunan. Beberapa perusahaan bekerja sesuai dengan faktor-faktor lingkungan dengan cara yang lebih terbatas misalnya, memperkuat asosiasi-asosiasi antara pemilik perkebunan, atau dengan menangani masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Sementara itu, beberapa perusahaan lainnya bekerja untuk kondisi lingkungan yang lebih luas, seperti mengembangkan kapasitas kelembagaan nasional yang berkaitan dengan perpanjangan dan penelitian. Ini berlawanan dengan beberapa hasil panen lainnya seperti kakao. Beberapa prakarsa sedang berjalan dan dalam tahap pendekatan-pendekatan sistemik untuk pengembangan.

- **Daya Kemitraan:** Kolaborasi lintas sektor merupakan komponen penting dalam banyak upaya yang ada. Meskipun perusahaan-perusahaan dapat secara langsung memainkan peran penting untuk meningkatkan mata pencaharian pemilik perkebunan, ada potensi signifikan untuk lebih banyak mendapat tantangan sistemik yang harus ditangani melalui kolaborasi multisektoral.

Rekomendasi Untuk Keterlibatan Sektor Swasta

Korporasi-korporasi memiliki peluang-peluang signifikan untuk berkomitmen mengembangkan mata pencaharian pemilik perkebunan dengan cara-cara yang mengaitkan berbagai upaya sesuai keahlian dan prioritas usahanya secara lebih dekat. Sambil perusahaan melibatkan diri dalam meningkatkan mata pencaharian pemilik perkebunan, mereka pun seyogyanya mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi berikut ini:

1. **Mengenali peluang untuk penciptaan nilai berbagi** yang meningkatkan daya saing sebuah perusahaan sambil sekaligus memajukan keadaan ekonomi-sosial di dalam masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi
2. **Memprioritaskan masalah-masalah yang menonjolkan kemampuan inti perusahaan tersebut** (misalkan, menyediakan bantuan teknis dalam meningkatkan imbal balik merupakan kompetensi inti untuk

perusahaan-perusahaan pertanian, sedangkan investasi dalam konstruksi jalan tidak menggunakan kekuatan inti perusahaan)

3. **Bermitra dengan pelaku lainnya guna mencapai dampak kolektif**, bekerja dengan pemerintah, NGO, para donor, atau perusahaan lainnya untuk mengembangkan strategi bersama daripada hanya mengejar proyek-proyek individu
4. **Mengambil manfaat dari momentum yang ada** di lapangan mengenai masalah-masalah tertentu (misalkan, sertifikasi) agar meningkatkan peluang untuk berhasil
5. **Mempertimbangkan skala dampak** dari intervensi, dan fokus kepada peluang-peluang dengan manfaat berskala besar yang dapat dijadikan contoh untuk pengulangan/replikasi
6. **Mengukur hasil berdasarkan** upaya-upaya pengembangan pemilik perkebunan agar dapat belajar secara efektif untuk informasi bagi proyek-proyek di masa mendatang

Peluang Strategis Untuk Sektor Swasta

Para pemegang kepentingan mengusulkan beberapa bagian di mana korporasi dapat meningkatkan mata pencaharian pemilik perkebunan. Ini termasuk:

- **Penciptaan struktur insentif baru:** diberikan kepada petani yang menerapkan praktik-praktik terbaik agronomi (misalkan membayar para petani berdasarkan penggunaan pupuk yang memadai)
- **Bekerja dengan lembaga-lembaga keuangan untuk mengembangkan produk-produk keuangan yang dirancang memadai** untuk para petani (misalkan, akses ke pinjaman dengan pembayaran kembali yang ditunda, namun tidak memerlukan hak milik tanah sebagai jaminan)
- **Meningkatkan produktivitas** ke dalam langkah-langkah yang diambil terhadap sertifikasi pemilik perkebunan (misalkan, memasukkan bantuan teknis yang lebih kuat ke dalam Pengawasan yang dipersyaratkan oleh standar-standar RSPO)

Para Donor dan badan-badan pembangunan, seperti IFC, dapat menyediakan insentif bagi sektor swasta untuk investasi dalam model-model inovatif dan upaya-upaya penelitian



dana yang akan mendorong peningkatan investasi.

Kami berharap bahwa peluang-peluang yang disajikan di sini dapat digunakan untuk mengambil tindakan terhadap tantangan-

tantangan yang dihadapi oleh pemilik perkebunan, untuk meningkatkan mata pencaharian di sektor minyak kelapa sawit.



Lampiran XII: Alat Pemeriksaan dan Penilaian Risiko IFC

Proses penilaian risiko akan dilaksanakan dalam konteks strategi investasi IFC di sektor minyak kelapa sawit. Versi yang disajikan dalam dokumen ini khusus mengenai minyak kelapa sawit. Dengan mensyaratkan tinjauan kembali yang proaktif mengenai risiko tingkat proyek, sektor/komoditas dan negara, IFC bertujuan untuk memastikan pertimbangan dini terhadap risiko tingkat proyek dan kontekstual, menilai pilihan-pilihan untuk mitigasi melalui langkah-langkah tingkat proyek dan/atau sektoral, dengan masing-masing WB dan Jasa Pendampingan Teknis IFC, dan dengan demikian memastikan bahwa masalah-masalah Lingkungan Hidup dan Sosial yang lebih luas terpadu ke dalam keputusan-keputusan dini yang berkaitan dengan pengajuan investasi. Dalam menyusun dan menggunakan alat ini, IFC akan menyerap pengetahuan WB dan lembaga-lembaga penelitian, pengetahuan internnya sendiri mengenai kondisi negara dan sektor, berikut pula informasi dari sumber daya eksternal yang memadai guna mendukung penilaian terhadap pengajuan investasi.

Penilaian tingkat negara diawali pada tingkat yang tinggi dan mempertimbangkan semua faktor yang mungkin mempengaruhi investasi IFC dalam negara tersebut. Ini dapat mencakup indikator-indikator yang lebih spesifik dan berkontribusi terhadapnya, seperti kerangka kerja hukum negara tersebut, infrastrukturnya, kebijakan-kebijakan internal yang berhubungan dengan Standar-Standar Kinerja IFC, serta faktor-faktor lainnya. Penilaian tingkat sektor juga diawali pada :

tingkat yang tinggi, namun bertujuan ke sektor spesifik yang sedang dalam pertimbangan. Tujuannya adalah untuk meninjau kembali semua faktor yang mungkin mempengaruhi investasi IFC dalam sektor tersebut, dalam negara yang sebelumnya sudah diidentifikasi. Penilaian tingkat proyek dimaksudkan agar lebih komprehensif dan diselesaikan atas dasar kasus per kasus. Meskipun ini sekali lagi melibatkan suatu proses pemeringkatan, faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi sebuah investasi IFC menjadi lebih spesifik mengenai lokasinya.

Proses penilaian risiko dini akan memberitahukan landasan atas mana pengajuan investasi akan diberi pemeringkatan, baik mengenai ketentuan-ketentuan Kategorisasi Lingkungan Hidup dan Sosial IFC, serta juga tambahan pemeringkatan internal untuk rendah, sedang, dan tinggi. Proses pemeringkatan memberikan peluang untuk mengenali daerah-daerah kekhawatiran yang mungkin memerlukan penilaian risiko yang lebih rinci sebelum proyek dikategorisasi.

Kriteria khas pemeringkatan tingkat negara diuraikan dalam tabel berikut, yang harus dipandang hanya sebagai sebuah contoh dari masalah-masalah yang akan ditangani dan bukan sebagai sebuah daftar yang lengkap. Penilaian lanjutan terhadap kriteria individu akan dibimbing oleh sebuah daftar conteng berisi pertanyaan-pertanyaan.

Pemeringkatan		Kriteria Pemeringkatan
Kebijakan	Penanda-tanganan Konvensi Internasional	Penanda-tanganan traktat-traktat dan konvensi-konvensi seperti untuk keanekaragaman hidup
	Kebijakan sektor (Pertanian)	Apakah sudah ada kebijakan nasional untuk komoditas pertanian ini: sebagai contoh, program dan kebijakan nasional (termasuk REDD + program-program) yang mendukung pengembangan, produksi dan pemasaran komoditas ini, kebijakan ketahanan pangan nasional, kebijakan kehutanan nasional, rencana induk pertanian?
Hukum	Nasional	Apakah sudah ada?
	Sosial (termasuk tenaga kerja dan kondisi kerja)	Kondisi Tenaga Kerja dan Kerja – misalkan Tenaga Kerja Anak, Tenaga Kerja Paksa, kebebasan berasosiasi, dll.
	Lingkungan Hidup (termasuk	Pencegahan dan Pengurangan Polusi –

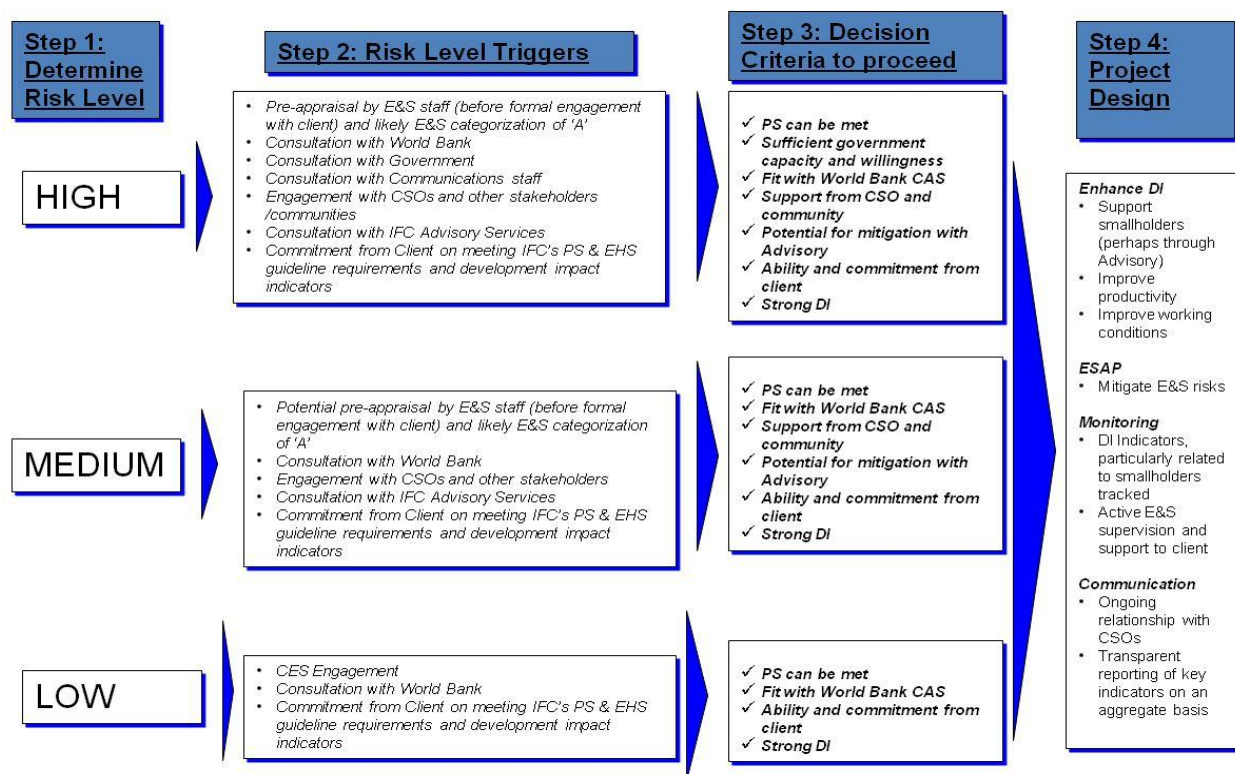


Pemeringkatan		Kriteria Pemeringkatan
	pengecahan dan pengurangan polusi)	misalkan:penilaian lingkungan hidup, pengelolaan dan pelaporan.
	Keamanan, Keselamatan dan kesehatan masyarakat	Keamanan, Keselamatan dan kesehatan masyarakat
	Penggunaan tanah yang diakuisisi dan penempatan/ penyelesaian secara tidak sukarela	Penempatan/Penyelesaian Tanah Akuisisi Yang Dipaksakan, seperti: kehilangan tempat tinggal secara paksa, kompensasi, hak adat.
	Pemilik perkebunan	Apakah kebutuhan pemilik perkebunan dipertimbangkan? Hubungan apa yang ada dan ketentuannya yang berlaku antara klien potensial untuk IFC dan petani kecil yang terkait?
	Penduduk Asli	Penduduk Asli – misalnya adanya kerangka kerja regulatoris dan hukum secara nasional sehubungan dengan Penduduk Asli, tingkat pemberlakuannya,
	Warisan budaya/adat	Warisan budaya/adat - misalkan, perlindungan dan pelestarian warisan budaya.
	Tuntutan terhadap tanah yang berbenturan	Apakah ada tuntutan atas tanah yang berbenturan – misalkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa?
	Kepatuhan	Apakah tingkat kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi kontraktual lainnya?
Infrastruktur	Keseluruhan	Apakah sudah ada infrastruktur yang telah dikembangkan dengan jelas?
	Layanan Kesehatan	Apakah sudah ada layanan kesehatan yang memadai untuk pekerja serta keluarganya?
	Sistem Pendidikan	Apakah sudah ada sistem pendidikan yang menyediakan pengembangan sebuah basis keterampilan yang berjangka panjang?
Angkatan kerja	Upah	Apakah upah yang dibayarkan adil dan wajar untuk pekerjaan yang dilakukan?
	Kondisi kerja dan pengelolaan hubungan pekerja	Apakah kondisi kerja yang diterapkan memenuhi standar-standar nasional dan internasional?
	Perlindungan untuk angkatan kerja	Apakah angkatan kerja dilindungi terhadap tenaga kerja anak atau paksaan?
	Pekerja yang bukan pegawai (kontraktor)	Apakah peran kontraktor diakui, dipahami dan dikelola secara efektif?
	Rantai Pasokan	Apakah sudah ada struktur pendukung rantai pasokan?
Ancaman-ancaman (dari atau terhadap proyek)	Hambatan budaya/adat	Apakah ada hambatan budaya/adat yang diketahui mungkin berkaitan dengan usulan ini?
	Sengketa tanah setempat/daerah	Apakah ada sengketa tanah setempat/daerah?
	Hambatan budaya/adat setempat/daerah	Apakah ada hambatan budaya/adat setempat/daerah terhadap komoditas ini?
	Masalah reputasi	Apakah ada masalah yang berkaitan dengan komoditas ini yang mungkin berdampak terhadap kelayakan usulan?
	Polusi	Apakah usulan akan menciptakan polusi?
	Keanekaragaman hidup	Apakah akan ada dampak terhadap keanekaragaman hidup sebagai akibat dari usulan ini?
Pasar	Sertifikasi	Apakah ada skema sertifikasi yang telah diakui untuk komoditas ini?
Klien	Sejarah	Apakah klien memiliki sejarah dengan usulan-usulan yang gagal?



Pemeriksaan		Kriteria Pemeriksaan
	Reputasi	Apakah klien memiliki reputasi yang baik?
Masyarakat	Daya tahan masyarakat	Apakah masyarakat memiliki daya tahan untuk pulih kembali apabila usulan gagal?
	Penduduk Asli	Apakah ada penduduk asli dan apakah ada kebutuhan-kebutuhan yang ditangani dalam usulan?
	Perubahan sosial	Apakah usulan akan menciptakan perubahan sosial yang tidak dimaksudkan?
	Penerimaan setempat terhadap proyek	Apakah ini merupakan penerimaan setempat atas usulannya?
Sumber daya	Tanah yang tersedia (pertanian/degradasi)	Apakah tanah yang tersedia memadai untuk mendukung perumahan dan perluasan komoditas? Apakah terdapat konversi tanah untuk tanaman pangan yang dapat dimakan?
	Air	Apakah sumber daya air yang tersedia memadai?

Tergantung pada penilaian risiko dini, ini akan "memicu" tata laksana dan tindakan tambahan sebagaimana yang diperlihatkan dalam tabel di bawah ini:



Lampiran XIII: Kerangka Kerja Berkelanjutan IFC: Aplikasi Masalah Lingkungan dan Sosial pada Proyek Kelapa Sawit

Pendahuluan. Kerangka Kerja IFC yang berkelanjutan⁷³ diadopsi pada tanggal 30 April 2006. Kebijakan Sosial dan Lingkungan IFC (Kebijakan Keberlanjutan) dan Kebijakan Keterbukaan Informasi IFC (Kebijakan Pengungkapan) menjelaskan peran dan tanggung jawab IFC, serta Standar Kinerja (PS) menggambarkan hasil yang klien IFC telah capai pada proyek-proyeknya. PS IFC telah menjadi standar internasional yang diakui dan diadopsi untuk sektor swasta lingkungan dan sosial manajemen risiko (E&S) di pasar negara berkembang.⁷⁴

Kerangka Kerja Berkelanjutan diperkuat oleh dokumen-dokumen pendukung, seperti spesifik pada sektor WBG. Kerangka keberlanjutan ini diperkuat dengan dokumen, seperti sektoral (WBG) kesehatan lingkungan WBG, dan pedoman keselamatan (Pedoman EH&S WBG) 75 serta catatan best practice.⁷⁶

PS ditulis agar memiliki relevansi dengan konteks global di seluruh negara, sektor-dan proyek-spesifik. Aplikasinya bervariasi tergantung pada risiko spesifik dan dampak dari proyek individu. IFC saat ini sedang merevisi Kerangka Keberlanjutan dan memperkirakan bahwa pada musim

semi/panas 2011, persetujuan Dewan dijamin sudah didapat.⁷⁷

Delapan Standar Kinerja adalah sebagai berikut:

PS1: Penilaian Sosial, Lingkungan dan Sistem Manajemen

PS2: Tenaga Kerja dan Kondisi kerja

PS3: Pencegahan Polusi dan Pencegah

PS4: Kesehatan Masyarakat, Keselamatan, dan Keamanan

PS5: Pembebasan Tanah dan Pemukiman

PS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

PS7: Penduduk Asli

PS8: Warisan Budaya

IFC Tinjauan Lingkungan dan Sosial Prosedur (ESRP) merilis staf IFC prosedur berikut untuk mengimplementasikan Kerangka Kerja Keberlanjutan.⁷⁸ Para ESRP menjelaskan persyaratan dari S&E IFC berikut untuk masing-masing investasi melalui siklus penilaian, seluruh proyek dan persetujuan (termasuk ringkasan rancangan proyek (PDS), kategorisasi awal dan pengujian E&S PS berlaku), Tinjauan Investasi (termasuk penyusunan lingkungan Sosial Review Ringkasan (CSR) dan Lingkungan dan Sosial Rencana Aksi (ESAP)) ke surat pernyataan Dewan Direksi. Menilai dan mengelola dampak sosial dan lingkungan dengan cara yang konsisten sesuai persyaratan PS adalah tanggung jawab klien. Peran dan tanggung jawab IFC adalah menilai pekerjaan klien, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan hasil dan konsisten dengan persyaratan kebijakan. Jika ditemui ada perbedaan, IFC mungkin memerlukan klien untuk memperbaiki kekurangan sebelum mengambil proyek dari para Dewan Direksi untuk persetujuan atau untuk pertimbangan tindakan yang konsekuensinya kurang serius. IFC akan memerlukan langkah-langkah khusus untuk memastikan bahwa kesenjangan tertutup dan

⁷³ Kerangka kerja kebijakan keberlanjutan IFC termasuk keberlanjutan sosial dan lingkungan, kebijakan IFC pada standar pengungkapan dan kinerja IFC. Ini adalah dalam <http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvSocStandards>.

⁷⁴ Sebagai contoh, seperti yang diadopsi oleh 67 lembaga keuangan yang telah disertifikasi pinjaman mereka dengan Prinsip Equator. Prinsip Equator dipandang sebagai standar sukarela terkemuka untuk mengelola risiko sosial dan lingkungan untuk pembiayaan proyek di pasar negara berkembang.

⁷⁵ Standar Kinerja 3 memerlukan pelanggan untuk menggunakan pedoman WBG EH&S. Pedoman ini adalah dokumen referensi teknis contoh spesifik industri umum dan praktik industri internasional terbaik (GIIP). Secara khusus, untuk operasi minyak kelapa sawit, pedoman yang berlaku EH & S adalah yang berkaitan dengan EH Umum & S, produksi tanaman perkebunan dan pengolahan minyak nabati.

⁷⁶ Catatan praktik yang baik memberikan petunjuk kepada klien dalam berbagai topik, seperti mengurangi staf, berurusan dengan klaim masyarakat dan HIV / AIDS di tempat kerja.

⁷⁷ Mengacu kepada <http://www.ifc.org/policyreview> untuk informasi mengenai peninjauan dan proses update.

⁷⁸ ESRPs dapat ditemui pada <http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvSocStandards>.



bahwa akan sesuai dengan PS dari waktu ke waktu. Kegiatan ini dijelaskan dalam ESAP dan termasuk dalam dokumentasi investasi.

Pengkategorian

Keberlanjutan Kebijakan mendefinisikan pendekatan IFC untuk kategorisasi proyek, dan persyaratan rinci termasuk dalam proses ESRPs. IFC menggunakan sistem kategorisasi dan lingkungan sosial untuk mengkomunikasikan besarnya dampak potensial, sebagaimana dinilai oleh klien dan disetujui oleh IFC selama penilaian, dan menentukan persyaratan kelembagaan IFC terhadap pengungkapan informasi proyek kepada masyarakat sebelum klien menyajikan proyek kepada Dewan Direksi.

Kategori proyek ini adalah:

Kategori A: Proyek dengan potensi dampak yang signifikan merugikan yaitu kategori sosial atau lingkungan beragam, tidak dapat dibalik (irreversible), atau belum pernah terjadi sebelumnya

Kategori B: Proyek dengan dampak potensial yang merugikan sosial atau lingkungan terbatas atau kurang, umumnya situs-spesifik, sebagian besar reversibel, dan mudah ditangani melalui mitigasi tindakan

Kategori C: Proyek dengan minimal atau tidak ada dampak sosial atau lingkungan yang merugikan, termasuk perantara keuangan (FI), proyek dengan risiko minimal atau tidak membahayakan

Kategori FI: Semua proyek FI yang bukan proyek Kategori

Sebagai contoh, perusahaan perdagangan secara vertikal mengintegrasikan sosial dan kategorisasi lingkungan mencerminkan dampak dari kepemilikan, operasi, dan kegiatan, jika diketahui. Setelah laporan audit Wilmar, IFC diperbarui ESRPs dengan bahasa spesifik tentang jenis investasi. vertikal perusahaan dagang yang terpadu bahwa kontrol mengerahkan atas beberapa tingkat rantai pasokan dapat menyebabkan risiko lebih besar, tergantung pada komoditi, dari investasi murni dalam pedagang komoditas. Akibatnya, investasi mungkin akan dikategorikan sebagai Kategori A atau B.

Manajemen Lingkungan dan Pengkajian Sosial

IFC membutuhkan klien untuk menilai proyek mereka terhadap dampak E&S aktual atau potensial, tergantung pada tahap proyek di

mana entri IFC (misalnya, perencanaan, pembangunan, operasi, atau perluasan) dan isu-isu potensial, penilaian mungkin penilaian dampak lingkungan dan sosial yang komprehensif (ESIA), yang terbatas atau terfokus lingkungan dan sosial penilaian; audit, atau aplikasi langsung dari penentuan tapak lingkungan, standar polusi, kriteria desain, atau standar konstruksi. Terlepas dari pendekatan ini, penilaian harus mencakup Standar Kinerja IFC yang relevan (PS1 melalui PS8) dan diharapkan sepadan dengan dampak yang aktual dan potensial proyek. Berlaku hukum nasional dan peraturan yurisdiksi tempat proyek beroperasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan lingkungan, termasuk hukum melaksanakan kewajiban negara tuan rumah di bawah hukum internasional, harus diperhitungkan.

Berdasarkan penilaian gabungan E&S, klien diminta untuk memasukkan penilaian ke dalam sistem manajemen yang terpadu, berfokus pada pengelolaan isu-isu sosial dan lingkungan (termasuk sumber daya manusia dan kesehatan dan keselamatan kerja) yang berhubungan dengan proyek tersebut dengan tujuan menghindari mereka atau, jika tidak memungkinkan, meminimalkan atau kompensasi bagi mereka. PS1, berisi persyaratan yang berkaitan untuk mengembangkan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen sosial dan lingkungan. Selain ringkasan disediakan dalam tubuh dokumen, paragraf berikut

Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali

PS5, Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali, alamat akuisisi proyek atau sewa tanah di mana ada kemungkinan pengambilalihan. Hal ini tidak berlaku untuk situasi yaitu penjual-pembeli bersedia. PS berfokus pada proses pembebasan lahan, kompensasi yang memadai untuk tanah dan aset, dan mengurangi perpindahan fisik atau ekonomi. Aplikasi PS5 tidak tergantung pada keberadaan (formal) judul. Hal ini juga berlaku untuk situasi di mana kepemilikan tanah adat ditunjukkan. (Catatan, apapun, bahwa proyek pembangunan PS7 menangani penduduk asli dan relokasi mereka.) Sementara untuk menghindari dampak yang lebih baik, di mana mereka tidak dapat dihindari, proyek tersebut harus menunjukkan bahwa proses yang ada telah diikuti. Transaksi tanah diperiksa untuk (1) memastikan proses akuisisi (ini mungkin termasuk kehadiran Kompensasi



Framework) dan (2) mengkonfirmasi kecukupan dan tepat waktu pembayaran kompensasi tanah dan aset produktif (termasuk pabrik dan infrastruktur) serta pembayaran untuk pembebasan tanah sebelumnya, adanya keluhan tentang mekanisme kompensasi, dan persyaratan lainnya. Adanya akuisisi paksa tanah di pemindahan fisik atau ekonomi, tinjauan IFC akan dukungan klien yang diberikan untuk pemulihan mata pencaharian dan standar hidup para pengungsi. Untuk proyek di mana pemindahan paksa hanya mungkin terjadi di masa depan, IFC membutuhkan klien untuk mengembangkan Kerangka Pemukiman Kembali yang memerlukan pengembangan proyek tertentu Pemukiman Rencana Aksi. PS5 menguraikan persyaratan untuk pengelolaan pemindahan fisik dan ekonomi, serta dokumen pendukung, seperti Pedoman Pengembangan Pemukiman Kembali Rencana Aksi dan menyediakan panduan praktik terbaik.

Penduduk Asli

Risiko proyek yang mempengaruhi penduduk asli dibahas dalam PS7 dan didirikan pada awal proses evaluasi E & S. Berbagai sumber informasi, termasuk klien WBG sumber daya ESIA, sastra, media dan kontak negara dihubungi atau ditinjau. Ketika klien memperluas pemilikan tanah mereka, IFC mengharuskan mereka untuk memastikan bahwa prosedur menilai tanah mencakup pertimbangan risiko yang mempengaruhi penduduk asli. IFC memeriksa manajemen klien terkait isu utama penduduk asli, termasuk identifikasi penduduk asli, penilaian yang tepat dan menyeluruh dari komunitas penduduk asli, termasuk klaim tanah, kepemilikan adat tradisional atau penggunaan sumber daya tanah dan alam, kegiatan mata pencaharian, kerentanan dan kepedulian yang sama, mitigasi restorasi, tepat atau kompensasi. dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Para Klien IFC diharuskan untuk menerapkan hak-hak masyarakat adat dan penggunaan tanah dan sumber daya menurut PS5 dan PS7. Jika perlu pengembangan, dan penerapan mitigasi dapat terjadi melalui rencana pengembangan masyarakat dikodifikasikan terhadap dampak negatif dari penduduk asli. Klien juga harus memenuhi persyaratan konsultasi PS (FPIC dan Good Faith Negosiasi).

Masyarakat Lokal dan Kelompok Rentan

Biasanya penilaian klien terhadap risiko dan dampak dari E & S difokuskan pada masyarakat yang secara langsung terkena dampak, meskipun untuk mempertimbangkan dampak dari rekening sekunder atau induksi. Penilaian IFC yang terlibat penelaahan definisi wilayah yang terkena dampak proyek dan penilaian risiko S. E & penilaian proyek sosial juga diharuskan untuk mempertimbangkan kelompok rentan (seperti wanita lansia, dan perempuan kepala rumah tangga) dan, bila relevan, untuk memastikan bahwa mitigasi mengadopsi langkah-langkah untuk memperbaiki kelompok tersebut. Sebagai bagian dari kajian tersebut, IFC E & S spesialis mengunjungi masyarakat yang terpengaruh. Pertemuan dengan berbagai kelompok-termasuk wakil-wakil yang diakui (baik administratif dan tradisional), pemuda perempuan, dan lain-lain membahas proyek dan dampaknya, mempengaruhi mata pencaharian masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan proses proyek (termasuk mekanisme pengaduan) dan menghindari proyek, minimalisasi, mitigasi, restorasi, dan kompensasi tindakan. Jika perlu, pertemuan terpisah dengan orang yang rentan akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua orang yang terkena dampak telah berkonsultasi dan terlibat.

Warisan Budaya

Kekayaan budaya yang mempengaruhi risiko proyek dipastikan melalui penilaian klien. Penilaian ini harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk sifat proyek dan penggunaan lahan oleh masyarakat lokal dan adat, serta keberadaan warisan budaya yang terkenal di daerah proyek operasi. penilaian lapangan meliputi kunjungan ke masyarakat yang terkena dampak, termasuk masyarakat lokal dan penduduk asli, jika ada, dan pertanyaan dari keberadaan kekayaan budaya (yang mungkin termasuk batu-batu keramat, pohon, atau kebun; situs bersejarah menandai pekerjaan sebelumnya, pemakaman, dll). IFC akan meninjau penilaian klien dan sistem manajemen.

Hak Asasi Manusia

Kebijakan pemerintah yang terus-menerus mengenai tanggung jawab sektor swasta dalam hal hak asasi manusia. Kebijakan tersebut menyangkut, Kebijakan Keberlanjutan dan skema PS menggabungkan banyak hak asasi manusia yang diakui secara internasional, tetapi diutarakan dalam proyek bahasa operasional. Misalnya, hak untuk adil



dan menguntungkan kondisi kerja, kebebasan berserikat, dan mengesampingkan yang tunduk pada perbudakan, penghambaan, atau kerja paksa yang dibahas dalam PS2. Pengakuan peningkatan peran dan tanggung jawab sektor swasta yang berkaitan dengan hak asasi manusia juga telah menyebabkan pengembangan Pedoman Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia dan Manajemen, yang mencakup skenario sektor-sektor tertentu (termasuk wilayah pertanian) dapat memfasilitasi identifikasi dan analisis permasalahan hak asasi manusia⁷⁹.

Jender

IFC mengharapkan klien untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan gender melakukan usaha dan jenis kelamin yang tidak diinginkan dampak berbeda. Revisi diusulkan ke PS1, 4, 5, 7 dan 8 termasuk penekanan lebih besar pada pendekatan yang peka terhadap jender dan persyaratan yang berkaitan untuk penilaian risiko dan dampak proyek

Keanekaragaman

PS6, Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Rincian lebih lanjut dalam tubuh utama tulisan.

Pembangunan Masyarakat

Melalui kebijakan keberlanjutan, IFC melaksanakan komitmennya untuk keberlanjutan S&E, yang salah satu faktor adalah akumulasi manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, IFC mendorong klien mencapai lisensi sosial untuk beroperasi dengan mengatasi dampak buruk, mempromosikan lapangan kerja, dan, bila pantas, menjadi pemangku kepentingan aktif dalam pembangunan daerah. IFC melacak hasil pembangunan yang berhubungan dengan kegiatan investasi dengan menggunakan Sistem Pelacakan Hasil Pembangunan (DOTS), yang sering kali berisi unsur pengembangan masyarakat⁸⁰.

Pekerja

PS, terutama PS2, mengakui bahwa mengejar pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan harus seimbang dengan perlindungan hak-hak dasar pekerja. PS2 membutuhkan, antara lain, bahwa klien mengembangkan kebijakan sumber daya manusia, memungkinkan pekerja untuk mengambil bagian dari organisasi dan kebebasan berserikat, diskriminasi dan mempromosikan kesempatan yang sama, menahan diri dari mempekerjakan anak, eksploitasi buruh atau menggunakan paksa, dan menyediakan pekerja dengan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat. IFC meninjau informasi yang diberikan oleh klien, memeriksa laporan negara dan undang-undang perburuhan dan mengevaluasi catatan kerja sektor ini untuk menentukan apakah ada masalah yang memerlukan perhatian. Selama evaluasi, IFC melakukan verifikasi informasi yang diberikan oleh klien, menjaga operasional fisik dan wawancara situs dengan karyawan. Untuk sektor yang bergantung pada penggunaan pekerja anak atau kerja yang dipaksakan, kerja musiman, tenaga kerja atau penggunaan tenaga kerja migran dari Kontraktor Bidang Penilaian mencakup usaha khusus untuk mengatasi situasi ini dan memastikan bahwa praktik-praktik kerja yang seharusnya memang dijalankan.

Pengelolaan polusi dan pemanfaatan sumber daya alam

PS3 mewajibkan klien untuk memenuhi panduan WBG EHS ketika mengevaluasi dan memilih teknik pencegahan polusi dan kontrol untuk sebuah proyek. Pedoman yang relevan dengan operasi minyak kelapa adalah WBG EH&S untuk Produksi Tanaman Perkebunan, Vegetable Oil Pengolahan Pedoman, dan Panduan Jenderal EH&S. Dokumen-dokumen ini berisi diskusi masalah kesehatan lingkungan dan pekerjaan dan keamanan yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit dan operasi pengolahan minyak bersama dengan rekomendasi untuk manajemen mereka.

Berkenaan dengan masalah penggunaan air dan limbah air operasi minyak sawit, pedoman membahas isu-isu mengenai kuantitas dan kualitas penggunaan air dan pembuangan air yang terkontaminasi yang dihasilkan dari perkebunan dan fasilitas produksi. Sebagai contoh, jumlah air yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasil (sampel menggunakan air / rasio hasil disertakan) dan masalah potensial yang terkait dengan keterbatasan pasokan karena konservasi sumber daya air yang dimasukkan. Hal ini juga mengkaji isu-isu

⁷⁹ Mengusulkan revisi Standar Kinerja IFC 1 dan perhatikan bimbingan yang menyertai cakupan informasi tentang penggunaan penilaian dampak hak asasi manusia sebagai alat untuk mengelola risiko dalam situasi yang berisiko Tinggi.

⁸⁰

www.ifc.org/ifcext/devresultsinvestments.nsf/Content/DOTS.



limpasan gizi lebih dari bidang-bidang yang dapat mempengaruhi air permukaan dan air tanah. Angka-angka pada konsumsi air yang diperlukan pada berbagai tahap pengolahan disediakan dalam pedoman pengolahan minyak nabati. Benchmark industri ini disediakan untuk membantu klien dalam menetapkan tujuan dan meningkatkan efisiensi operasional. Persediaan air dan proses pengolahan air limbah yang dihasilkan (yaitu, dalam pengobatan TBS dalam minyak sawit mentah) dan dalam memperbaiki produk dan opsi lebih untuk mempertimbangkan untuk meminimalkan input dan benar menangani keluar sebelum pelepasan ke lingkungan juga dibahas (termasuk daftar pedoman proses limbah cair) dalam pedoman dari EH&S.

Konsultasi Klien dan Pengungkapan Informasi

Untuk semua proyek yang mungkin memiliki dampak sosial atau lingkungan, PS1 memerlukan klien untuk terlibat dengan masyarakat secara berkelanjutan. Sifat dan frekuensi keterlibatan ini akan mencerminkan dampak proyek potensial yang merugikan pada masyarakat yang terkena dampak. Bagian dari keterlibatan ini harus mencakup pengungkapan informasi yang relevan (misalnya, Lingkungan dan Sosial Action Plan) yang membantu orang memahami risiko, dampak, dan kesempatan yang terkait dengan proyek. Klien diharuskan untuk memberikan update secara berkala kepada pemangku kepentingan yang terkena dampak, setidaknya setiap tahun, pada pelaksanaan dan kemajuan pada item tertentu yang melibatkan risiko yang terus menerus untuk atau dampak terhadap masyarakat yang terkena dampak. Seperti yang tepat, di mana perubahan dan update tindakan seperti dampak perubahan material terhadap pemangku kepentingan yang terkena dampak, klien akan mengungkapkan ini ke publik. Adapun, informasi harus disediakan kepada para pemangku kepentingan yang terkena dampak dari tanggapan terhadap umpan balik masyarakat atau keluhan dan sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat yang terkena dampak lebih lanjut dalam kinerja sosial dan lingkungan hidup dari proyek. Penjelasan lebih lanjut akan konsultasi untuk proyek yang dapat memberi dampak signifikan terhadap keadaan sosial atau lingkungan hidup pada masyarakat akan disertakan pada laporan.

Pengungkapan IFC

Sesuai dengan Kebijakan Pengungkapannya, IFC mengungkap suatu ESRS yang merangkum temuan-temuan proses penilaian IFC, dan

ESAP yang berhubungan dengan Situs IFC sebelum pertimbangan yang lebih luas. Bagi kategori Proyek-proyek A, pengungkapan diperlukan sekurangnya minimal 60 hari sebelum pertimbangan luas.

Untuk kategori proyek A, pengungkapan tersebut dibutuhkan setidaknya 60 hari sebelum pertimbangan Dewan Direksi, dibandingkan dengan minimal 30 hari untuk kategori proyek B.

Bekerja dengan klien-klien sebelum suatu komitmen dilakukan

Dalam kunjungan uji tuntas ke klien, IFC mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dampak E & R dan masalah, efek menguntungkan yang terkait dengan investasi yang diusulkan, serta melakukan analisis gap untuk mengidentifikasi area proyek tidak dipenuhinya persyaratan kinerja standar dari IFC, sektor umum dan sektoral lingkungan, kesehatan dan pedoman keselamatan (EHS). Penilaian komitmen klien dan kapasitas untuk mengelola dampak diidentifikasi dan menentukan langkah perbaikan dan untuk menilai kualitas dan kecukupan sistem manajemen klien E&S dan praktik untuk menghindari, meminimalkan, atau mengurangi, offset / ganti rugi atas dampak buruk terhadap pekerja, masyarakat terkena dampak, dan lingkungan juga dilakukan. Pertemuan dengan perusahaan, pejabat pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk membahas aspek-aspek dari proyek E & S juga dilakukan;

Setelah uji kelayakan IFC, Environmental and Social Review Summary (ESRS) mendokumentasikan temuan analisis kesenjangan dan Environmental and Social Action Plan (ESAP) menyoroti kekurangan serta kunjungan ketidakpatuhan selama penilaian dan tugas-tugas khusus yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan yang dirancang secara signifikan. Identifikasi kesempatan (misalnya, efisiensi energi dan produksi bersih, mengurangi jejak air) untuk meningkatkan kinerja E & R, dan, bila memungkinkan, mendukung hubungan antara rumah, layanan konsultasi IFC (AS) dan klien untuk mewujudkan perbaikan ini.

Klien meninjau serta menyetujui isi CSR dan ESAP. Klien juga menandatangani surat-surat pernyataan yang mengizinkan IFC untuk melakukan pengungkapan dan pertimbangan atas usulan E&S, dokumentasi sponsor E&S yang relevan di situs IFC. Klien juga diharuskan untuk mengungkapkan informasi



E&R penilaian secara lokal. Semua proyek harus melibatkan dan berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lokal untuk mewujudkan kesadaran mereka dan mendukung proyek tersebut yang disebutkan di dalam situs Web IFC. Untuk proyek yang mempunyai potensi dampak sosial yang signifikan dan dapat merugikan masyarakat yang terkena dampak dan proyek yang melibatkan Penduduk Asli, IFC juga akan membuat keputusan resmi dari *Free, Prior and Informed Consultation* yang mengarah pada Dukungan Masyarakat Broad (BCS), dan dukungan untuk proyek.

Setelah Dewan menyetujui proyek di WBG, perjanjian investasi dibuat dan disepakati bersama dan difinalisasi. Kesepakatan akhir mencerminkan persyaratan Lingkungan dan *Social Action Plan* (ESAP) yang telah dikembangkan selama proses pemeriksaan. Terlampir adalah format tahunan E&S, laporan pengawasan proyek dari perjanjian investasi. Dana akan dicairkan setelah klien memenuhi syarat-syarat yang berlaku untuk proses pencairan.

Supervisi IFC

Pengawasan proyek IFC dimulai setelah komitmen yang dibuat. Setiap Kondisi Sosial dan Lingkungan harus dipenuhi sebelum pencairan pinjaman uang, khususnya mengenai status pelaksanaan ESAP. Proyek-proyek tertentu (Kategori A) memerlukan klien untuk melakukan langkah-langkah monitoring tambahan, seperti retensi ahli luar untuk memverifikasi informasi pemantauan. Klien diminta untuk melengkapi sebuah Monitoring Laporan Tahunan (AMR), yang disampaikan kepada IFC untuk ditinjau dan dinilai. AMRs membutuhkan melaporkan berbagai isu EH&S, disesuaikan dengan sifat dari risiko dan dampak dari proyek tersebut. IFC menggunakan pendekatan berbasis risiko sehubungan dengan menentukan kebutuhan dan frekuensi pemantauan kunjungan ke lokasi proyek.

Sertifikasi Mandiri

Secara singkat, Standar Kinerja didefinisikan sebagai "suatu sistem sertifikasi yang tepat, independen, dan hemat biaya berdasarkan standar kinerja objektif dan terukur yang dikembangkan melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan yang terkait, seperti komunitas lokal dan masyarakat, Masyarakat Adat, dan organisasi kemasyarakatan yang mewakili kepentingan masyarakat konsumen,

produsen, dan konservasi. Sistem seperti ini memiliki prosedur pengambilan keputusan yang adil, transparan dan independen untuk menghindari konflik kepentingan".

Selain itu, standar kinerja memberikan petunjuk tambahan tentang sistem sertifikasi yang ideal, termasuk sebagai berikut:

- "Mandiri, hemat biaya, dan berdasarkan standar kinerja objektif dan terukur yang didefinisikan pada tingkat nasional serta kompatibel dengan prinsip dan kriteria yang diterima secara internasional untuk manajemen yang bertanggung jawab dan penggunaan
- Membutuhkan penilaian pihak ketiga yang independen tentang kinerja manajemen
- Memiliki standar yang dikembangkan melalui proses konsultasi dan dialog yang terdiri atas wakil dari sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil
- Memiliki prosedur pengambilan keputusan secara adil, transparan, independen, dan dirancang untuk menghindari konflik kepentingan"

Tujuan utama partisipasi masa depan di sektor kelapa sawit adalah untuk memperkuat tingkat kinerja sektor. Karena itulah RSPO dan perusahaan sejenis lainnya menjadi sangat penting mengingat bahwa IFC hanya akan secara langsung memengaruhi sebagian kecil produsen melalui investasi langsung. Kinerja standar diketahui memiliki signifikansi global pada berbagai negara, sektor dan konteks proyek. Standar komunitas khusus yang diperoleh dari berbagai pemangku kepentingan (misalnya, RSPO, Sustainable Agricultural Network (SAN)) secara khusus dikembangkan dengan fokus yang jelas pada isu-isu sektor kelapa sawit dan lingkungan sosial. IFC, yang berpartisipasi sebagai salah satu dari banyak anggota dalam RSPO dan konferensi komoditas lainnya, tentu dapat bekerja untuk menyelaraskan dan memperkuat P terkait & C, tetapi tidak dalam posisi untuk secara sepihak menetapkan persyaratan sendiri untuk E & R orang lain yang bukan klien IFC.

Mekanisme Pengaduan

Sustainability Policy and the Performance Standards and Guidance Notes IFC mencerminkan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan. Dalam Standar Kinerja 1 (PS1), keterlibatan pemangku kepentingan diidentifikasi sebagai komponen kunci dari



Penilaian Sosial dan Lingkungan serta Sistem Manajemen, sementara kebutuhan mekanisme pengaduan di tingkat proyek juga ditentukan. Mekanisme pengaduan adalah proses formal yang secara sistematis merekam dan menyelesaikan keluhan yang disampaikan oleh karyawan yang terkena dampak dan pekerja kontrak juga harus memiliki akses ke mekanisme pengaduan di mana mereka dapat mengajukan kekhawatiran tentang pekerjaan, kondisi kerja, dll. dari dampak proyek. Pengembangan dan pelaksanaan mekanisme pelaporan di tingkat proyek menekankan hubungan langsung antara proyek dan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memberikan proyek dan pemangku kepentingan sarana untuk dapat mengatasi masalah sehari-hari dengan cepat, pra-empting klaim ke dalam sistem peradilan formal dan dengan demikian memastikan bahwa masalah-masalah ini tidak mempengaruhi lisensi sosial proyek untuk beroperasi.

Sementara mekanisme pengaduan harus dirancang agar sesuai dengan konteks proyek, prosedur dan prinsip-prinsip dasar tetap sama. IFC Good Practice Note mendefinisikan lima prinsip kunci untuk mekanisme pengaduan:

- Proporsionalitas - diskalakan untuk risiko dan dampak negatif terhadap masyarakat yang terkena dampak
- Kelayakan Budaya - dirancang untuk memperhitungkan cara-cara sesuai dengan budaya penanganan pengaduan
- Aksesibilitas - mekanisme yang jelas dan dapat dimengerti yang dapat diakses oleh semua segmen masyarakat yang terkena dampak tanpa biaya
- Transparansi - dan akuntabilitas kepada semua dan setiap pemangku kepentingan
- Perlindungan yang memadai: Mekanisme untuk menghindari retribusi dan tidak mencegah akses ke sumber daya lain
- Pengaduan secara umum akan mencakup:
- Sasaran - pernyataan yang mengacu pada tujuan dan manfaat dari prosedur pengaduan
- Ruang Lingkup - pernyataan yang jelas tentang jenis keluhan yang tercakup oleh prosedur
- Tanggung Jawab - Siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai komponen sistem
- Mekanisme untuk memastikan populasi yang terkena dampak mengetahui dan memahami tujuan mekanisme dan cara kerjanya
- Prosedur untuk mengumpulkan keluhan melalui telepon, keterlibatan interpersonal, surat elektronik, dll.
- Prosedur untuk pencatatan dan penerimaan pengaduan/keluhan/komentar
- Metodologi transparan untuk penyelidikan pengaduan/keluhan/komentar
- Diterima secara terbuka. Menyatakan target skala waktu untuk menanggapi pengaduan
- Prosedur untuk mengevaluasi lebih lanjut isu-isu yang belum terselesaikan
- Pemantauan dan tanggapan, dengan target untuk resolusi keluhan yang memuaskan
- Bagaimana prosedur akan dikomunikasikan kepada pihak ketiga
- Keterbukaan: bagaimana informasi tentang pengaduan/komentar/keluhan diselesaikan atau akan tersedia untuk umum

1. Keluhan didefinisikan sebagai "alasan yang nyata atau yang dirasakan untuk keluhan." Dapat dinyatakan secara formal (menulis misalnya) atau informal (misalnya melalui telepon). Dalam konteks proyek-proyek pembangunan dapat berhubungan dugaan atau potensi risiko dan dampak buruk yang terkait dengan proyek, dan dugaan kelalaian mematuhi komitmen untuk proyek tersebut, atau isu-isu yang berkaitan dengan pekerjaan dan kondisi kerja.

2. Karyawan dan pekerja kontrak juga harus memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan di mana mereka dapat mengajukan keprihatinan tentang pekerjaan, kondisi kerja, dll.

Rantai Pasokan

Menurut kerangka keberlanjutan IFC yang diadopsi pada tanggal 30 April 2006 dan secara khusus Standar Kinerja 1, "dampak yang terkait dengan rantai akan dibahas saat sumber daya yang digunakan oleh proyek ini adalah lingkungan sensitif atau tenaga kerja rendah biaya merupakan faktor dalam daya saing hal yang disediakan. Selain itu, PS2 menetapkan bahwa "klien akan belajar tentang alamat pekerja anak dan kerja paksa dalam rantai pasokan. Karena itu, ketika menilai resiko rantai pasok dan menunjukkan dampak



dalam persyaratan ini hal tersebut berlaku untuk klien dan sosial sistem manajemen lingkungan (SMS) yang akan mencakup unsur dalam mengelola rantai pasokan .

Lebih khusus lagi, ketika klien memiliki kendali atau pengaruh atas rantai pasokan, IFC akan memerlukan pelanggan untuk mengelola risiko E & S dan dampak dari rantai suplai. Untuk mencapai tujuan ini, Nasabah akan melakukan penilaian rantai suplai dan pemetaan risiko dan PS2 QP6 terkait dengan produksi dan perdagangan agro-produk dalam area pengaruh proyek, terutama berkaitan dengan pemasok utama.

Dalam hal persyaratan lingkungan dan sosial kunci dari prosesor dan pedagang harus mengikuti, IFC akan permintaan berikut:

1. Proses manajemen sistem: melalui sistem klien manajemen lingkungan dan sosial (EMS) yang dibutuhkan di bawah PS1, prosedur yang spesifik akan dikembangkan untuk lingkungan, masalah keamanan dan pekerjaan yang terkait dengan rantai pasokan, transportasi dan operasi pengolahan. Klien harus memiliki sistem manajemen rantai pasokan prosedur operasi. Untuk produsen utama, klien akan menerapkan praktik manajemen industri-spesifik yang baik dan teknologi yang tersedia dan, di mana produksi praktik dikodifikasikan dalam standar yang diakui secara internasional, klien akan memverifikasi penerapan praktik-praktik seperti pengelolaan berkelanjutan melalui sertifikasi independen sesuai dengan satu atau lebih sesuai standar. Untuk prosesor dan pedagang, dampak dan risiko terhadap keanekaragaman hayati dalam rantai pasokan klien akan didokumentasikan ketika ada potensi untuk habitat alami dan kritis secara signifikan dipengaruhi oleh pemasok utama klien.

2. Kebijakan rantai pasokan: Sebagai bagian dari ESMS, klien harus menyediakan kebijakan IFC untuk memastikan prosedur pembelian berkelanjutan dan kenaikan komoditas dalam jumlah bersertifikat. "kebijakan" harus menunjukkan bahwa ia akan dipromosikan sesuai dengan undang-undang lingkungan nasional (misalnya, pada pembukaan lahan ilegal) dan Standar Kinerja IFC.

3. Penyedia Database, sebagai bagian dari ESMS, penyedia database akan berada di tempat untuk mengumpulkan informasi tentang penyedia petani di setiap negara atau di tempat lain di mana klien beroperasi. Koleksi pemasok Database harus mencakup informasi mengenai kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan lingkungan nasional. Dalam konsep rantai pasokan diperpanjang, database akan membantu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pemasok menurut risiko E&S (portofolio tingkat risiko) dalam rangka (a) target yang ditetapkan bagi masa depan pencarian dan volume produk bersertifikat dalam rantai pasokan, (b) secara bertahap meningkatkan jumlah pemasok low-risk/certified, dan (c) tahap keluar pemasok terus-menerus pada akhir berisiko tinggi ("minyak sawit ilegal") dari sudut pandang ekologi.

4. Pelatihan: Klien akan menerapkan program pelatihan bagi staf lapangan untuk membangun in-house kapasitas audit untuk melaksanakan penilaian lingkungan dan sosial dan menentukan sifat, skala dan pentingnya isu lingkungan dan pembangunan sosial dalam rantai pasokan di setiap lokasi yang diberikan. Pelatihan ini harus termasuk sesi untuk pemasok (petani) pada praktik-praktik agronomi terbaik.

5. Prosedur sistem manajemen pengawasan E&SR rantai pasokan: database pemasok adalah alat untuk memantau dinamika pemasok dapat menarik / sertifikat dan diperluas untuk memasukkan data dari rantai suplai negara-negara yang lebih besar . Setelah pengumpulan data, klien akan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dalam perusahaan ESMS untuk membantu manajemen vendor untuk mengurangi risiko dalam rantai pasokan. Prosedur ini akan memungkinkan IFC untuk melacak (a) kemajuan klien dalam disiplin manajerial dan meningkatkan komunikasi ke alamat sertifikasi, (b) meningkatkan produktivitas tanaman dan meningkatkan jejak analisis, (c) metrik kinerja untuk memastikan keseimbangan sosial, lingkungan, dan keprihatinan operasional, dan (d) menghasilkan persentase bersertifikat dari total volume yang diperdagangkan/diproses.

